

Bulletin *Somba Opu*



Fort Rotterdam 1970

Fort Rotterdam 2006

ISSN

1441 - 2930

Vol. 10 No. 14 Desember 2006



Diterbitkan Oleh :

BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA MAKASSAR

Kerangka Pikir Post Prosesual Arkeologi Relevansinya Dengan Cultural Resource Management

Oleh : Supriadi*

A. Sebuah Pengantar

Ketika modernisme yang berlandaskan pada filsafat positivisme menguasai ilmu pengetahuan, hukum-hukum ilmu alam diterapkan pada semua disiplin ilmu termasuk pada ilmu-ilmu sosial. Penganut modernisme menganggap dapat menjelaskan semua realitas dengan tuntas lewat kerangka pikir positivisme yang deduktif – rasional, obyektif, analitis dan dikotomis (Tanudirjo, tanpa tahun). Metode-metode ilmu alam telah sukses menjelaskan gejala-gejala alam sampai menjadi teknologi. Berangkat dari keyakinan ini, maka pendekatan-pendekatan yang bersumber dari ilmu alam diyakini dapat sukses diterapkan pada ilmu-ilmu tentang masyarakat (Hardiman, 2003).

Arkeologi sebagai ilmu pengetahuan juga tidak terlepas dari dominasi modernisme yang berpangkal pada jaman *aufklarung*. Cara pandang modernisme telah melahirkan sebuah gerakan baru dalam arkeologi yang oleh penganutnya disebut dengan *arkeologi prosesual*. Menurut golongan ini yang dipelopori oleh Lewis R. Binford bahwa arkeologi harus lebih bersifat *saintifik* daripada *humanistik*. Penjelasan

tentang masa lampau harus bersifat eksplanatif dengan menerapkan dalil-dalil yang lebih sistematis. Penerapan pendekatan ini dianggap dapat menjelaskan proses budaya yang terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu penerapan metode ilmu alam adalah suatu keharusan.

Kehadiran modernisme dengan segala keberhasilannya ternyata tetap mendapat kecaman dan dianggap telah gagal. Oleh mazhab frankfurt, positivisme dalam ilmu sosial menurutnya malah membawa masalah dan malapetaka. Bukan hanya pada tataran *epistemologi* ilmu pengetahuan tetapi juga bagi kemanusiaan. Menurutya bahwa wilayah ilmu-ilmu sosial adalah wilayah sosial yang manusiawi, suatu wilayah yang dihayati. Penafsiran-penafsiran ilmu-ilmu sosial bersumber dari dunia kehidupan sosial dimana peneliti berfikir tidak terlepas dari dunia kehidupan sosial (Hardiman, 2003). Cara pandang ini kemudian melahirkan sebuah gerakan pemikiran yang disebut dengan *Post Modernisme*.

Perubahan cara pandang dari *modernisme* ke *post modernisme* juga berimplikasi pada disiplin ilmu arkeologi. Keberhasilan yang telah dicapai oleh arkeologi prosesual mulai mendapat kecaman dan dianggap tidak mampu menjelaskan makna yang terdapat pada benda-benda arkeologis. Gerakan pemikiran yang bersifat kritis dan dekonstruktif dalam

arkeologi dikenal dengan istilah *Postprosesual Archaeology*. Arkeologi postprosesual yang dipelopori oleh Ian Hodder mencoba menggoncang kemapanan arkeologi prosesual dan menganggap bahwa prosesual arkeologi telah gagal menjelaskan berbagai persoalan dalam arkeologi. Menurutnya penganut aliran ini bahwa arkeologi prosesual telah salah dalam melihat konsepsi tentang budaya dan masyarakat, bentuk pengetahuan yang cocok untuk arkeologi, laku keilmuan arkeologi, termasuk ideologi, politik dan kedudukan arkeologi dalam masa sekarang.

B. Kerangka Pikir Arkeologi Postprosesual

Arkeologi postprosesual lahir sebagai usaha dekonstruksi terhadap arkeologi prosesual, akibatnya dalam penjelasan-penjelasan tentang kerangka pikir post prosesual selalu terkait dengan kerangka pikir arkeologi prosesual. Kerangka pikir yang diajukan post prosesual akan selalu menjadi pembanding sekaligus bantahan terhadap kerangka pikir prosesual arkeologi. Jika prosesual berlandaskan pada filsafat materialisme yang positivistik, maka arkeologi postprosesual lebih pada yang idealisme (Tanudirjo, 1993).

Paradigma yang diusung oleh penganut arkeologi postprosesual adalah melihat budaya sebagai hasil pikir manusia dan selalu ada timbal balik yang aktif antara gagasan dan tindakan manusia dengan budaya

bendawi. Budaya muncul dari kemampuan pikir masyarakat dan bukan sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan sebagaimana yang didengungkan oleh prosesual arkeologi. Implikasi dari pandangan ini kemudian adalah menolak jika individu passif dalam proses pembentukan budaya. Menurut kerangka pikir postprosesual bahwa individu berperan aktif dalam membentuk budaya dan masyarakatnya (Johnson, 1999). Oleh karena itu budaya dan masyarakat tidak dapat direduksi menjadi sekedar seperangkat tingkah laku manusia dalam usahanya untuk beradaptasi terhadap lingkungan fisik dan sosial (Hodder, 1989; Tanudirjo, tanpa tahun).

Mengingat bahwa budaya merupakan hasil pikir manusia dan individu yang aktif, maka budaya itu bersifat khas, relatif dan partikularistik. Hubungan antara manusia dengan budaya bendawi selau terkait dengan tiga faktor yakni pribadi manusia, konteks budaya dan sejarah (Hodder, 1989; Tanudirjo, tanpa tahun). Oleh karena itu makna sebuah budaya bendawi akan berbeda dan berubah pada setiap masyarakat. Pemikiran ini menolak pandangan penganut prosesual arkeologi yang menerapkan dalil atau model melalui metode hipotesis-deduktif yang bersifat general untuk menjelaskan realitas budaya.

Lebih lanjut, pandangan post prosesual melihat bahwa penjelasan tentang masa lampau harus

diletakkan dalam kerangka sejarah. Hal ini diakibatkan bahwa pengetahuan itu bersifat subyektif dan khusus. Eksplanasi dalam kerangka antropologi yang ditawarkan oleh prosesual arkeologi bukannya salah, tetapi tidak mampu menjelaskan dimensi budaya yang berbentuk idealistik dan simbolik. Menurut Hodder bahwa pendekatan yang dilakukan oleh prosesual arkeologi yang sistemik dan materialistik telah mengabaikan peran individu, aspek ideologis, dan gagasan internal. Memang untuk mengungkap gagasan dan kerangka pikir masyarakat sebagai pencipta budaya memang sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Akan ada benang merah yang menjembatani antara konteks sosial budaya masa lampau dan masa kini (Hodder, 1989).

Berbeda dengan prosesual yang melihat budaya sebagai sebagai sebuah sistem hasil adaptasi, post prosesual melihat bahwa budaya sebagai hasil gagasan manusia. Pengetahuan yang obyektif tentang masa lampau dengan penerapan dalil-dalil, oleh post prosesual dianggap tidak ada. Menurut penganut post prosesual bahwa pengetahuan yang obyektif tentang masa lampau itu tidak ada, yang ada adalah pengetahuan masa lampau versi masa kini. Budaya material peninggalan masa lampau sudah kehilangan konteksnya sehingga tidak mungkin dapat direkonstruksi seperti aslinya. Tugas arkeologi kemudian

hanyalah menjadi penerjemah atau interpreter budaya masa lampau versi masa kini, dengan kata lain bahwa pengetahuan arkeologi harus dilihat sebagai produk sosial masa kini (Hodder, 1989).

Untuk mengungkap dimensi ideologis dan simbolis dalam budaya material peninggalan masa lampau, maka budaya material tersebut harus dilihat sebagai sebuah "teks". Sebagaimana teks naskah-naskah kuno atau karya sastra, pembaca teks belum tentu dapat menangkap secara tepat apa yang ingin disampaikan oleh sipembuat naskah. Kaitannya dengan arkeologi bahwa jika budaya material dilihat sebagai sebuah teks, maka arkeolog yang berfungsi sebagai penerjemah teks tersebut belum tentu dapat mengungkap makna dibalik benda tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena budaya tersebut adalah dengan pendekatan *hermeneutik* (Hodder, 1989; Johnson, 1999).

Kata *hermeneutik* atau *hermeneutika* adalah istilah yang sudah diindonesiakan dari kata Inggris yakni *hermeneutics*. Kata *hermeneutics* sendiri berasal dari kata kerja Yunani *hermeneuo* yang berarti mengungkapkan pikiran seseorang dengan kata-kata. *Hermeneuo* juga dapat berarti menerjemahkan dan juga bertindak sebagai penafsir. Menerjemahkan disini diartikan sebagai berusaha mengalihkan dari bahasa

asing yang maknanya gelap menuju kedalam bahasa yang kita sendiri yang maknanya jelas. Menafsirkan adalah kegiatan mengungkap bentuk pemikiran yang kurang jelas ke dalam bentuk pemikiran yang jelas. (Hardiman, 2003).

Karena sifat hermeneutik berupa penafsiran, maka kiprah arkeologi dalam konsep post prosesual lebih menekankan pada proses interpretasi. Kerja yang bersifat interpretatif ini kemudian membuat post prosesual arkeologi lebih membuka diri untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam terhadap teks yang dibacanya. Implikasinya, dalam pandangan post prosesual bahwa sebuah budaya bendawi dapat diinterpretasikan oleh siapa saja. Dengan demikian, penjelasan tentang masa lampau akan lebih beraneka ragam yang pada akhirnya akan membuka jalan untuk lebih memahami budaya bendawi masa lampau. Penafsiran yang dihasilkan akan lebih pluralistik. Berbeda dengan prosesual arkeologi yang menerapkan metode ilmiah secara ketat, maka post prosesual arkeologi malah menerima pandangan yang disebut dengan pseudo arkeologi. Hal ini kemudian post prosesual arkeologi sering dianggap tidak ilmiah.

C. Cultural Resource Management

Keberadaan benda-benda sumberdaya arkeologis yang berada bersama kita sekarang sangat

bervariasi baik dari segi bentuk maupun bahan. Secara umum sumberdaya ini didominasi oleh tinggalan yang berupa fisik ataupun reruntuhan "budaya" yang terbentang pada landscape masyarakat masa lampau (Scovill dkk, 1977; 45). Begitupun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sumberdaya arkeologis sangat variatif. Sebuah benda yang sangat bernilai pada masyarakat atau tempat tertentu, bisa jadi tidak punya nilai apa-apa pada masyarakat lain di tempat lain (Pearson & Sullivan, 1995; 127).

Seiring perkembangan jaman, keterancaman terhadap sumberdaya arkeologi semakin besar. Beberapa tinggalan arkeologis mulai hilang atau bahkan hancur oleh pembangunan. Fenomena ini kemudian melahirkan sebuah kajian baru dalam arkeologi yakni *Cultural resource Management* (CRM). Jika tolak ukurnya adalah perangkat hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya arkeologi, maka penerapan CRM pertama kali di Swedia pada tahun 1666 kemudian diikuti oleh beberapa negara Eropa (Tanudirjo, 1998; Cleere, 1990). Amerika serikat secara formal melaksanakan CRM pada tahun 1906 dengan adanya antiquity act yang merupakan respon atas keterancaman sumberdaya arkeologi (Schiffer & Gumerman, 1977).

Sebelum membahas tentang *Cultural Resource management*, maka ada beberapa elemen yang perlu dipahami. Pertama bahwa membicarakan tentang

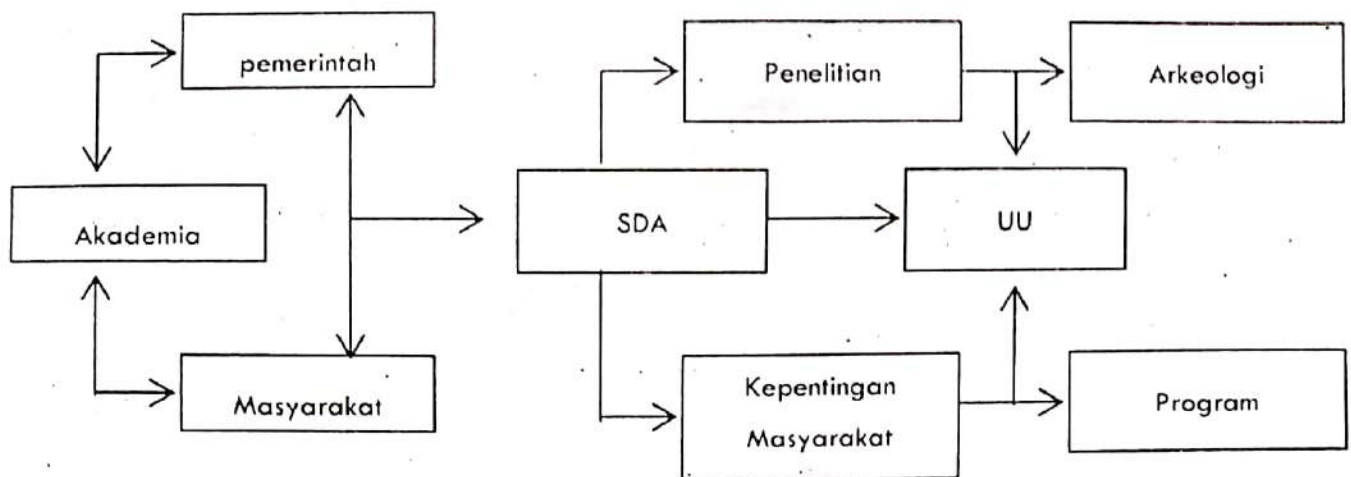
cultural resource akan terkait dengan natural resource. *Natural resource* adalah elemen dari lingkungan alam dimana masyarakat menggunakan, memodifikasi, dikelola baik untuk dilestarikan maupun untuk dieksploitsi. *Cultural resource* sendiri adalah hasil interaksi dan atau intervensi manusia terhadap lingkungan alam (*natural resouce*). Term *cultural resource* mencakup semua manifestasi dari manusia baik yang berupa bangunan, *landscape*, artefak, literatur, seni, maupun lembaga budaya. Kedua adalah pengertian tentang manajemen kaitannya dengan arkeologi. Manajemen dalam konteks ini diartikan sebagai cara atau respon terhadap pemilihan lahan dimana yang akan digunakan, dieksploitasi atau yang akan dikonservasi (Pearson & Sullivan, 1995).

Pendapat laian yang dikemukakan oled Daud Aris Tanudirjo (1998) yakni *Cultural Resource Mangement* itu adalah bagaimana mengelola sebuah situs atau kawasan sumberdaya arkeologi untuk mengakomodir beberapa kepentingan dalam artian bahwa kajian *Cultural Resource Management* harus dilihat sebagai manajemen konflik (Tanudirjo, 1998).

Secara garis besar, *cultural resource management* menekankan pada lima aspek. Pertama adalah sifat dari sumberdaya arkeologi yang tidak dapat diperbaharui, terbatas, tidak bisa diganti dan kontekstual. Kedua ada kesadaran bahwa tidak semua sumberdaya arkeologis dapat diselamatkan dari

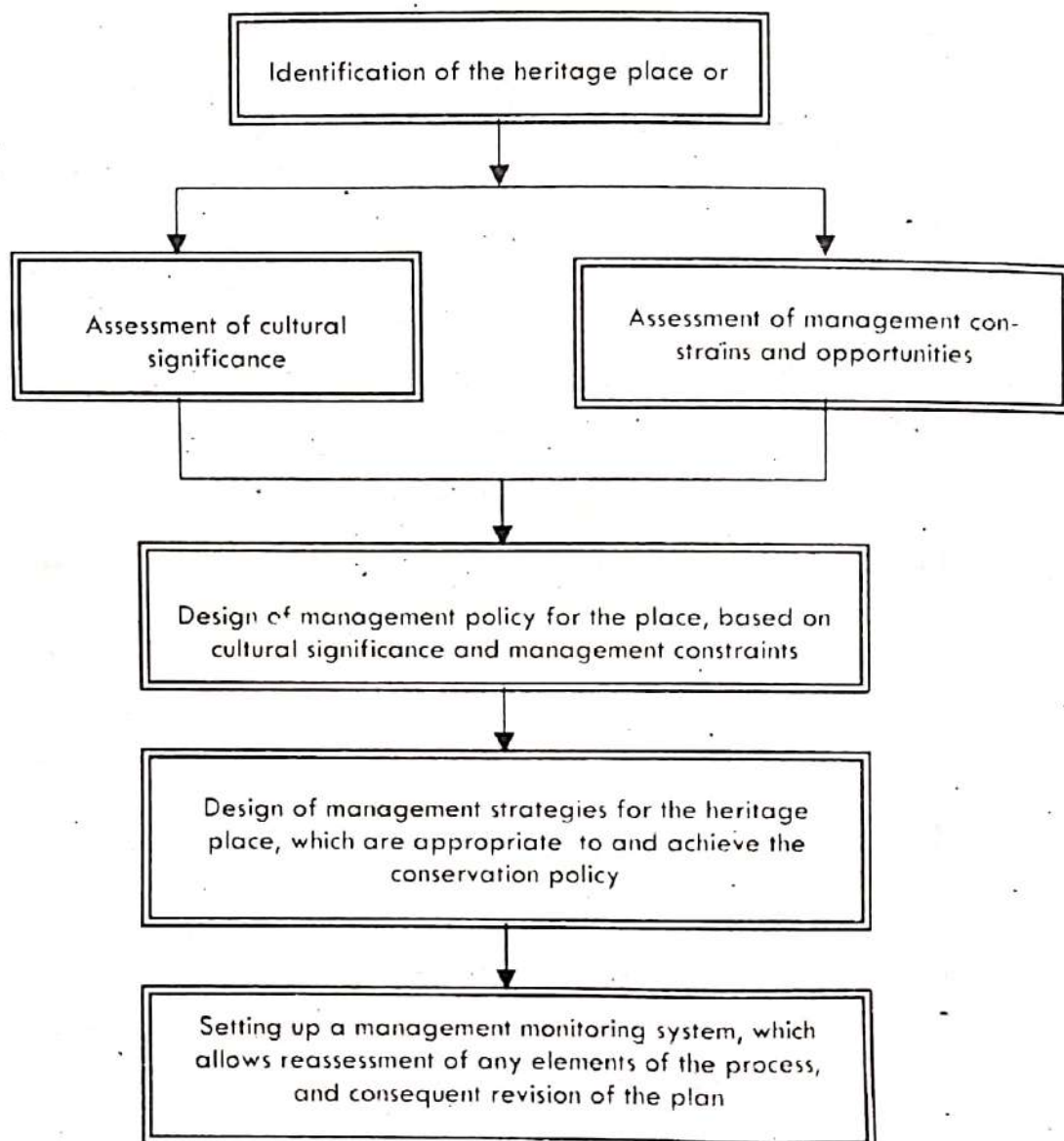
ancaman kerusakan ataupun musnah baik karena proses alam maupun faktor yang disebabkan oleh manusia. Sekali sumberdaya arkeologi tersebut hilang maka tidak mungkin akan dimunculkan kembali. Begitupun dengan konteksnya, jika sebuah benda arkeologis kehilangan konteks maka tidak dapat memberikan informasi apa-apa. Ketiga adanya berbagai kepentingan diluar dari kepentingan arkeologi itu sendiri. Kepentingan di luar arkeologi yaitu masyarakat luas (publik), antara lain : ekonomi, pariwisata, masyarakat, generasi mendatang (Tanudirjo, 2005).

Aspek keempat yang menjadi penekanan *cultural resource management* adalah pembangunan atau pengembangan yang berkelanjutan. Pengelolaan terhadap sumberdaya arkeologi dilakukan bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi lebih pada bagaimana pengelolaan tersebut dapat berjalan secara terus menerus. Kelima adalah aspek hukum dan politis. Bahwa antara academia, pemerintah harus ada keterkaitan dari aspek hukum dan politis. Bagaimana pola keterkaitan tersebut, sebagaimana yang digambarkan dalam skema berikut ini :



(Sumber: Dr.Daud Ari Tanudirjo. Materi kuliah Teori Arkeologi pada program studi arkeologi, Pasca Sarjana Universitas Gadjra Mada).

Cultural resource management, dalam penerapannya mencakup lima langkah utama yakni : 1) Lokasi, identifikasi dan dokumentasi sumberdaya baik sumberdaya budaya maupun kawasannya, 2) Assessment value (penilaian nilai penting) terhadap kawasan, 3) Perencanaan dan pembuatan keputusan berdasarkan dari nilai penting, peluang dan desakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi, 4) implementasi dari perencanaan dan kebijakan, dan 5) evaluasi (Pearson and Sullivan, 1995). Langkah kerja dari *Cultural Resource Management* sebagaimana yang digambarkan dalam skema berikut ini :



Sumber : Pearson and Sullivan. *Looking After Heritage Places : The Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*. Melbourne University Press. 1995).

Tujuan dari *cultural resource management* secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Menjelaskan atau menguraikan semua nilai (*value*) yang ada pada kawasan sumber daya arkeologi.
- Mendesain strategi perlindungan dalam jangka

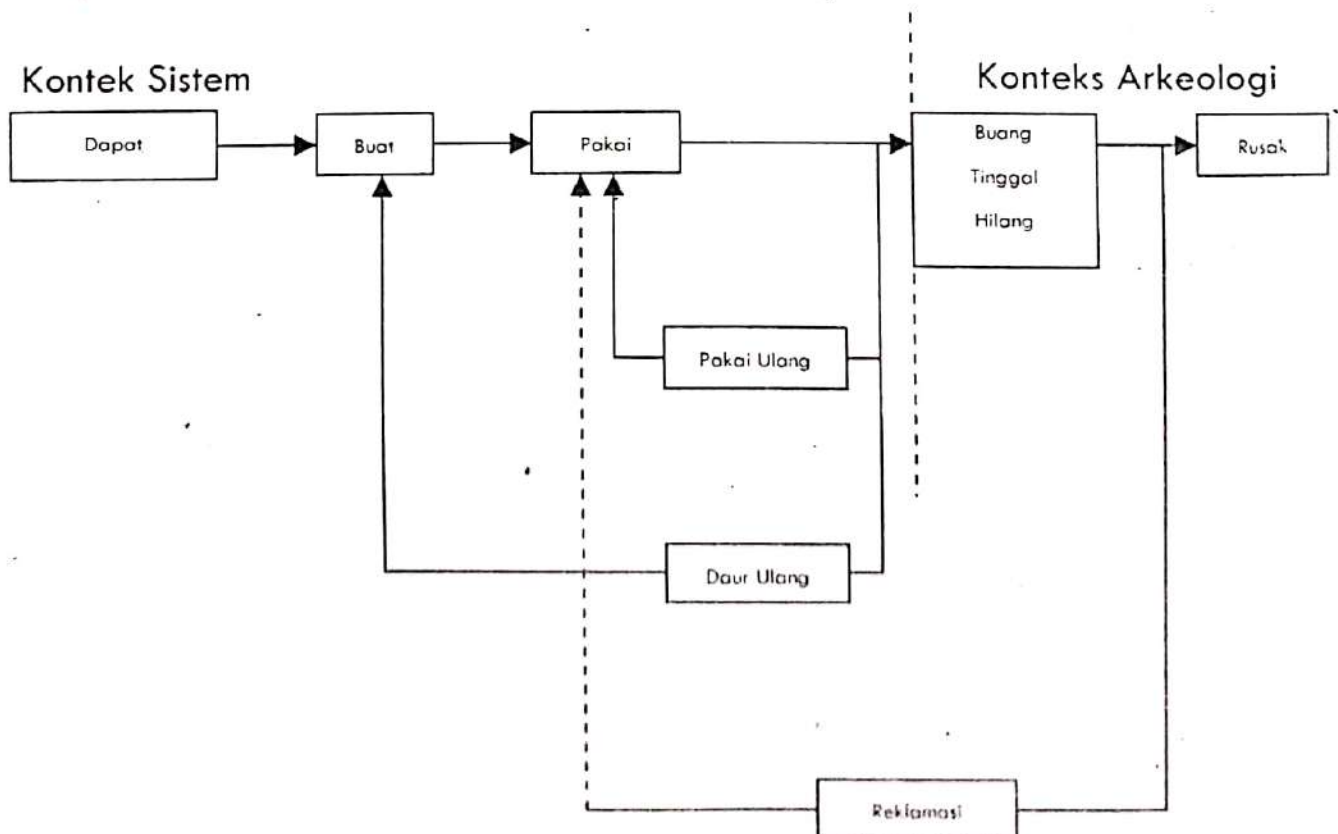
panjang minimal mencakup aspek hukum, perlindungan fisik dan konservasi.

- Implementasi *cultural resource management* dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kerusakan yang lebih parah, baik secara fisik maupun nilai yang dikandung oleh sumberdaya arkeologi tersebut. Disamping itu, pengelolaan terhadap kawasan sumberdaya arkeologi juga dapat mengoptimalkan peluang penanganan efek-efek perusakan baik yang menyangkut obyek arkeologi itu sendiri maupun komponen-komponen yang lain.
- Untuk perluasan yang sesuai, presentasi nilai kawasan untuk membuka akses masyarakat (*public*) untuk memaknai sumberdaya arkeologi.

D. Relevansi Kerangka Pikir Arkeologi Postprosesual dengan Cultural Resource Management.

Term *cultural resource* mencakup semua manifestasi dari manusia baik yang berupa bangunan, *landscape*, artefak, literatur, seni, maupun lembaga budaya. Kedua adalah pengertian tentang manajemen kaitannya dengan arkeologi. Dari term ini menggambarkan bahwa pengelolaan sumberdaya arkeologi lebih terbuka, lebih luas dan mencakup berbagai aspek. Sumberdaya arkeologi bukan milik arkeologi semata tetapi milik publik, milik semua orang.

Tentunya hal ini membuat arkeologi harus lebih terbuka pada pendapat dan pandangan pihak luar. Arkeologi hanya bertindak sebagai penerjemah yang menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Oleh karena itu, dalam hal pengelolaan sumberdaya arkeologi hendaknya menekankan pada aspek keterbalikan dan meminimalkan intervensi pada informasi yang ada. Informasi yang asli harus dipertahankan untuk tetap memberi peluang pada masyarakat untuk menafsirkan masa lampau sesuai dengan imajinasinya (Tanudirjo, tanpa tahun). posisi dan kerja arkeologi sendiri secara jelas dapat kita lihat pada skema yang ditawarkan oleh Tanudirjo (2005) dengan menggunakan kerangka proses transformasi Schiffer.



(Sumber: Daud Aris Tanudirjo. *Arkeolog Publik Antara Dunia Ilmiah dan Dunia Nyata*. Makalah yang disampaikan dalam *Diskusi Ilmiah Arkeologi XX, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia di Jogjakarta, tgl 15 Juni 2005*).

Dari bagan ini jelas bahwa tugas arkeologi adalah berupaya mempertahankan sumberdaya arkeologi tetap berada dalam konteks sistem. Hakikatnya adalah arkeologi melaksanakan proses pakai ulang, daur ulang, maupun reklamasi (Tanudirjo, 2005). Dengan mencoba mempertahankan sumberdaya arkeologi agar tetap berada dalam konteks sistem berarti sebuah sumberdaya arkeologi akan dimaknai sangat tergantung pada konteks sosial budaya masyarakat sekarang. Makna yang ada adalah bukan makna sebagaimana makna yang dimiliki atau diinginkan oleh pembuatnya tetapi makna baru berdasarkan pemaknaan masyarakat sekarang.

Kaitan antara kerja arkeologi, *cultural resource management* dengan kerangka pikir arkeologi postprosesual akan diurai dalam skema kerja dalam *cultural resource management*. Langkah pertama dalam pelaksanaan *Cultural resource management*, adalah dua jenis kegiatan yang dilakukan yakni identifikasi dan dokumentasi lokasi yang akan dikelola. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apa dan yang mana perlu dilestarikan dan dikelola. Jika kita mengajukan pertanyaan apa yang akan dilestarikan dan dikelola,

maka tentunya pertanyaan ini akan dijawab dengan menjawab bahwa yang perlu dilestarikan adalah sumberdaya arkeologi. Namun, jika kita lanjutkan dengan pertanyaan sumberdaya arkeologi yang bagaimana? Jawaban atas pertanyaan ini akan dilacak dan diurai secara *ontologis* dan *epistemologis* dari pandangan prosesual arkeologi dan post prosesual arkeologi.

Secara *ontologi*, prosesual arkeologi menganggap bahwa apa yang ada adalah apa yang terlihat. Nilai dan makna yang terkandung dibalik budaya bendawi tidak mungkin dapat dijelaskan. Berbeda dengan pandangan prosesual arkeologi, post prosesual arkeologi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hodder (1989) bahwa ada dua jenis pengertian dalam arkeologi. Kedua jenis pengertian tersebut yakni, struktur sistem *inter-relationship functional* dan struktur yang berhubungan dengan ide dan simbol. Pengertian pertama mencakup hubungan antara fungsi dengan faktor dan proses yang berhubungan dengan ekonomi dan struktur sosial. Merujuk pada lingkungan hubungannya dengan tingkah laku. Pengertian kedua mencakup tentang ide atau gagasan yang ada dibalik budaya bendawi. Ide yang ditunjukkan oleh simbol material yang bermain dalam struktur masyarakat (Hodder, 1989; 1985). Pemahaman tentang ide, gagasan dan makna dibalik budaya bendawi dengan

sendirinya menjelaskan apa yang nampak. Dengan demikian maka yang perlu dilestarikan adalah budaya bendawi sekaligus makna yang terdapat pada benda tersebut.

Secara epistemologi, prosesual arkeologi menerapkan pendekatan deduktif. Alur penelitian dilakukan dengan penyusunan hipotesis dan pencarian data fakta untuk mendukung hipotesis tersebut. Data dalam pandangan ini hanyalah yang relevant dengan pengujian hipotesis. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan pengujian hipotesis yang diajukan kemudian diabaikan. Post prosesual arkeologi yang berada dibawah payung sejarah lebih cenderung menggunakan pendekatan induktif. Semua data yang ada dikumpulkan. Setiap budaya bendawi peninggalan masa lampau yang ada sekarang ini ibarat *puzzle*. Setiap bagian-bagian mempunyai posisi tersendiri. Sebuah bagian yang hilang akan membuat *puzzle* tersebut rusak dan tidak mungkin diselesaikan dengan sempurna (Schaafsma, 1990). Merujuk pada tujuan cultural resource management yakni menguraikan semua nilai pada kawasan, pengelolaan dengan aspek pelestarian ditujukan untuk masyarakat dan generasi mendatang, maka seharusnya pendokumentasian tidak dilakukan berdasarkan keinginan dari pendokumentasi tetapi lebih pada kepentingan secara umum. Dalam hal ini, kiranya pandangan post prosesual arkeologi lebih

tepat diterapkan.

Langkah kedua dalam *cultural resource management* adalah *Assesment Value* (penilaian nilai penting). Nilai penting yang dimaksud adalah bukan hanya nilai penting secara arkeologis saja; tetapi mencakup berbagai kriteria. Schiffer (1977) memaparkan enam kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian yakni, *nilai scientific*, *nilai historical*, *nilai ethnic*, *nilai public*, *nilai legal*, dan *nilai monetary*. Pearson dan Sullivan (1995) menguraikan juga ada enam element nilai penting dari sebuah sumberdaya arkeologis yakni : Nilai estetik, nilai arsitektur, nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, nilai sosial, dan nilai cultural.

Menurut "Burra Charter" *The Australian ICOMOS Charter for Conservation of Places of Cultural Significance*, yang dimaksud dengan *Cultural significance* adalah estetik, sejarah, ilmu pengetahuan, nilai sosial untuk masa lalu, sekarang atau generasi mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, kemudian dijelaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1992, maka sebuah benda cagar budaya dapat mengandung nilai untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan atau kebudayaan.

Melihat begitu banyaknya aspek dalam melakukan suatu penilaian, tentunya arkeologi tidak mungkin mencakup keseluruhan atau secara arogan dan merasa dirinya lebih benar untuk melakukan penilaian. Arkeologi sebagai disiplin ilmu perlu lebih membuka diri terhadap interpretasi-interpretasi dari pihak diluar arkeologi. Baik dari disiplin ilmu lain maupun masyarakat sebagai pemilik sumberdaya arkeologi. Beragamnya nilai penting sebuah sumberdaya arkeologi, dalam melakukan sebuah penilaian tentunya juga akan sulit menerapkan dalil-dalil yang bersifat general. Sebuah pemahaman bahwa standar atau cara melakukan penilaian dari beragam aspek tersebut tentunya berbeda-beda. Masyarakat membuat penilaian sendiri setiap saat terhadap tingkat atau derajat nilai penting dari sumberdaya arkeologi. Pada tataran ini, kita dapat melihat pandangan post prosesual arkeologi yang lebih membuka diri dari pandangan pihak luar arkeologi lebih diterima.

Dari berbagai aspek yang pernah diajukan dalam melakukan penilaian nilai penting sumberdaya arkeologi, nilai etnic, nilai publik dan kepentingan untuk generasi mendatang selalu dicantumkan. Hal ini kemudian harus dipahami bahwa, masyarakat terlibat dalam pemberian makna tersebut yang tentunya dalam memberi makna akan sangat tergantung pada konteks sosial dan budayanya sendiri. Ketika masyarakat menganggap bahwa sebuah sumberdaya arkeologi

tidak punya makna, tentunya akan menjadi pertimbangan apakah sumberdaya arkeologi tersebut layak atau tidak untuk dipertahankan. Kaitannya dengan kerangka pikir post prosesual arkeologi adalah masa lampau itu tidak ada, yang ada adalah masa lampau versi masa kini. Pengetahuan atau tafsiran tentang masa lampau bersifat relatif dan terus berubah dari waktu ke waktu. Penafsiran juga sangat tergantung pada konteks sosial budaya sang penafsir. Lokasi yang berbeda juga akan memberi makna yang berbeda pula terhadap sumberdaya arkeologi (Herrmann, 1989). Oleh karena itu tidak mungkin menerapkan dalil atau hukum yang bersifat general sebagaimana yang didengungkan oleh prosesual arkeologi.

Hasil dari penilaian kemudian dijadikan acuan untuk membuat desain strategi pengelolaan sumberdaya arkeologi. Hasil inilah yang menentukan apakah sebuah sumberdaya arkeologi dihancurkan, dikonservasi atau dibiarkan saja (Pearson & Sullivan, 1995). Tentunya hasil penilaian ini tidak mungkin obyektif karena sangat tergantung pada siapa yang menilai, mengapa dan untuk apa penilaian itu. Hal ini sejalan dengan pandangan post prosesual yang menyatakan bahwa penjelasan tentang masa lampau tidak mungkin obyektif. Kerja arkeologi sesungguhnya adalah kerja politik. Sebuah peninggalan arkeologi diinterpretasi sangat tergantung pada siapa, mengapa dan untuk apa.

Penerapan kerangka pikir post prosesual arkeologi dalam *Cultural Resource Management*, maka saatnya arkeologi mereposisi dirinya. Dari *Archaeology Service for the State* menjadi *Public Archaeology*. Arkeologi bukan sebagai pemegang otoritas penuh terhadap sumberdaya arkeologi tetapi peranannya sebagai *Steward* dan bertugas mengkonstruksi pemikiran.

* Penulis Adalah Dosen Arkeologi Fakultas
Sastra Universitas Hasanuddin

Daftar Pustaka

- Cleere, H. F. (ed). 1989. *Archaeological Heritage Mangement in the Modern Worl*. Unwin Hyman. London.
- Hardiman, Fransidco Budi. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Kanisius. Yogyakarta.
- Herrmann, Joachim. 1989. " Worl Archaeology – The Worlds Cultural Heritage" dalam Cleere, H. F. (ed). *Archaeological Heritage Mangement in the Modern Worl*. Unwin Hyman. London.
- Hodder, Ian. 1985. " Postprocessual Archaeology" dalam Schiffer, Michael, B. (ed). *Advances in Arcaheological Method and Theory. Volume 8*. Academic Press. Orlando.
- , 1989. *Reading the Past*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Johnson, Matthew. 1999. *Archaeological Theory : An Introduction*. Blackwell Publisher. Massachusets USA.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places: The Basics of Heritage Planning for Managers, landowners and Administrators*. Melbourne University Press. Melbourne.
- Schaafsma, Curtis F. 1989. "Significant Until Proven otherwise : Problem Versus Representative dalam Cleere, Henry

(ed). 1989. *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. Unwin Hyman. London.

Schiffer, Michael B and George J. Gumerman. 1977 (ed). *Conservation Archaeology : A Guide for Cultural Resource Management Studies*. Academic Press. New York.

Scovill, Douglas H, Garland J. Gordon and Keith M. Anderson. 1977. " Guidelines for the Preparation of Statements of Enviromental Impact on Archaeological Resources " dalam Schiffer, Michael B and George J. Gumerman. 1977 (ed). *Conservation Archaeology : A Guide for Cultural Resource Management Studies*. Academic Press. New York.

Tanudirjo, Daud Aris. Tanpa Tahun. *Arkeologi Pasca-modernisme Untuk Direnungkan*.

-----, 1993. " Arkeologi Indonesia Masa Depan : Unilinierisme atau Multilinierisme ". Makalah disampaikan dalam *Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi, Pusat Arkeologi Nasional di Yogyakarta*.

Tanudirjo, Daud Aris. 1998. " Cultural Resource Management sebagai Manajemen Konflik " dalam *Majalah Artefak No. 19/Februari 1998*. Jogjakarta.

-----, 2005. " Arkeologi Publik Antara Dunia Ilmiah dan Dunia Nyata ". Makalah disampaikan dalam *Diskusi Ilmiah Arkeologi XX, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Komisariat*

Daerah Yogyakarta – Jawa Tengah pada
Tanggal 15 Juni 2005 di Yogyakarta.

Burra Charter " The Australian ICOMOS Charter for
Conservation of Places of Cultural Significance.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya.

Gagasan Pengembangan Kawasan Karst Maros Untuk Objek Wisata Terpadu

Oleh : M. Nur*

A. Gagasan

Ada dua kenyataan menarik tentang fenomena pengembangan objek wisata di Indonesia. Pertama, pengembangan objek wisata alam dengan keunikan alam tropis cenderung lebih diandalkan, kedua, pengembangan objek wisata (objek wisata alam dan budaya) sebagian besar didesain berdiri sendiri. Di sisi lain juga terdapat dua trend besar yang semakin menguat dalam dunia pariwisata dalam skala yang paling luas. Pertama, berdasarkan pendataan WTO, setidaknya 40 % penggerak motivasi perjalanan wisatawan dunia adalah karena faktor budaya (Nuryanti, 2006). Kedua adalah adanya kecenderungan (trend) pariwisata dari jenis wisata massal (mass tourism) ke arah pariwisata yang lebih mengutamakan kualitas (quality tourism) termasuk di dalamnya adalah pariwisata budaya (Fletcher, 1997). Lebih jauh, pariwisata budaya diprediksikan akan menjadi bentuk wisata yang banyak diminati dengan warisan budaya (heritage site) sebagai daya tarik utamanya (Prentice, 1994).

Kembali pada kenyataan pariwisata dalam

negeri, kebijakan pengembangannya memberi kesan bahwa kecenderungan pariwisata dunia di atas tidak dianggap sebagai peluang (*opportunity*) padahal kecenderungan tersebut lebih memungkinkan pariwisata nasional berkembang mengingat potensi budaya yang kita miliki sangat beragam dan spesifik. Di sisi lain, kenyataan alamiah kita pada garis khatulistiwa semakin sulit dijadikan andalan atraksi wisata utama karena Indonesia bukan satu-satunya negara tropis. Mungkin yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana merancang sebuah paket terpadu dengan sumber daya budaya atau biasa juga disebut *heritage site* sebagai atraksi utama. Yang menjadi masalah kemudian seperti kita ketahui bersama adalah merancang objek wisata terpadu lengkap dengan fasilitas penunjangnya tidak semudah apa yang dibayangkan. Khusus dalam bidang wisata *heritage site* saja, kita masih banyak menemui kendala misalnya koordinasi antar lembaga yang terkait belum sinergis (Nur, 2001), objek-objek budaya yang unggul belum teridentifikasi dengan baik signifikansinya, penurunan kualitas sumberdaya budaya belum seimbang dengan upaya pelestariannya, adanya brand image bahwa pariwisata mengancam kelestarian objek dan yang paling terasa adalah paradigma pemerintah sentris masih sangat kuat, belum lagi bila cakupannya lebih luas pada kawasan wisata terpadu, tentunya kendala yang dihadapi jauh lebih banyak terutama masalah sumber daya manusia, manajemen, fasilitas, sarana dan

prasarana.

Walaupun demikian, kendala yang terpampang di atas jangan lantas membuat kita berhenti memikirkan bagaimana pemberdayaan wisata terpadu dengan *heritage site* sebagai destinasi utama. Dalam konteks Sulawesi Selatan, salah satu kawasan yang paling memungkinkan untuk itu, adalah kawasan karst Leang-leang – Bantimurung. Karena itu, dalam artikel pendek ini, cukup rasanya menuangkan gagasan tentang keunggulan kawasan karst Leang-leang – Bantimurung, sebuah kawasan dengan potensi budaya dan alam yang terpadu meskipun detail assesment masing –masing objeknya belum dipaparkan.

B. Keunggulan Wisata Heritage Site

Wisata *heritage site* adalah berkunjung ke suatu objek dengan sumber daya budaya sebagai atraksinya. Jenis wisata ini sebenarnya sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Herodotus (484-424 SM) misalnya banyak melukiskan kisah perjalanannya ke situs-situs arkeologi di Laut Tengah dan Mesir. Orang-orang berduit zaman Renaisans (sekitar abad XIV-XVI M) suka berkunjung ke situs-situs arkeologi. Bahkan, tidak jarang para peneliti sejarah dan arkeologi memakai catatan perjalanan para pelancong untuk sumber data mereka (Tanudirjo, 2001).

Pada masa sekarang, ledakan pariwisata jenis ini sangat besar yang dimungkinkan oleh fasilitas penunjang yang dapat dikatakan lengkap. Perbedaan signifikan antara pariwisata dahulu dengan sekarang meskipun kita sulit membatasinya secara temporal adalah pariwisata dahulu bukan merupakan sebuah industri, sekarang disebut industri pariwisata. Lengkap dengan indikatornya, pariwisata sekarang dianggap sebagai industri karena di dalamnya terdapat konsumen (*consumer*), permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) (Soekadijo, 1996). Fagan (1997) bahkan menyatakan bahwa hingga sekarang, wisata jenis ini merupakan sebuah lahan bisnis besar. Lebih jauh Tanudirjo menambahkan bahwa fenomena itu tidak berdiri sendiri. Ia harus dilihat sebagai "puncak gunung es" yang muncul ke permukaan karena proses perubahan dalam tubuh gunung yang sebagian terbesar justru tenggelam di bawah air. Dalam perspektif yang lebih luas, hal tersebut tidak dapat lagi dipandang sebagai fenomena ekonomi semata tetapi lebih dari itu merupakan fenomena sosial budaya (Apostolosopoulos, 1996; Tanudirjo, 2001). Dan fenomena perubahan pariwisata tersebut terkait erat dengan apa yang disebut, globalisasi. Karena referensi tentang globalisasi telah banyak diulas baik berupa referensi ilmiah maupun referensi populer, saya lebih tertarik untuk meringkas pembicaraan langsung pada beberapa keunggulan wisata *heritage site* kemudian membandingkan dengan

wisata massal dalam hubungannya dengan penciptaan kesejahteraan pada masyarakat.

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh peninggalan budaya dalam pariwisata dapat disebutkan misalnya berasosiasi dengan wisatawan yang tinggal lebih lama (*longer length of stay*), lebih mampu mendatangkan wisatawan yang kaya (*higher discretionary income levels*), lebih mampu mendatangkan wisatawan yang derajat pendidikannya lebih tinggi (*higher educational levels*) (Sanders, 2006), lebih mampu memberikan keuntungan yang merata sepanjang tahun karena frekuensi kedatangan wisatawan pada objek relatif sama sepanjang waktu, memberikan peluang permintaan yang lebih tinggi untuk produk-produk lokal, memiliki citra yang berbeda yang juga berpengaruh pada karakter produk di sekitarnya sehingga tidak ditemukan di tempat lain (*making it memorable to market*) (Nuryanti, 2006), khusus untuk wisatawan dalam negeri, dapat dijadikan semacam media edukasi bagi penguatan pada pengalaman sejarah, ideologi dan jati diri bangsa. Sekaligus, ini dapat menjadi media alternatif untuk menunjang sistem pengajaran pendidikan formal mengingat tradisi membaca referensi sejarah pada masyarakat kita sangat rendah (Nur, 2001).

Dalam kaitannya dengan masyarakat, beberapa keunggulan di atas dapat dihubungkan dengan

penciptaan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pun, masyarakat setempat harus mendapatkan perhatian karena masyarakat tersebut akan berhubungan langsung dengan wisatawan. Dalam perspektif ini, sustainability suatu objek wisata seharusnya memberikan peran dan manfaat kepada masyarakat. WTO bahkan menegaskan bahwa :

Sustainable tourism development has to provide for intergenerational equity. Equitable distribution of costs and benefits of tourism development must take place among present and future generation. To be fair to future generations of the tourists and travel industry, society should strive to leave a resource base no less than on we have inherited. Sustainable tourism must therefore avoid resource allocations that are irreversible (WTO, 1977, pp.34; Parikesit, 2001).

Tentang jenis peran dan partisipasi masyarakat tergantung pada kerangka teknis nantinya. Berikut adalah tabel perbandingan dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat antara wisata massal dan wisata budaya.

Wisata Massal	Wisata Budaya
▪ Volume kunjungan tinggi ▪ Pembelanjaan rata-rata rendah ▪ Memerlukan barang-barang dengan kandungan import tinggi ▪ Harga kompetitif ▪ Elastisitas terhadap harga tinggi ▪ Ditentukan oleh pengaruh harga secara global ▪ Kepemilikan dan kontrol dari masyarakat rendah.	▪ Volume kunjungan rendah ▪ Pembelanjaan tinggi ▪ Memerlukan barang-barang dengan kandungan import rendah ▪ Harga tidak begitu kompetitif ▪ Tidak elastis terhadap harga ▪ Cenderung memiliki monopolistik power ▪ Kepemilikan dari masyarakat lokal tinggi

(Nuryanti, 2006).

Perbandingan di atas penting dicermati karena adanya pergeseran dari pariwisata massal ke pariwisata *heritage site*. Kalau pada pariwisata massal sifatnya terstandar dan terorganisasi, pada pariwisata *heritage site* lebih berpusat pada fleksibilitas, segmentasi dan integrasi diagonal yang disebut *new global division of tourism*. Hal ini juga didorong oleh adanya berbagai kesadaran baru mengenai isu-isu lingkungan dan

Tahun 1986 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan juga dinyatakan bahwa Benda Cagar Budaya ditetapkan sebagai komponen lingkungan hidup yang apabila terancam karena dampak suatu pembangunan haruslah dibuatkan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Perangkat lunak lainnya berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya arkeologi sebagai objek wisata budaya, adalah suatu pendekatan lingkungan yang mewakili kepentingan sumber daya arkeologi, kepariwisataan dan kelestarian alam sebagai mintakat pengembangan. Untuk itu penerapan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 Tentang Pariwisata dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 Tentang Pelestarian Alam, dapat dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya supaya pemeliharaan dan pelestarian Sumber daya arkeologi sebagai objek wisata dapat diwujudkan (Nurhadi, 2001).

Dengan memberdayakan perangkat lunak di atas sebagai acuan, ketakutan berlebihan akan rusaknya lingkungan dan situs arkeologi tidak perlu ada. Metode Pemanfaatan sumber daya alam secara terpadu memang alternatif yang paling memungkinkan. Bila demikian, kerja sama secara terpadu dan sinergis juga dibutuhkan dari lembaga yang terkait seperti Departemen Energi/Sumber Daya Mineral, Departemen

Pertanian/Kehutanan, Departemen Kebudayaan/Pariwisata, Menteri Lingkungan Hidup, dan stekholder lainnya.

Untuk acuan operasional agar perangkat perundangan di atas dapat diakomodasi, diperlukan suatu pendekatan (approach). Sebenarnya ada beberapa jenis pendekatan dalam pengelolaan sumber daya terpadu untuk tujuan pariwisata. Salah satu yang dapat diterapkan adalah pendekatan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development approach*) yang berpegangan pada :

1. Prinsip pembangunan yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi jangka panjang
2. Penekanan pada nilai manfaat bagi masyarakat lokal
3. Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang lestari
4. Kesesuaian antara kegiatan pengembangan dengan skala, kondisi dan karakter daerah
5. Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan pengembangan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal
6. Antisipasi yang tepat dan monitoring terhadap proses perubahan (Nuryanti, 2006).

D. Seputar Isu karst

Pegunungan karst adalah pegunungan yang terdiri dari batu gamping, memperlihatkan bentang alam yang khas, unik akibat adanya proses pelarutan batuan oleh air. Proses terjadinya pegunungan karst sejak jutaan bahkan puluhan juta tahun lalu, dan selama itu terjadi permukaan aliran sungai yang tidak terlihat, sumur vertikal, mata air, sistem pengairan bawah tanah yang kompleks dan gua. Seiring proses genesanya, kawasan karst ditumbuhi oleh vegetasi yang unik dan fauna yang beragam bahkan beberapa spesies endemik. Pada puluhan ribu tahun lalu, kawasan karst Sulawesi Selatan bahkan telah dijadikan *perkampungan* oleh manusia pada masa plestosen akhir sampai masa holosen.

Dalam kondisi sekarang, secara artificial, kawasan karst kemudian dimaknai oleh manusia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam karst adalah :

1. Nilai ekonomi (*economic value*) karena kandungannya dapat digunakan sebagai pertanian, hutan, pertambangan dan pariwisata
2. Nilai ilmu pengetahuan (*scientific value*) karena memungkinkan untuk dipelajari untuk perkembangan ilmu pengetahuan
3. *Human value* karena merupakan bagian

kehidupan religi, piritual, rekreasional dan edukasional

4. *Biological value* karena dapat dimanfaatkan untuk produktifitas hutan, pertanian, keragaman hayati, budi daya ikan air tawar dan lain-lain
5. *Hidrological value* karena dapat dijadikan sebagai sumber air
6. *Minerological value* karena kandungan mineral di dalamnya.

Siring dengan eksploitasi kawasan karst sejak dulu sampai sekarang, akhirnya berkembang isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kaya nilai-nilai yang terkait erat dengan kehidupan manusia misalnya nilai ekonomi, sosial, budaya dan sains
2. Potensinya belum termanfaatkan secara optimal
3. Pola-pola pemanfaatan yang cenderung negatif dan merusak seperti penggundulan hutan karst, peternakan besar, pemompaan air secara berlebihan, merusak gua-gua karst dan lain-lain
4. Penambangan industri yang tidak terkontrol
5. Identik dengan daerah kering dan miskin

6. Menjadi media de-industrialisasi (yang positif)

7. Non-renewable resources (Nuryanti, 2006).

E. Mengapa Kawasan Karst Maros?

Mengapa Kawasan Karst Maros? Pertanyaan ini wajar muncul di pikiran kita karena kawasan karst Sulawesi Selatan memang sangat luas dan hampir merata memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan pariwisata. Ada beberapa alasan yang dapat saya kemukakan sebagai berikut. Pertama, karena di kawasan tersebut terdapat Bantimurung lebih populer baik dalam lingkup Sul-Sel maupun luar Sul-Sel. Kedua, karena baik Taman Prasejarah Leang-leang maupun air terjun Bantimurung telah dipasarkan sebagai objek wisata andalan di Sul-Sel. Foto dan referensi tentang kedua objek ini tidak sulit dijumpai dalam leaflet pariwisata dan internet. Ketiga, karena bervariasinya objek yang terdapat dalam kawasan ini yaitu gua-gua prasejarah, air terjun, tradisi pertanian tradisional dan penangkaran kupu-kupu. Keempat, dari segi aksesibilitas. Dari semua wilayah karst yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata, kawasan ini mudah dijangkau. Kelima, Masyarakat setempat sudah terbiasa berinteraksi dengan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun manca negara. Keenam, Taman Prasejarah Leang-leang dan Air terjun Bantimurung sekarang telah memiliki sistem pengelolaan walaupun masih terpisah.

Ketujuh, dari segi arkeologis, analisis arkeometri telah diterapkan di situs gua-gua Maros. Hasilnya, Leang Burung 2 misalnya dianggap sebagai lapisan yang mewakili penghunian sejak masa plestosen awal sampai masa holosen (19.000 dan 31.000 tahun lalu) (Glover, 1984). Stratigrafi budaya ini juga sekaligus menjadikan situs Leang Burung 2 dianggap mewakili situs peninggalan orang Toala dan pendatang Austronesia yang membawa budaya tembikar dan pertanian.

Pertanyaan lanjutan kemudian adalah apakah keunggulan-keunggulan di atas yang tidak lagi monolit (satu objek) sudah memenuhi syarat untuk dipasarkan sebagai objek wisata. Untuk menjawabnya, kita perlu merujuk pada karakter yang harus dimiliki oleh suatu objek wisata yaitu pertama, harus unik (unique) atau sangat spesial, kedua harus asli (authentic). Saya pikir, bila kita hanya memiliki gua dengan potensi arkeologisnya saja seperti banyak gua di kawasan tersebut, itu tidaklah *sangat unik* karena tradisi alat batu, lukisan dinding gua, sisa-sisa makanan dan fragmen tembikar yang lebih bervariasi dan menarik telah dipasarkan sebagai objek wisata di luar negeri. Peninggalan kebudayaan mesolitik seperti peninggalan budaya Toala kita ketahui bersama cukup banyak tersebar, baik di Asia maupun Eropa dan Australia.

Sedangkan untuk aspek autentisitas gua-gua prasejarah, kita tidak perlu meragukannya lagi.

Meskipun demikian, kita masih harus bertanya, apakah autentisitas saja cukup? Dengan pertimbangan inilah plot kawasan karst Maros saya anggap sangat tepat karena ada potensi lain yang sangat unik yaitu 72 suku kupu-kupu di Cagar Alam Karaengta. Begitu menariknya kupu-kupu daerah ini sehingga di pertengahan tahun 1990-an diadakan seminar internasional tentang kupu-kupu di Makassar dan Bantimurung adalah lokasi ekskursi peserta seminar. Hal lain yang sangat unik seperti akan lebih dijelaskan kemudian adalah udang Atyidae kecil berwarna putih dengan mata yang sangat tereduksi (tak bermata), yang pertama kali ditemukan di Leang Sulukang Kallang. Jenis udang ini bukan hanya merupakan jenis baru, tetapi juga Atyidae troglobita pertama yang dikenal dari Indonesia (Whitten dkk, 1987).

Jadi, gua-gua prasejarah Maros dapat dikatakan mewakili atraksi wisata yang autentik sedangkan keunikan dimiliki oleh kupu-kupu dan udang tak bermata. Atraksi wisata yang unik dan autentik tersebut akan ditunjang oleh potensi agro wisata dan air terjun Bantimurung serta menara-menara karst yang menjulang.

F. Profil Kawasan Karst Maros

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang profil Kawasan Karst Maros, berikut akan

diuraikan deskripsi lokasi, kandungan situs arkeologi, aspek sosial budaya masyarakat setempat serta beberapa potensi geo-ekologi secara garis besar. Kawasan Karst Maros berada dalam administratif Kabupaten Maros dengan jarak 12 km dari ibukota kabupaten. Kabupaten Maros sendiri berjarak 30 km ke arah utara dengan kondisi jalan baik. Bahkan jarak air terjun Bantimurung ke Bandara Hasanuddin hanya berjarak sekitar 23 km.

Seperti biasa, karakter masyarakat yang bilingual selalu berada di perbatasan dua bahasa, demikian pula pada masyarakat sekitar kawasan mereka menggunakan dua bahasa yaitu Bugis dan Makassar. Mayoritas masyarakat beragama Islam sedang sistem budayanya seperti pada umumnya orang Bugis Makassar. Sistem stratifikasi sosial tetap berlaku tetapi memperlihatkan kecenderungan semakin menipis. Untuk lingkup Kabupaten maros, sistem mata pencaharian masyarakat beragam, sebagian besar adalah petani, nelayan dan pekerja tambak. Sebagian yang lainnya adalah pekerja tambang, pengusaha, pedagang, peternak, pegawai negeri dan lain-lain. Khusus untuk kawasan Leang-leang - Bantimurung sebagai contoh, masyarakatnya sudah terbiasa berinteraksi dengan wisatawan. Bahkan terdapat beberapa keluarga sekitar objek yang menggantungkan hidupnya pada penjualan minuman dan makanan ringan.

Sementara sebagian besar lainnya mengembangkan sistem pertanian.

Pertanian sawah dijadikan sistem mata pencarian utama masyarakat sekitar Leang-leang- Bantimurung karena topografi lokasi yang memungkinkan yaitu berupa dataran rendah yang dikelilingi karst. Sebagaimana kita tahu bersama, karst memiliki sifat menyimpan dan menyalurkan air secara konstan sehingga kondisi ini sangat baik untuk mengembangkan pertanian. Tanah di lokasi ini terdiri dari bahan induk endapan liat marin dan tanah alluvial belahan. Jenis tanah litosol mediteran coklat kemerahan dan possilit merah kekuningan terdapat pada daerah yang bergelombang.

Pada lereng-lereng bukit kapur tumbuh beberapa jenis tumbuhan yang perawakannya lebih redah dan kecil dibandingkan dengan vegetasi lembah yang kondisinya lebih subur, di samping itu jenisnya lebih terbatas. Rendahnya keanekaragaman dan perawakannya yang lebih kecil diduga berkaitan dengan tingginya kadar kalsium dan magnesium dalam tanah. Jenis tumbuhan yang mendominasi daerah ini adalah jenis perdu dari suku Eupatorium dan Lantana camara, jenis pohon yang umum ditemui adalah dari suku Homalanthus, Lagerstroemia, Pterospermum, Kneinhovia dan Illebrunea. Di daerah lembah, jenis tumbuhan selain tanaman perkebunan dan pertanian

seperti padi, sayuran dan kacang pada umumnya dijumpai jenis-jenis *Sida* spp., *Hypsis* spp., *Stachitarphe* *jamaicensis*, *Ageratum conyzoides*, *Macaranga tanarius*, *Trema orientalis*, *Mollatus* spp., dan *Cressentia cujute* (Whitten dkk, 1987).

Untuk jenis fauna, pada umumnya wilayah Maros mempunyai fauna yang beragam dan sebagian sangat khas. Jenis fauna yang menghuni wilayah ini antara lain beberapa jenis kera, kupu-kupu, tarsius, kuskus, musang Sulawesi, babi hutan, rusa, biawak, kelelawar, burung elang hitam, burung elang besar, burung raja udang, srigunting, burung wallet, burung hantu, burung pipit, burung tekukur, capili, burung kakatua putih, kakatua hijau, ayam hutan, ular sanca, ular hitam, ikan, dan udang tak bermata dalam gua serta hewan invertebrata lainnya. Berdasarkan koleksi herbarium Bogoriense terhadap spesimen yang dikumpulkan oleh Puslitbang hutan di Cagar Alam Karaenta, terdapat 72 suku jenis kupu-kupu yang memanfaatkan 14 jenis tumbuhan untuk makanan larva maupun untuk menghisap nektar. Sementara fauna yang paling khas untuk daerah ini adalah udang Atyidae kecil berwarna putih dengan mata yang sangat tereduksi (tak bermata), yang pertama kali ditemukan di leang Sulukang Kallang. Jenis udang ini bukan hanya merupakan jenis baru, tetapi juga Atyidae troglobita pertama yang dikenal dari Indonesia (Whitten dkk, 1987).

Peninggalan arkeologis pada kawasan ini, salah satunya adalah gua-gua prasejarah yang lebih populer dengan nama *Taman Purbakala Leang-leang*. Berdasarkan pendataan Muhammad Said terdapat 54 buah gua prasejarah di Kabupaten Maros (Said, 2000). Jumlah ini masih akan terus bertambah bila data baru dan beberapa data lama yang belum sempat dihitung dimasukkan. Secara garis besar, tinggalan yang terkandung dalam leang-leang (gua-gua) tersebut meliputi alat serpih bilah, lukisan dinding gua, tembikar, manik-manik, sisa makanan berupa tulang binatang vertebrata dan cangkang moluska. Yang spesifik dari alat serpih bilah adalah *Maros Point*, mata panah bergerigi, bilah dan lancipan tulang. Dari Maros Point lah sehingga oleh prasejarawan, budaya mesolitik Sulawesi Selatan disebut sebagai kompleks alat serpih spesifik (Nur, 2000). Sedangkan lukisan dinding gua, beberapa yang dapat diidentifikasi adalah cap telapak tangan yang dicetak negatif, babi rusa dalam posisi melompat dan pada bagian dada melengket mata panah ?, sketsa manusia, coretan geometris dan sketsa manusia yang menunggang binatang.

Sisa-sisa makanan yang berserakan di depan gua bahkan banyak yang masih tersementet, melengket di dinding gua juga merupakan data cukup menarik. Dengan data sisa makanan, dapat digambarkan bagaimana strategi perolehan makanan dan kandungan

gizi makanan yang dikonsumsi. Data yang sifatnya non artificial yang dapat menjadi daya tarik wisata adalah kondisi interior gua berupa stalaktit, stalakmit, pilar, flow stone, kolam dalam gua dan sungai bawah tanah.

Dalam banyak referensi prasejarah, kawasan gua-gua Maros dan Pangkep lebih populer dengan istilah peninggalan Budaya Toala. Istilah Toala pertama kali dipopulerkan oleh Sarasin bersaudara dalam bukunya yang berjudul *Reisen in Celebes* tahun 1905. Publikasi inilah yang dianggap sebagai pelopor penelitian prasejarah khususnya kebudayaan Toala di Sulawesi Selatan.

G. Akhir Kata

Artikel pendek ini bersifat masukan kepada lembaga yang terkait dalam pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Selatan. Untuk melengkapi gagasan di atas, bila perencanaan dan pengembangan Kawasan Karst Maros dilakukan secara profesional di masa mendatang, mungkin perlu dirancang dua museum lapangan. Museum lapangan pertama adalah museum Toala dan kedua adalah museum kupu-kupu. Museum Toala dirancang untuk menyajikan informasi tentang budaya prasejarah Toala secara keseluruhan. Peta, gambar, foto, film, artefak dan perpustakaan dapat menambah daya tarik kompleks ini. Sedangkan museum kupu-kupu, mungkin dibutuhkan waktu yang panjang

untuk mendesainnya karena terlebih dahulu ada rehabilitasi habitat. Meskipun biaya yang dibutuhkan untuk membangunnya cukup besar, tetapi museum kupu-kupu Bantimurung lah yang akan memberikan brand image kawasan karst tersebut.

**. Penulis Adalah Dosen Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin*

Fagan, Brian M. 1997. In the Beginning, an Introduction to Archaeology. Ninth Edition. New York. Longman.

Fletcher, John. 1997. "Heritage Tourism : Enhancing The Benefits of Tourism and Heritage Management" dalam Wiendu Nuryanty (ed), *Tourism and Heritage Management*, Jogjakarta, Gadjah Mada University Press.

Glover, I. C. 1984. Leang Burung 2 : An Upper Palaeolithic Rock Shelter in South Sulawesi, Indonesia. Dalam Pieter van De Velde (ed). Nederland, Foris Publications Holland.

Haryono, Timbul. 1999. Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi: Azas Keseimbangan Dalam Kepentingan. Makalah dalam Diskusi Ilmiah Arkeologi XI. Ujung Pandang. IAAI. (Belum Terbit).

Nur, Muhammad, 2000. Tipe Budaya Mesolitik di Sulawesi Selatan. Dalam Walennae No.4. Makassar. Balai Arkeologi Makassar.

Nur, Muhammad, 2001. Museum Situs, Potret Zaman Yang Belum Terberdayakan, dalam Irfan Mahmud (ed), *Memediasi Masa Lalu, Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*, Makassar, Lephass.

Nurhadi, 2001. Penelitian Arkeologi Sebagai Objek Tujuan Wisata, Mungkinkah? dalam Irfan Mahmud (ed), *Memediasi Masa Lalu, Spektrum Arkeologi dan*

Pariwisata, Makassar, Lephass.

- Nuryanti, Wiendu, PhD., 2006. Pemanfaatan Sumber Daya Budaya Melalui Pariwisata. Materi Kuliah Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata UGM. Jogjakarta. Tidak Terbit.
- Nuryanti, Wiendu, PhD., 2006. Pemanfaatan Karst Melalui Pariwisata. Materi Kuliah Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata UGM. Jogjakarta. Tidak Terbit.
- Parikesit, Danang, 2001. Peran Pusat Penelitian Dalam Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Daerah, dalam Irfan Mahmud (ed), *Memediasi Masa lalu, Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*, Makassar, Lephass.
- Prentice, R. 1994. Heritage : "A Key Sector of New Tourism" dalam C.P. Cooper Lockwood (ed), *Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Managemen*, Vol 3 : Toronto. Willey.
- Pribadi, Wijono. 1999. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Pergeseran Dari Paradigma Lama Menuju Paradigma baru. *Makalah Diskusi Ilmiah Arkeologi XI*. Ujung Pandang. IAAI. (Belum Terbit).
- Said, Andi Muhammad, 2000. Pemintakatan Arkeologi : Suatu Upaya Pelestarian Kawasan Gua Prasejarah Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta. (Tidak Terbit).

- Sanders, David. 2006. *Marketing Heritage site to Foreign Tourist* (Wisman). Materi Kuliah *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata UGM*. Jogjakarta. Tidak Terbit.
- Sarasin, Paul and Fritz Sarasin, 1905. *Reisen in Celebes*. Wiesbaden. Nederland.
- Soekadijo, 1996. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Tanudirjo, Daud Aris 2001. *Wisata Arkeologi, Antara Ilmu dan Hiburan*, dalam Irfan Mahmud (ed), *Memediasi Masa lalu, Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*, Makassar, Lephass.
- Whitten, Anthony J. dkk, 1987. *Ekologi Sulawesi*. Jogjakarta. Gadjah Mada University Press.

Pelestarian Bangunan Kuno di Makassar

Oleh : Yadi Mulyadi*

*B*agi para penikmat budaya, peneliti, maupun arkeolog yang tertarik untuk mengatasi sebuah tantangan, maka Makassar merupakan kota yang tepat. Karena di Makassar, sebagai sebuah kota yang telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang menyimpan banyak tinggalan arkeologi yang terpendam sehingga tidak mampu untuk berkisah tentang dirinya. Dan itu adalah sebuah tantangan besar yaitu menjadikan tinggalan arkeologi yang sebelumnya terpendam untuk dapat disingkap, yang tadinya diam kemudian dapat berkisah tentang dirinya.

Salah satunya adalah tinggalan arkeologi yang berupa bangunan-bangunan kuno yang tersebar cukup banyak di seantero sudut kota Makassar, tapi sayangnya masih membisu. Berdasarkan data dari hasil penelitian tentang bangunan kuno di Makassar baik yang dilakukan oleh mahasiswa arkeologi Unhas maupun oleh instansi arkeologi lainnya yaitu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar dan Balai Arkeologi, tercatat beberapa bangunan kuno di Makassar, seperti Gedung Society de Harmony, Balai Kota, Museum Kota, Fort Rotterdam, Bangunan Cina di Pecinan dan masih banyak yang lainnya. Bangunan-bangunan kuno itu tentu saja termasuk benda cagar budaya warisan budaya bangsa, apalagi jika bangunan kuno tersebut memenuhi kriteria seperti di bawah ini :

1. Memiliki nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya),
2. Masterpiece regional.
3. Memiliki nilai atau kekhususan atau istimewa tingkat regional.
4. Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, pemukiman tradisional, teknologi, lansekap atau gabungannya, merupakan kawasan klaster, budaya serupa, border (serumpun etnis),
5. Kebudayaan berkesinambungan dalam rentang masa tertentu (series),
6. Merupakan gabungan antara cultural dan natural,
7. Merupakan suatu peristiwa penting,
8. Memiliki ciri khusus budaya masyarakat

(Papageorgeou : 1971)

Maka bangunan kuno itu tentu saja termasuk warisan budaya yang perlu dijaga kelestariannya. Tulisan ini mencoba untuk memaparkan konsep pelestarian bangunan kuno di Makassar yang mengarah pada perencanaan kota Makassar.

Keberadaan bangunan kuno di Makassar dewasa ini sangat rawan untuk berubah bahkan hilang. Hal ini dipicu oleh akselerasi perkembangan kota yang cepat, sehingga sering menyebabkan pertimbangan pragmatis menjadi

lebih menonjol daripada pertimbangan yang idealis. Salah satu contohnya adalah dirubuhkannya bangunan kuno bekas Gedung Bank Belanda di jalan Nusantara karena adanya perkembangan pelabuhan Sukarno Hatta, hal lainnya pembangunan tower di Gedung Balaikota yang tentu saja sangat disayangkan pembangunannya karena tidak sesuai dengan kaidah pelestarian yang semestinya.

Di Makassar ada ada lebih seratus bangunan kuno yang layak masuk kategori cagar budaya. Namun baru sedikit yang telah ditetapkan. Ada dua hal utama yang dapat dilakukan sebagai persiapan pranata dalam pelestarian benda cagar budaya . Pertama, Kepala Daerah harus dapat memberi keputusan secara hukum. Yakni tentang keberadaan lingkungan atau benda cagar budaya. Yang kedua, Kepala Daerah sebagai pucuk pimpinan pemerintahan daerah cagar budaya, harus segera memperbaiki pranata. Yakni proses dalam pembangunan untuk bangunan cagar budaya. Harus ada aturan secara sendiri-sendiri, atau pertahapan. Baik itu bangunan umum maupun bangunan cagar budaya yang diadakan dalam bentuk perjanjian, yang harus dilestarikan adalah situs dan bangunan. Hal itu ditentukan berdasarkan nilai sejarah, nilai-nilai kepahlawanan, ketertataan umur lingkungan, keaslian dan kelangkaan, serta *landmark*.

Selain kedua hal tersebut, tidak boleh kita lupakan peraturan dan undang-undang tentang Benda Cagar Budaya yang sudah ada. Upaya pelestarian yang

dilakukan tetaplah harus mengacu pada peraturan perundangan, mengingat bahwa Benda Cagar Budaya bersifat tidak dapat diperbaharui, langka dan tidak dapat diganti, maka harus tetap memegang prinsip-prinsip pelestarian sebagaimana yang diatur dalam :

1. UU RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

- Pasal 15 ayat (2) poin d : Tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang mengubah bentukdan/atau warna serta memugar benda cagar budaya.
- Pasal 15 ayat (2) poin e : memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya.
- Pasal 19 ayat (2) : pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan dengan cara atau apabila :
 - a. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).
 - b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1993

tentang Pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

- Pasal 36 ayat (3) : Pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian benda cagar budaya.

2. UU RI Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata.

- Pasal 6 : pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
 - b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
 - d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Dari kedua produk hukum yang mengatur tentang benda cagar budaya itu sendiri, yakni UU RI No. 5 tahun 1992 dan PP RI No. 10 tahun 1993, secara jelas termaktub

bahwa benda cagar budaya dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata. Merujuk pada produk hukum tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasalanya, maka pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek wisata adalah sah secara hukum. Pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek wisata sebagaimana yang diatur dari kedua produk hukum tersebut, harus tetap menjaga kelestarian dari benda cagar budaya itu sendiri. Dalam UU RI No. 5 tentang Kepariwisata, juga diatur secara jelas bahwa pembangunan kepariwisataan harus tetap menjaga kelestarian budaya.

Pemaparan di atas semakin mempertegas bahwa pelestarian itu sangatlah penting, bahkan kaitannya dengan pemanfaatan benda cagar budaya, upaya pelestarian tetap harus dikedepankan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang nantinya akan kita sesali. Namun fenomena yang terjadi sekarang, upaya pelestarian benda cagar budaya khususnya bangunan kuno di Makassar belumlah berjalan maksimal. Upaya pelestarian yang dilakukan masih cenderung berada dalam koridor konservasi saja. Padahal Sudah saatnya Makasar perlu untuk lebih menonjolkan benda-benda cagar budayanya. Termasuk bangunan, gedung, lingkungan, dan lainnya, yang punya nilai sejarah perjuangan. Visi dan misi pelestarian harus bisa melindungi warisan, menjamin keanekaragaman, dan ekonomis. Melestarikan benda cagar budaya itu perlu motivasi. Dan motivasi adalah partisipasi kolektif.

Perwujudan dari tanggung jawab bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat berupa pemberian ruang gerak yang kondusif bagi kemanfaatan sosial dan ekonomi publik atau masyarakat.

Penyertaan peran masyarakat dalam upaya pelestarian bangunan kuno harus segera dilakukan, pelestarian bukan lagi hak mutlak kalangan terbatas saja. Langkah penyertaan masyarakat dalam upaya pelestarian sudah pernah diterapkan oleh UNESCO dan hal tersebut merupakan hal positif yang dapat kita adopsi untuk diterapkan di Makassar. Bila dibandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan diberbagai Negara maka ada satu hal yang mencolok yaitu betapa besarnya kesertaan masyarakat lokal di dalam melaksanakan proyek pemugaran, baik sebagai organisasi maupun kesertaan perorangan berdasarkan manfaat yang diharapkan. Mereka cukup jelas disertakan di dalam menentukan, menyelenggarakan dan memanfaatkan proyek-proyek pemugaran cagar budaya yang dikelola oleh kota yang bersangkutan.

Pendekatan berdasarkan *community based actions* di dalam pelaksanaan pemugaran atau pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya, memang disarankan oleh UNESCO. Bahkan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas dan disegala lapisan umur, UNESCO mengadakan kampanye mengenai cinta warisan budaya dengan program melalui sekolah-sekolah dari Taman Kanak-Kanak sampai ke

Perguruan Tinggi, dengan nama : *Heritage In Young Hands*.

Dalam kaitan ini di Indonesia, program ini pun ada namun seakan-akan hanya dengan keterlibatan Departemen Pendidikan Nasional tanpa ada kesertaan Pemerintah Daerah secara proaktif. Pihak UNESCO juga berpesan kepada para politisi/pemberi keputusan/Pemda, agar di dalam penyelenggaraan pelestarian cagar budaya hendaknya dilibatkan masyarakat terdekat dengan proyek tersebut dan jadikanlah proyek tersebut sebagai proyek bersama dengan masyarakat kalau proyek itu mau benar-benar berhasil. Jika langkah seperti ini diterapkan pula di Makassar dalam upaya pelestarian bangunan kuno di Makassar, niscaya bangunan kuno yang membisu itu akan lebih mudah mengungkapkan kisah sejarah kota Makassar kepada kita. Hal tersebut tentu saja akan berdampak positif pada terbangunnya identitas kultural dan sejarah dari kota Makassar, selain dampak ekonomis yang akan semakin meningkat dengan hadirnya para wisatawan untuk berwisata tempo dulu di kota Makassar.

Intinya adalah upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat kota Makassar akan pentingnya keberadaan bangunan-bangunan kuno dan benda cagar budaya lainnya sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan serta, pemerintah tinggal mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian. Penyertaan masyarakat dalam kegiatan pelestarian bangunan kuno di Makassar, selaras

dengan konsep pemerintahan yang di usung sekarang yaitu konsep Good Governance, dengan tiga pilar utamanya ; pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang dijabarkan dalam prinsip good governance yang salah satunya meliputi partisipasi masyarakat.

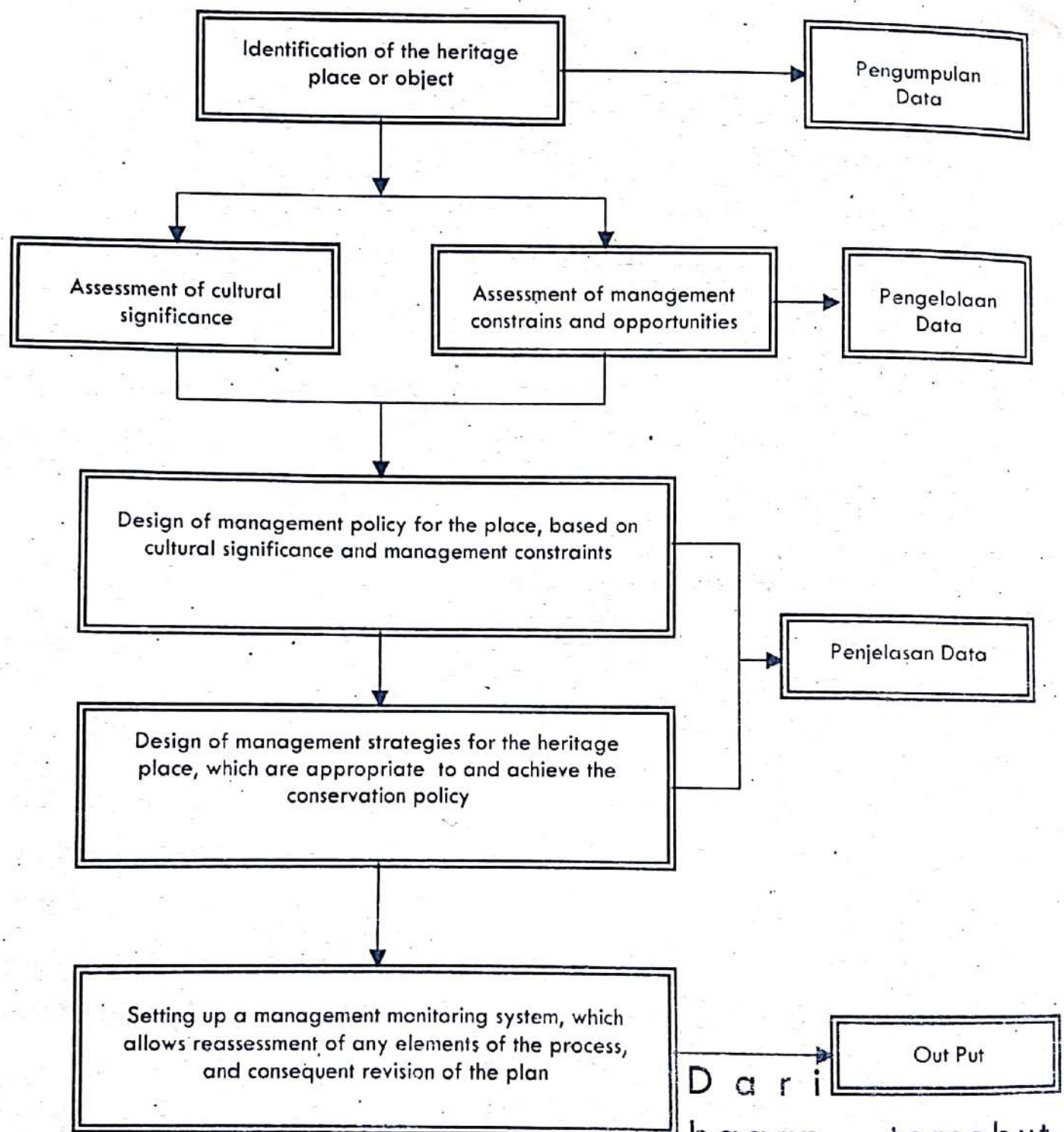
Untuk itu perlu dilakukan usaha yang bertujuan untuk memahami landasan hukum keberadaan benda cagar budaya serta kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam pelestarian benda cagar budaya termasuk bangunan kuno, maka diharapkan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek wisata tetap dalam koridor prinsip-prinsip pelestarian. Dalam kajian *Cultural Resource Management* salah satu aspek dalam pengelolaan adalah aspek legalitas. Oleh karena itu Produk hukum baik yang berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah harus selalu menjadi acuan (Perason and Sullivan, 1995).

Adapun setelah upaya pelestarian, dalam pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek wisata, tentunya akan melibatkan berbagai kepentingan dengan berbagai kepentingan pula. Pemerintah kota Makassar sebagai salah satu pihak yang berhak ikut memanfaatkan tentunya juga harus memahami kewenangan yang dimilikinya. Pemahaman terhadap kewenangan bukan hanya merujuk pada undang-undang tentang otonomi daerah, tetapi harus melihat produk perundangan yang terkait. Dalam hal ini produk perundangan yang harus

yang bertujuan :

1. Mendorong dan meningkatkan kemampuan pemerintah kota Makassar dalam rangka melindungi asset budaya dengan cara pelestarian bangunan atau kawasan budayanya.
2. Mengarahkan dan mengendalikan hasil perancangan (design) bangunan baru yang berada di dalam kawasan budaya yang dilestarikan
3. Penajaman arah pengendalian pembangunan pada kawasan khusus yang dilestarikan dengan memberikan perlindungan terhadap bangunan dan memberikan arah pembentukan jati diri kawasan.

Pembuatan model pengelolaan kawasan budaya tersebut, dapat dilakukan bersama dengan melibatkan kalangan akademisi yaitu jurusan arkeologi Unhas, maupun jurusan sejarah dan arsitektur. Selain itu melibatkan pula pemerintah kota Makassar yang diwakili oleh instansi terkait, serta dari masyarakat yang dapat diwakili oleh LSM-LSM yang bergerak dibidang kebudayaan. Adapun Metode kerja ini kemudian dikonversi dengan tahapan perencanaan dalam *Cultural Resource Management* (lihat bagan).



Dari bagan tersebut terlihat bahwa ada beberapa tindakan yang dilakukan meliputi :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni pengumpulan data melalui studi literatur dan pengumpulan data dengan mengadakan

kunjungan langsung ke obyek (observasi lapangan). Mengenai jenis data yang harus dikumpulkan, ada dua pendapat yang berkembang dalam arkeologi. Pandangan pertama yang dikemukakan oleh aliran tradisional arkeologi yang menggunakan metode penalaran induktif. Mereka berpandangan bahwa data arkeologi ibaratnya sebuah jigsaw puzzle yang setiap bagian – bagiannya merupakan bagian dari yang lain sehingga semua data arkeologis tersebut harus direkam (Hempel 1966, Hill 1970, King 1971 dalam Schaafsma, 1989; 40). Pandangan kedua dari aliran prosessual archaeology dengan menggunakan metode deduktif. Menurut pandangan ini yang metode penalarannya hipotethic – deductive (metode hempel) data yang dikumpulkan adalah hanya data yang mempunyai hubungan hipotesis awal dari sebuah penelitian (Schaafsma, 1989; 41 – 42).

Sehubungan dengan studi pelestarian dalam kerangka pengelolaan sumberdaya budaya, maka dari dua pandangan tersebut yang tepat untuk digunakan adalah pandangan pertama bahwa semua data tentang potensi obyek dari berbagai segi akan dikumpulkan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Lipe (1970)

bahwa usaha pelestarian tidak fokus pada satu masalah dan mengabaikan masalah yang lainnya (Lipe 1970 dalam Schaafsma, 1989; 43. lihat juga Pearson dan Sullivan 1995).

a. Studi Literatur.

Jenis data yang dikumpulkan dalam studi literatur adalah semua laporan atau hasil penelitian maupun arsip yang berkaitan dengan keberadaan bangunan kuno di kota Makassar.

b. Pengumpulan Data Lapangan.

Pengumpulan data lapangan mencakup dua jenis kegiatan yakni plotting area, perekaman data dan wawancara. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang pandangan dan keinginan masyarakat sekitar obyek serta tingkat apresiasi pihak – pihak yang berkepentingan terhadap bangunan kuno.

b. Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan baik melalui studi literatur maupun melalui pengamatan langsung dilapangan kemudian diklasifikasi menjadi dua

kelas. Pertama yakni data yang akan digunakan untuk melakukan penilaian makna kultural sumberdaya arkeologis. Kedua data yang akan dijadikan untuk melakukan penilaian terhadap desakan, peluang dan kepentingan lain.

Pengklasifikasian untuk jenis pertama didasarkan pada enam kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian sebagaimana yang dipaparkan oleh Schiffer (1977) yakni, nilai scientific, nilai historical, nilai ethnic, nilai public, nilai legal, dan nilai monetary. Pengklasifikasian ini ditujukan untuk mengukur nilai penting dari bangunan kuno tersebut.

Pengklasifikasian kedua didasarkan pada jenis pihak – pihak yang berkepentingan yakni akademisi, BP3, Swasta (dalam hal ini para pelaku bisnis), Pemerintah, serta masyarakat disekitar situs. Pengklasifikasian ini untuk melihat seberapa besar potensi yang dimiliki objek yang memungkinkan untuk rencana pelestarian yang mengarah pada pengelolaan bangunan kuno kedepan.

c. Penjelasan Data

Hasil dari penilaian terhadap makna kultural dan penilaian terhadap desakan dan peluang kemudian menjadi acuan untuk membuat model

pengelolaan kawasan budaya bangunan kuno di Makassar. Selain itu juga untuk menentukan desain strategi pelestarian yang tepat terhadap bangunan kuno sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian.

Hasil persepsi berbagai pihak yang berkepentingan (akademisi, pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat) kemudian dielaborasi untuk melihat tingkat kepentingan masing – masing. Berbagai kepentingan ini dikoordinasikan dengan melihat skala prioritas yang harus dilaksanakan dalam kerangka perlindungan dan pelestarian.

Persoalan lain yang kiranya perlu direnungkan bersama adalah persepsi masing-masing pihak tentang konsep pelestarian berbeda. Pelestarian dalam kerangka pikir arkeologis akan berbeda jika kita melihat konsep pelestarian dalam kerangka pikir arsitektur. Untuk memecahkan persoalan ini, saatnya arkeologi juga harus berani melakukan introspeksi diri agar menyamakan persepsi tentang pelestarian. Kalau hal ini belum bisa dilakukan, mungkin lebih berat lagi menyamakan persepsi pihak diluar arkeologi yang juga berhak atas pemanfaatan benda cagar budaya. Dari persamaan persepsi yang telah terbentuk itulah yang disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga persoalan pelestarian menjadi hal yang jelas. Dengan begitu masyarakat pun akan merasakan bahwa

keterlibatan mereka sangat penting dalam usaha-usaha pelestarian benda cagar budaya.

Dalam mengembangkan upaya pelestarian bangunan kuno dari kajian arkeologi diperlukan semacam jaringan yang tugasnya memberi informasi, penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk supaya merasa memiliki bangunan kuno yang merupakan warisan budaya kota Makassar. Selain itu mengajari mereka yang sudah memahami untuk membuat jaringan seluas-seluasnya, agar pengetahuan tersebut segera dapat tersebar. Adapun organisasi yang terbentuk sebagai anak dari jaringan tersebut membantu Pemerintah, terutama dalam membuat peraturan tentang kriteria *me-listed*-kan bangunan kuno sebagai warisan budaya yang ada di Makassar serta mengusulkan bangunan kuno sebagai warisan budaya yang layak *di-listed*, serta mengusulkan kepada Pemerintah akan pentingnya mata pelajaran yang berkaitan dengan warisan budaya sejak dini dan lain sebagainya.

**Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Arkeologi Unhas dan terlibat di NGO Ujungpandang Heritage Society*

- Cleere, H. F. (ed). 1989. *Archaeological Heritage Management in the Modern Worl*. Unwin Hyman. London.
- Haryono, Timbul. 1999. "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi : Azas Keseimbangan Dalam Kepentingan". Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Ilmiah Arkeologi XI di Fort Rotterdam Ujung Pandang.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places: The Basics of Heritage Planning for Managers, landowners and Administrators*. Melbourne University Press. Melbourne.
- Papageorgeou, Alexander, 1971. *Continuity anda Change*, NY: Praeger Publisher, Inc
- Renfrew, Collin & Paul Bahn, 1991. *Archaeology : Theories, Metods and Practice*.
- Schaafsma, Curtis F. 1989. "Significant Until Proven otherwise : Problem Versus Representative dalam Cleere, Henry (ed). 1989. *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. Unwin Hyman. London.
- Tanudirjo, Daud Aris. Tanpa Tahun. *Arkeologi Pasca-modernisme Untuk Direnungkan*.
- Keputusan Menteri Lingkungan hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bangunan Kolonial Kota Makassar : Perspektif *Cultural Resources Management*

Oleh : Asmunandar*

1. Wacana *Cultural Resources Management*

Cultural Resource Management (CRM) sebagaimana yang dikenal di Amerika Serikat (Mayer-Oakes, 1989), yang di beberapa tempat lainnya disebut dengan *Archaeological Heritage Management* (AHM) adalah sebuah sistem perlindungan, perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan tinggalan budaya masa lampau manusia termasuk lokasi atau tempat dimana tinggalan itu berada. CRM dalam pengertian seluas-luasnya disebut *Conservation Archaeology* (arkeologi konservasi), terdapat dua tahap prinsipil yaitu Pertama, mengumpulkan informasi yang relevan dengan situs dan arealnya; Kedua, adalah konservasi situs-situs tersebut dengan tatacara perlindungan secara wajar (Renfrew dan Bahn, 1991). Gejala serupa muncul pula di Australia yang menitikberatkan pada *management of Heritage Places* (Pearson-Sullivan, 1995) sedangkan di Jepang memfokuskan pada *Preservation of Cultural Properties* (Larsen, 1994).

Di Amerika Serikat usaha ke arah konservasi mulai dicanangkan pada tahun 1872, yang pada waktu itu sedang mengembangkan sistem pertamanan *Yellowstone National Park*. Sementara perhatian terhadap usaha konservasi semakin besar setelah *The American Association*

for the Advancement of Science pada tahun 1873 mengeluarkan sebuah petisi yang ditujukan kepada kongres, yang mencela penggunaan *natural resources* secara tidak bijaksana. Sejak itu pemerintah Amerika Serikat mulai menyusun banyak perundangan yang berhubungan dengan konservasi. Berturut-turut, tahun 1891 dikeluarkan undang-undang pengaturan hutan yang disebut *Forest Reserve Act*, undang-undang yang mengatur tentang pemanfaatan air, *The Reclamation Act* tahun 1902 dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan monumen-monumen nasional dan objek-objek benda antik tahun 1906 (Subroto, 1995).

Di Australia peninggalan dan lokasinya, dilindungi dengan perundangan yang disebut dengan *Burra Charter* (Piagam Burra). Piagam ini mengacu pada ICOMOS (*International Council of Monument and Sites*), yang dijalankan di bawah sebuah lembaga bernama *The Australian Heritage Commission* (Pearson dan Sullivan, 1995).

Gerakan arkeologi yang titik perhatiannya pada pelestarian (konservasi), dimulai sekitar tiga dasawarsa yang lalu dan merupakan imbas dari gerakan pelestarian lingkungan hidup yang marak pada waktu itu. Pakar arkeologi menyadari bahwa warisan budaya adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui dan merupakan milik masyarakat luas. Dalam pergolakan ini semua kegiatan yang berkaitan dengan warisan budaya, baik penelitian, pelestarian dan pemanfaatannya harus

mengutamakan kepentingan masyarakat luas (McGimsey dan Davis, 1977; Mcleod, 1977; Cleere, 1989; dalam Tanudirjo, 1993).

Dari gerakan tersebut muncul konsep-konsep arkeologi publik (*public archaeology*), arkeologi kontrak (*contract archaeology*), arkeologi penyelamatan (*salvage/rescue archaeology*) atau sering disebut dengan Pengelolaan Sumberdaya Budaya (*Cultural Resource Management*). Issu yang digarap oleh gerakan ini adalah bahwa benda-benda warisan budaya haruslah diselamatkan dari kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kemusnahan sumberdaya itu, termasuk penelitian arkeologi yang semena-mena. Gerakan ini mendesak para pakar arkeologi agar bekerja dengan bertanggung jawab dan didasari wawasan penyelamatan sumberdaya budaya untuk pemanfaatan jangka panjang (Sharer dan Ashmore, 1979).

Sumberdaya budaya yang merupakan warisan, adalah aset yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Dalam hubungan ini maka sumberdaya budaya, khususnya sumberdaya materi, yang selanjutnya disebut sumberdaya arkeologi (SDA) perlu mendapat penanganan (pengelolaan) secara tepat, sesuai dengan jenis dan kondisi keberadaanya, dengan maksud agar aset itu dapat terjaga dan terlindungi kelestariannya.

Berkenaan dengan pengelolaan, diperlukan bentuk dan jenis pengelolaan yang merujuk langsung pada kepentingan perlindungan dan pelestarian terhadap

juga bangunan keagamaan seperti klenteng atau vihara. Terminologi ini dipakai dengan alasan bangunan tersebut dibangun pada masa kolonial.

Titik penting sejarah Kota Makassar termasuk sejarah perkembangan kota dan arsitektur dimulai dari Benteng Rotterdam sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan militer. Di dalamnya terdapat bangunan gereja, gudang mesiu, kediaman Speelman dan gubernur penggantinya, kantor gubernur, balai kota, kediaman pendeta, kepala bagian perdagangan, kantor pusat perdagangan; bastion yang ditempatkan pada setiap sudut benteng; gudang-gudang yang terdiri dari, gudang kapal, gudang batubara dan gudang untuk barang dagangan yang ditempatkan secara terpisah.

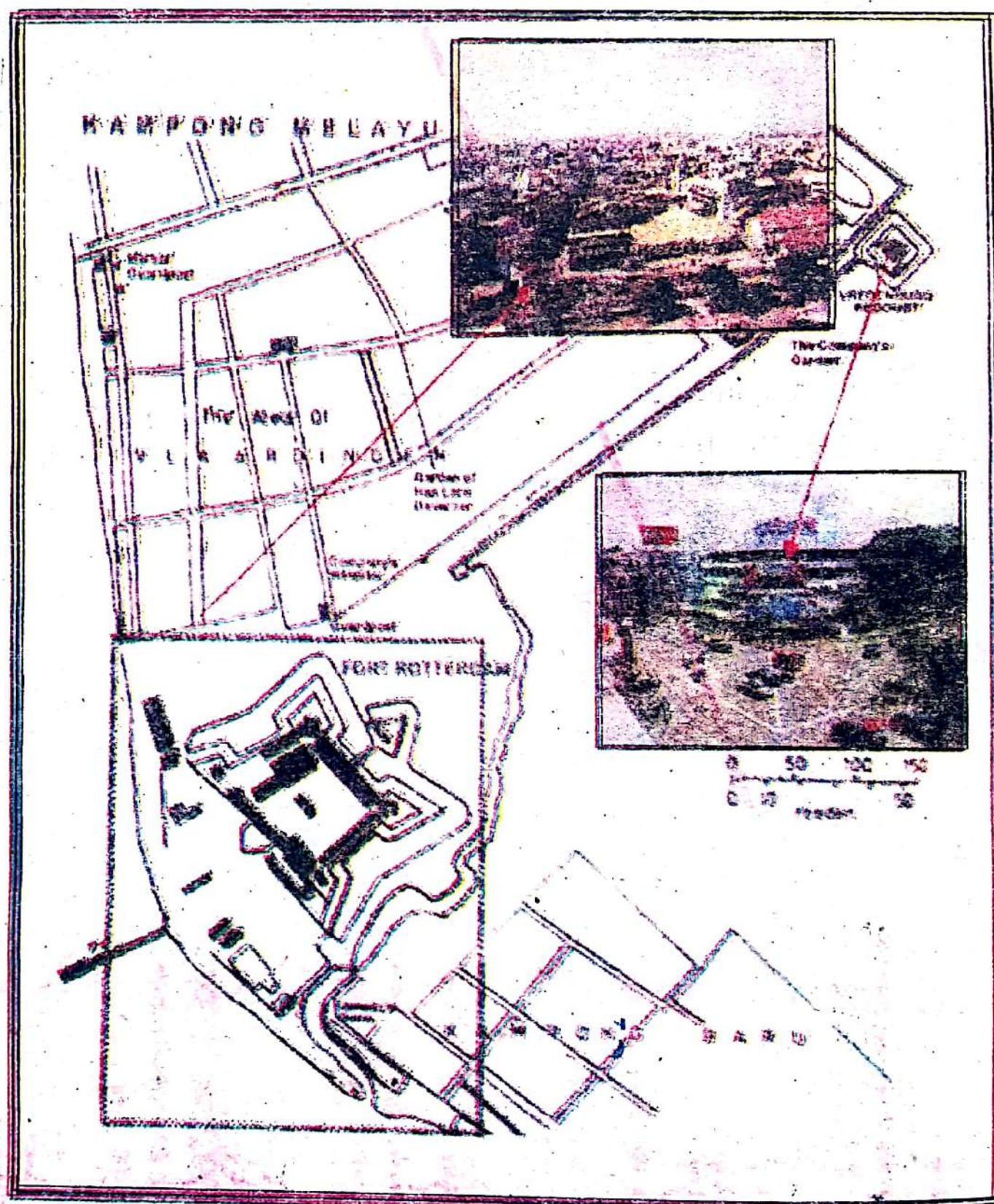
Elemen kedua perkembangan kota terjadi di utara-timur Fort Rotterdam. Speelman menyebutnya "perkampungan dengan perumahan bagi orang-orang asing dan pendatang" atau dikenal sebagai "Negory Vlaardingen". Penghuni daerah ini merupakan campuran dari orang-orang peranakan Cina, pedagang Eropa dan orang asli yang beragama kristen. Elemen ketiga, yang ikut membentuk struktur dan tata ruang permukiman dalam Kota Makassar adalah Kampong Melayu, yaitu kampung penduduk asli di utara *Vlaardingen*. Nama ini melekat dari suku asal penghuninya yaitu orang-orang Melayu bersama-sama dengan orang Bugis (Sumalyo, 1999).

Di masa ini pula telah terbentuk struktur fisik kota

diantaranya yang terdapat di permukiman *Vlaardingen* dengan jalan-jalan lurus sejajar dengan garis bibir pantai, yaitu membujur arah utara-selatan, melintang timur-barat. Empat jalan yang membujur, paling barat adalah *Cinastraat* (*Passerstraat*) sekarang Jalan Nusantara, *Temple Straat* (Jalan Sulawesi), *Middlestraat* (Jalan Bonerate), *Burgherstraat* (Jalan Jampea) dan *Tuinstraat* (Jalan Irian).

Permukiman *Vlaardingen* pada masa ini berpola *Medieval* dengan rumah-rumah berpagar tinggi tanpa halaman depan. Jalan-jalan tersebut dipotong melintang oleh jalan lain yang hampir tegak lurus disebut dengan *Hoogepad*¹ (sekarang Jalan Jendral Ahmad Yani). Di ujung jalan, dibangun benteng kecil yang disebut dengan *Vredenburg* untuk mengawasi gangguan dari arah timur dan dekat dengan benteng, dibangun sebuah lahan perkebunan milik Belanda. Benteng ini dihubungkan dengan laut oleh sebuah kanal yang langsung membentuk parit keliling. Di atas *Vredenburg* kini berdiri gedung BNI (*Peta 1*).

¹ berarti jalan tinggi. Istilah Belanda untuk daerah atau tempat-tempat yang bergengsi dalam sebuah kota dibanding tempat lain



Peta 1. Fort Rotterdam dan sekitarnya abad 17.

Sumber : Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palakka*, 2004

Hingga sekarang kawasan *Vlaardingen* maupun *Kampong Melayu* sangat padat (*crowded*). *Vlaardingen* menjadi ikon daerah perdagangan dan dikenal oleh masyarakat Makassar sebagai wilayah Pecinan. Beberapa bangunan yang mencirikan pola *Medieval* masih dapat disaksikan, namun tidak sedikit pula yang bernasib malang, tidak terawat ataupun hancur.

Perkembangan selanjutnya terjadi di selatan Benteng Rotterdam yang disebut dengan *Kampong Baru*. Bagian ini berkembang kemudian oleh karena itu dinamakan *Kampong Baru*. Daerah ini dihuni oleh orang-orang Asia yang bekerja sama dengan kompeni beragama kristen, atau lebih dikenal dengan sebutan *Mardijkers* (budak yang telah dibebaskan) (*Ibid*). Dalam istilah lokal, masyarakat menyebutnya "*Maradekaya*", merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Makassar.

Gejala pengelompokan penduduk pada masa ini jelas terlihat. Egosentris suku, bangsa atau kepentingan sosial ekonomi membentuk mosaik, kelompok-kelompok penduduk dan pola ruang Kota Makassar (Anonim, 1992; 19).

Sejak kehidupan dalam benteng beralih ke luar benteng (*extra muros*) dimulai, penyediaan fasilitas berupa bangunan-bangunan penting pun didirikan. Diantaranya adalah kediaman gubernur (1885) (foto 1 dan 2) dan Gereja Protestan Immanuel (1885). Keduanya masih bertahan hingga sekarang. Gereja masih berfungsi awal

sedangkan kediaman gubernur menjadi kantor Polwiltabes Makassar (perhatikan pilar yang diberi tanda panah). Meskipun masih dapat disaksikan namun sebagian besar bangunan telah mengalami perubahan.

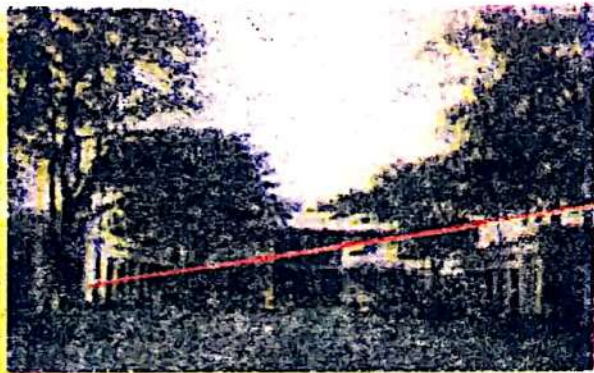


Foto 1

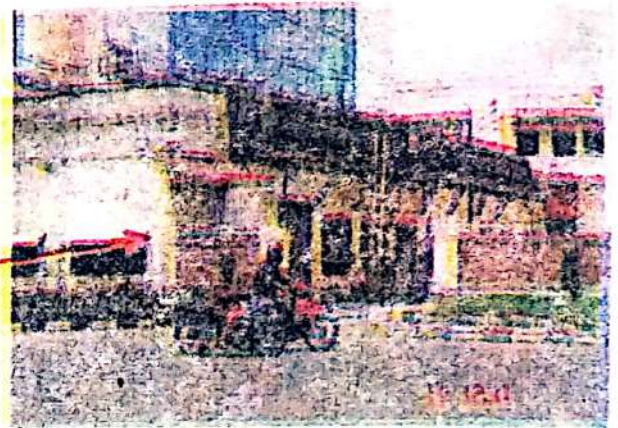


Foto 2

Pemerintah Belanda juga mendirikan beberapa bangunan penting diantaranya rumah sakit (sekarang Rumah Sakit Pelamonia), Oliefabrik (pabrik minyak) di Matjiniajo Jalan Diponegoro, Ysfabriek (pabrik es) Aurora di Jalan Bulusaraung dan Gasfabriek (pabrik gas) di Jalan Cerekang (Sumalyo, 1999; 308). Semuanya telah berganti menjadi kompleks pertokoan dan perumahan.

Di sekitar awal abad XIX, Belanda membangun sarana berupa lapangan yang diberi nama *Koningsplein* (lapangan Karebosi). Tepat di sisi selatan *Koningsplein*, terdapat tiga bangunan yang mengungkapkan ciri sistem pemerintahan Belanda yang menonjolkan unsur eksekutif dan yudikatif, yakni gedung *Stadhuis* (Balai Kota),

Gevangnis (penjara), Gerechtsplaats. (pengadilan) (Anonim, 1992; 26). Terdapat pula kantin militer (Hotel Marannu Tower) di Jalan Thamrin dan gedung pertemuan milik club Bowling Soranus (perkantoran) di Jalan Kajaolalido. Adapun yang masih bertahan adalah SMU Frater. Pada masa ini orang-orang Belanda secara eksklusif mendiami rumah-rumah di *hoogepad* dan sekitar *koningsplein*.

Fase berikutnya, *vlaardingen* berkembang menjadi Kampung Cina (Pecinan), bangunannya berpola campuran *Medieval* dan Tionghoa dengan rumah-rumah berpagar tinggi, tanpa halaman depan. Salah satu bukti peninggalannya adalah Vihara Ibu Agung Bahari/Thian Ho Kong (1738) (foto 3) terletak di Jalan Sulawesi. Namun vihara ini hancur akibat kerusuhan berbau sara di tahun 1997, menyisakan pintu yang masih asli. Bangunan lain yang masih bertahan adalah Rumah Abu Famili Nio (1750-an), Klenteng Kwan Kong (1810-an), Klenteng Siang Ma Kiang (1860), rumah leluhur Marga Thoeng dan rumah abu Thoeng Abadi (1898).



Foto3

Pada periode akhir abad XIX hingga awal Abad XX, dimana Makassar telah menjadi daerah otonom dengan nama *Gemeente Van Makassar*, telah banyak bangunan kolonial yang didirikan untuk mengukuhkan status kota. Di tahun 1918 didirikan gedung Balai Kota/*Geementehuis* (Jalan Balaikota), kini dijadikan museum kota. Di *hoogepad* dibangun *Societeit de Harmoni* (1896) yang berdampingan dengan Gedung CKC (1910) bekas kantor gubernur (kantor anggaran). Selain itu juga dibangun apotik yang bernama Rathkamp (1920) (Apotik Kimia Farma) dan percetakan NV. OGEM (1920-an) (Kia Motors) yang kondisinya masih terawat.

Beberapa gedung sekolah juga didirikan. Diantaranya sekolah bagi orang-orang Eropa; *Eerste Europeache Loger School*² (1910), *Frobel School*³ (1920), *Arens School*⁴ (1928), dan *MENALIA*⁵ (1934). Sekolah bagi orang-orang pribumi serta etnik lain juga telah dibangun diantaranya *OSVIA*⁶ (1910), *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen te Makassar*⁷ (1915), *Hollandsche Inlandsche School*⁸ (1920), *MULO*⁹ (1927) bagi pribumi dan *Holland*

²Sekarang merupakan SMPN 6 Makassar

³Sekarang difungsikan sebagai Kantor KADIN Makassar.

⁴Sekarang berfungsi sebagai Aula SMU Katolik Makassar.

⁵ Sekarang menjadi SD dan SMP Frater

⁶Sekarang adalah SMU 16 Makassar

⁷Sekarang adalah Markas Batalyon Zeni Tempur 08 Kodam VII Wirabuana

⁸SMU Kartika

⁹Sekarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel

*Chinese School*¹⁰ I dan II (1907 dan 1915), *Kwan Bun*¹¹ (1920), *Loen Djie Tong*¹² (1930-an) bagi orang-orang Cina serta *Eerste Ambonsche School*¹³ (1906) bagi etnik Ambon. Terdapat pula sekolah untuk anak laki-laki yang akan dididik menjadi pastor (*Katholike Sociale Bond*¹⁴) tahun 1940. Semuanya masih berfungsi sebagai sekolah dan dalam keadaan baik dan terawat meski beberapa bagian mengalami penambahan.

Selain membangun fasilitas pendidikan, Pemerintah Belanda juga membangun berbagai fasilitas penting bagi Kota Makassar. Di sekitar *Koningsplein* dibangun *Raad van Justitie* (1915) bertolak belakang dengan *Landraad* (kantor pengadilan). Fasilitas penting lainnya yang dibangun diantaranya adalah *Hamente Waterleiding* (1920), *Post Cantoor* (1925), *Landrente* (1940), *Post en Telegraf Cantoor* (1940), *Politie Cantoor*¹⁵ (foto 4) dan Kantor BOW (Kantor Pekerjaan Umum) (Anonim, 1992; 31).

¹⁰ SD Timor 1 dan 2 di Jalan Timor

¹¹ SD Ranggong di Jalan Ranggong

¹² SMPN 5 Makassar di Jalan Sumba

¹³ Kini Sekolah Dasar Kompleks Lariang Bangi di Jalan G. Latimojong

¹⁴ Samping SMU Islam Athirah

¹⁵ Di awal tahun 2006, bangunan ini dihancurkan

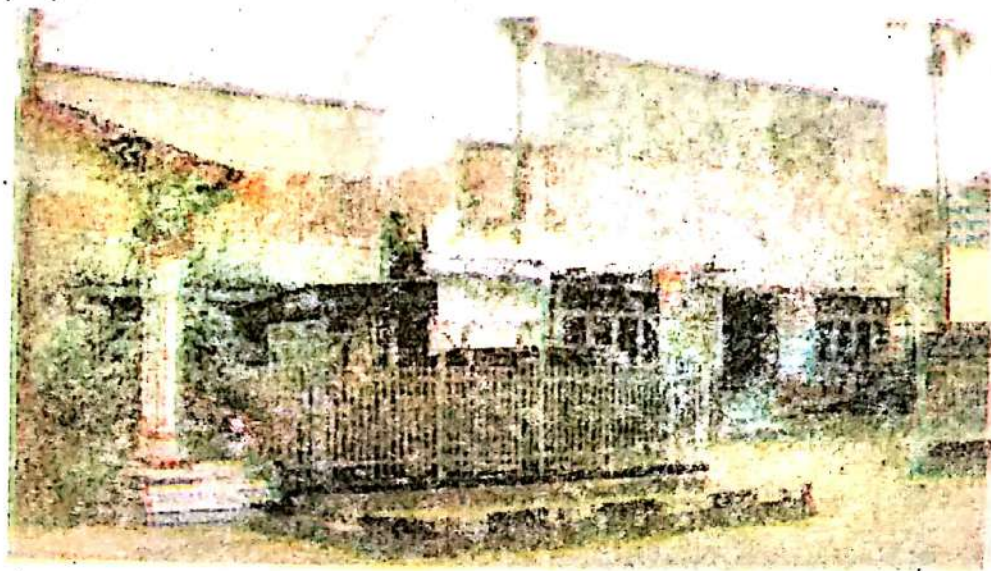


Foto 4. .

Pada tahun 1930-an hingga akhir masa penjajahan Belanda, Makassar berkembang menjadi kota pelabuhan. Kawasan pelabuhan dijadikan sebagai pusat perdagangan dengan berbagai kantor, gudang dan toko yang menyatu dengan penghunian. Bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah KPM (perusahaan pelayaran Belanda) dan gedung *Javasche Bank*. Kedua bangunan ini telah hilang akibat perluasan pelabuhan di kawasan Jalan Nusantara. Yang masih tersisa adalah gudang Mascapai (1920), gudang beras (1920), dan Tjian Rijan & Co. (1920).

Fasilitas kesehatan juga telah dibangun, berupa Rumah Sakit Jiwa Dadi (*Krankzinning Gestrict*) tahun 1920-an dan Rumah Sakit Bersalin Tionghoa (1938) yang sekarang bernama Rumah Sakit Bersalin Sentosa, didirikan untuk kalangan Tionghoa.

Tahun 1939 dibangun Kantor Gubernur (kantor

walikota), yang cukup megah di ujung barat *Hoogepad*, menggantikan kantor gubernur sebelumnya. Kawasan ini berkembang sebagai daerah eksklusif dengan berbagai fasilitas diantaranya *Grand Hotel* (kantor BRI) dan *Empress Hotel* (Sekolah Islam Athirah) di bagian barat *Koningsplein* yang berdampingan dengan bioskop *Luxor* (perkantoran). Kawasan ini juga dibangun berbagai taman antara lain *Kerkplein* dan *Julianaplein*. *Kerkplein* tidak dapat lagi disaksikan, sedangkan di *Julianaplein* kini berdiri kantor RRI, sebelumnya menggunakan rumah kediaman Haji Lala (foto 5 dan 6) (persimpangan Jalan Penghibur dan Jalan Haji Bau) yang kondisinya memprihatinkan.

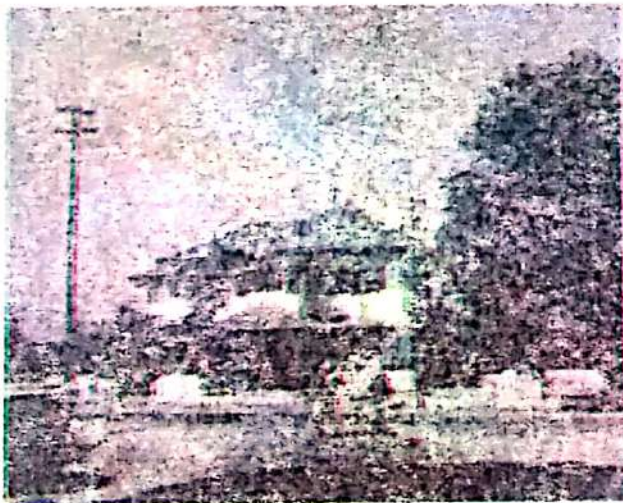


Foto no, 5



Foto no. 6

Perkembangan kota yang makin melebar menyebabkan fasilitas militer juga mengalami pergeseran yang pada awalnya dipusatkan di Fort Rotterdam beralih ke selatan kota. Ditandai dengan

dibangunnya kompleks militer ke selatan kota (Jalan Rajawali) sekitar tahun 1915. Selain itu sekitar kediaman gubernur di selatan *Koningsplein* juga dibangun kompleks perumahan bagi perwira militer Belanda sekitar tahun 1930-an (Kompleks Katangka).

Secara tersirat uraian mengenai sebaran bangunan di Makassar setidaknya memberi kita pemahaman bahwa keberadaan sebuah kota tidak lepas dari sejarah awal perkembangan dan segala proses yang telah dilaluinya. Perkembangan kota sangat berkaitan dengan fungsi waktu, hal ini mengingatkan kita bahwa kota sekarang pembentukannya didasarkan pada masa lalu, sehingga aspek hitoris memegang peran yang sangat penting dalam membentuk morfologi kota.

Sebagai *urban artifact*, kota telah dan akan terus membentuk suatu pola morfologi sebagai implementasi bentuk perubahan sosial budaya masyarakat yang membentuknya. Pola morfologi kota merupakan kesatuan organik elemen-elemen pembentuk kota yang mencakup; Elemen Detail seperti bangunan, sistem sirkulasi, *open space* dan prasarana kota; Tata Bentuk Kota, mencakup pola tata ruang, komposisi lingkungan terbangun terhadap pola bentuk di sekitar kawasan; serta Aspek Peraturan, yang meliputi totalitas rencana yang memperlihatkan dinamika kawasan kota. Dengan demikian untuk mengungkapkan fenomena perkembangan kota, tidak terlepas dari elemen pembentuk kota beserta kehidupan sosial budaya, ekonomi

dan politik masyarakatnya (Wikantiyoso, 2001).

3. Permasalahan

Semakin meningkatnya akumulasi penduduk pada pusat kota, menjadi masalah utama yang dialami perkotaan dewasa ini. Pusat kota merupakan wadah seluruh aktivitas manusia yang sangat kompleks. Seolah-olah pusat kota menjadi *nucleus* sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi para pendatang.

Pandangan bahwa pusat kota merupakan pusat segala kegiatan permukiman, mengakibatkan fisik kota dalam perkembangannya memiliki masalah yang sangat kompleks. Masalah keterbatasan lahan muncul, padahal di sisi lain terdapat peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung. Permasalahan utama tersebut diperparah dengan kurangnya fasilitas umum dan fasilitas perumahan (ibid).

Ironisnya, kebutuhan ini seringkali diakomodasi pada lingkungan perkotaan dimana terdapat bangunan bersejarah yang sangat terkait dengan tumbuh kembangnya kota tersebut. Akibat dari fenomena perubahan ini, menjadikan bangunan-bangunan penanda sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota terancam kelestariannya terutama akibat aktivitas pembongkaran dan penggusuran. Kenyataan ini didasarkan pada kebutuhan akan elemen-elemen fisik berupa bangunan-

bangunan baru yang semakin meningkat.

Penghancuran bangunan kuno di Makassar menyebabkan semakin hilangnya ciri khas yang mampu menunjukkan jati diri Makassar sebagai kota yang pernah mengalami sejarah panjang. Dengan kata lain karakter spesifik kawasan kota kuno Makassar menjadi hilang. Penggantian bangunan lama dengan bangunan baru memunculkan karakter ketunggalrupan arsitektur Kota Makassar. Fenomena ini dapat terjadi sebagai akibat dari tidak diperhatikannya konteks historis dalam penanganan perkembangan Kota Makassar.

Beberapa dalih pembongkaran mengemuka. Diantaranya arsitektur bangunan bersejarah tidak menampilkan sisi perkotaan yang modern, sehingga perlu diganti dengan bangunan baru seperti rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) ataupun mal yang dianggap lebih modern dan menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, terdapat anggapan di kalangan aparat pemerintah bahwa pelestarian bangunan bersejarah hanya menyimpan kenangan pahit cerita masa lalu perjalanan sejarah bangsa.

Bergulirnya wacana otonomi juga berperan menghancurkan bangunan bersejarah. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu sumbernya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari wawancara yang dilakukan penulis

dengan salah satu pemilik bangunan tua di Jalan Sultan Hasanuddin, sebelum otonomi, PBB yang harus di bayar hanya berkisar tiga jutaan, namun adanya otonomi menjadi naik hingga mencapai tujuh juta pertahun. Hal ini dapat 'memaksa' pemilik bangunan menjualnya ke pihak lain. Dapat diduga, arsitektur lama akan dihancurkan dan diganti dengan bangunan baru untuk kepentingan komersil.

Kecenderungan yang terjadi adalah terpusatnya kegiatan perekonomian di kawasan kota lama, yang tentunya memerlukan bangunan baru. Kawasan ini menjadi magnet setiap kegiatan perekonomian. Di selatan Benteng Rotterdam menjadi lahan perkembangan bangunan-bangunan baru, seperti mega proyek perumahan Tanjung Bunga dan Hotel Imperial Arya Duta yang dahulu terdapat pesanggrahan Makassar yang terletak di sepanjang Pantai Losari. Pembangunan ini seolah ingin mencitrakan Makassar sebagai kota modern dengan proyek "mercu suar".

Untuk mengantisipasi hal ini, maka dibutuhkan tindakan yang mengarah pada perlindungan, pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatan bangunan bersejarah yang ada di Kota Makassar. Sebab selama ini usaha ke arah tersebut kurang maksimal atau bahkan belum ada sehingga arti penting bangunan bersejarah belum dirasakan.

4. Konsep CRM Kota Makassar

Menurut Pearson dan Sullivan Sumberdaya

Arkeologi memiliki nilai penting yang meliputi nilai kesejarahan, ilmu pengetahuan, kejamakan, hubungan dengan sosial masyarakat, nilai estetis dan nilai arsitektural (Pearson dan Sullivan, 1995; 133-168). Konservasi bangunan bangunan kuno yang ada di Makassar penting dilakukan karena merupakan bukti yang menarik tentang nilai dan kreativitas dari manusia pendukungnya, juga merupakan bukti yang terdokumentasi tentang pemukiman suatu wilayah atau bagaimana hubungan tempat tersebut dengan dunia luar.

Secara spesifik dalam Piagam Burra juga dijelaskan mengenai pengertian konservasi yakni; 1) segenap proses pengolahan suatu tempat dan bangunan agar secara historis makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik; 2) semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat guna mempertahankan nilai kulturalnya. Di dalamnya tercakup pemeliharaan sesuai situasi dan kondisi setempat yang meliputi preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi.

Hal senada dikemukakan oleh Danisworo (1997), bahwa konservasi merupakan upaya memelihara suatu tempat, berupa lahan, kawasan, gedung maupun kelompok gedung termasuk lingkungannya. Tempat yang dikonservasi akan menampilkan makna dari sisi sejarah, budaya, tradisi, keindahan (estetika), sosial ekonomi, fungsional, iklim dan fisik. Semua itu akan terlihat maknanya pada masa lalu, kepentingan saat ini, serta kelangsungan pada masa

mendatang (Danisworo, 1997).

Sasaran konservasi adalah memelihara kelestarian makna kultural dari suatu kawasan kota lama dengan bangunan bersejarahnya. Guna mencapai sasaran tersebut, diperlukan beberapa upaya diantaranya; 1) mengembalikan wajah (*fasade*) dari objek pelestarian dan 2) memanfaatkan objek pelestarian yang ada untuk menunjang kehidupan masa kini dan yang akan datang (Kevin Lynch, 1969 dalam Budihardjo dan Sidharta, 1989).

Prinsip konservasi yang dilakukan, semestinya berlandaskan pada penghargaan terhadap bentuk semula dari suatu tempat dan sedikit mungkin melakukan intervensi fisik bangunannya. Sementara itu, tambahan bangunan baru di sekitar bangunan lama diusahakan tidak mengerdilkan arsitektur lama, namun terdapat keselarasan (*harmoni*) sehingga arsitektur lama tetap menjadi *eye catching*. Misalnya, jika sebuah bangunan kuno berpola horisontal, maka bangunan baru juga demikian, tidak malah sebaliknya (vertikal). (foto 7)

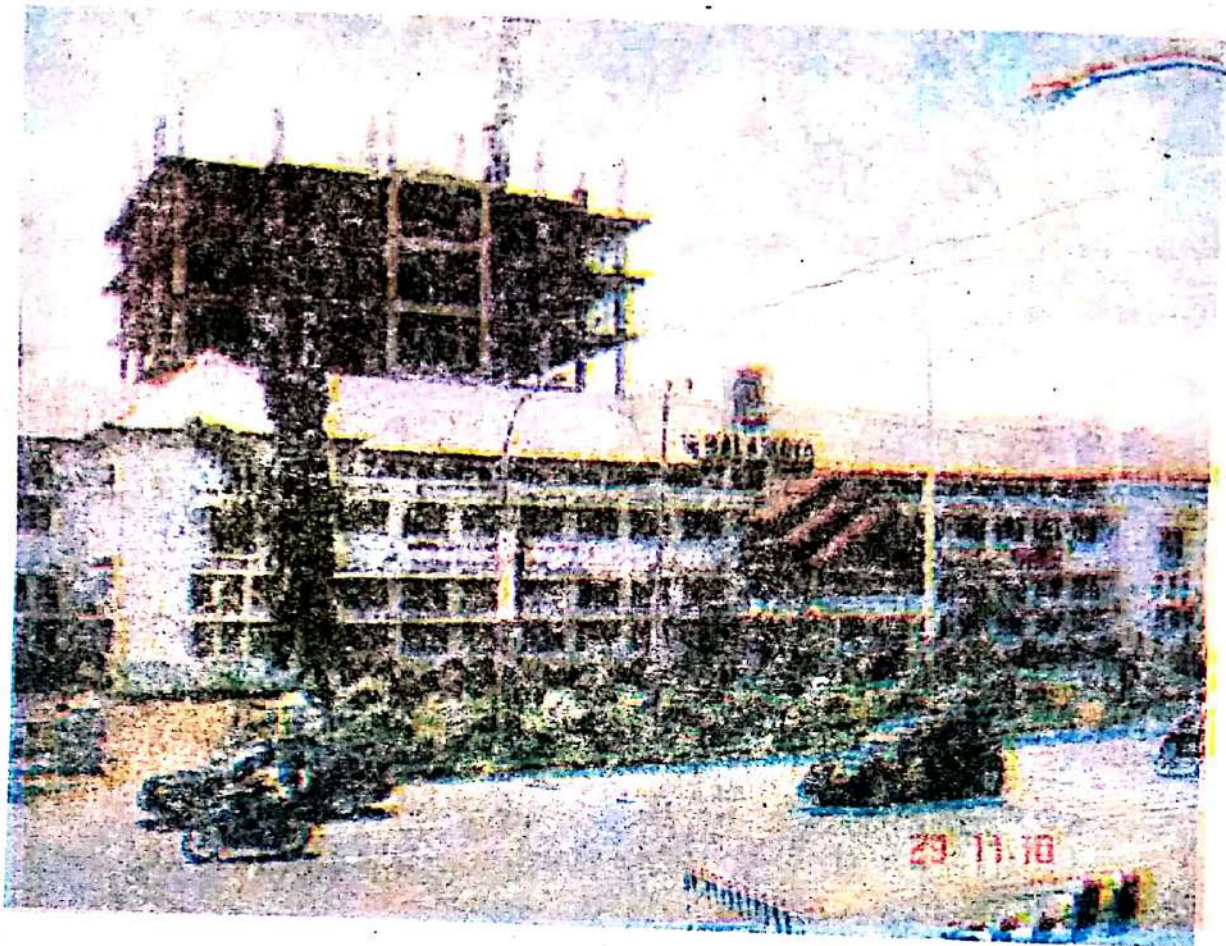


Foto 7 Contoh bangunan baru yg tidak selaras dengan arsitektur lama.

Sudah saatnya perlindungan bangunan bersejarah di Kota Makassar dimasukkan sebagai komponen utama dalam perencanaan kota ke depan. Perlindungan meliputi penggunaan kembali (re-use) namun bersifat adaptif. Artinya, bangunan dimanfaatkan sesuai dengan konteks kekinian mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contoh dapat dilihat pada pemanfaatan bekas Bioskop Benteng menjadi pub and restoran (foto 8). Langkah ini lebih efisien bila dibanding dengan membangun baru. Selain keuntungan ekonomis, juga menghindari pembuatan bangunan baru di kawasan kota lama.



Foto 8

Tidak berhenti pada tahap perlindungan saja, namun sekaligus memanfaatkannya baik untuk kepentingan ideologi, kepentingan akademik dan kepentingan ekonomi (Cleere, 1989; 5-10). Kepentingan ideologi guna memantapkan identitas budaya serta mempertebal ideologi kebangsaan. Kepentingan akademik selain dalam usaha penyelamatan data, digunakan pula untuk menunjang kegiatan pendidikan dan kesejarahan. Kepentingan ekonomik yang berkaitan dengan pemanfaatannya di bidang kepariwisataan. Pengembangan di bidang pariwisata sangat terbuka terutama bagi wisatawan dengan motivasi nostalgia (*nostalgia seekers*). Selain itu promosi sebuah warisan merupakan cara yang tepat dan efektif untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sumberdaya arkeologi guna mendukung program

pelestarian yang dimulai dari peningkatan apresiasi terhadap sumberdaya arkeologi tersebut.

Konservasi bangunan bersejarah di perkotaan, pastinya akan bermuara pada bersandingnya bangunan tua dengan bangunan baru. Mengutip pendapat Widjaja Martokusumo (2004) bahwa, keberadaan bangunan tua merupakan bagian dari sejarah perkembangan kota. Jadi, kehadiran makna sejarah dalam kehidupan kontemporer menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan (Martokusumo, 2004).

5. Penutup

Paparan mengenai konsep konservasi secara jelas memberi gambaran bahwa konservasi perkotaan tidaklah sempit, namun memiliki cakupan luas wilayah kota, visual kota dan bangunan yang mempunyai nilai-nilai dan makna sejarah. Faktor nilai sejarah ini dapat digunakan untuk melihat sejarah perkembangan suatu kota dari masa lalu yang masing-masing terwakili oleh pola dan gaya arsitekturnya, juga digunakan sebagai dasar untuk perencanaan ataupun cerminan di masa datang.

Instansi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang selama ini melakukan upaya-upaya konserevasi bangunan kuno, idealnya tidak bekerja sendiri (*lone worker*), namun perlu mendapat dukungan dan kerja sama semua elemen seperti pemerintah daerah, akademisi,

masyarakat, pihak swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jika tidak, cepat atau lambat "wajah" kota lama Makassar akan hilang seiring dengan penggusuran bangunan-bangunan bersejarah yang tidak mampu bersaing dengan cepatnya akselerasi perkembangan dan pembangunan kota.

**Penulis adalah Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.
- Anonim. 1992. *Pola Perkembangan Kota dan Arsitektur Ujung Pandang*. Proyek Penelitian dan Survei Terapan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- Budihardjo, Eko dan Sidharta. 1989. *Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Danisworo, Moehammad. 1997. *The Meaning of Preservation and Conservation*. Dalam *Preservation and Conservation of Cultural Heritage in Indonesia*, Eko Budihardjo (Ed). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Francis P. McManamon and Alf Hatton. 2000. *Introduction: Considering Cultural Resource Management in Modern Society*. London and New York. Routledge.
- Larsen, K. E. 1994. *Architectural Preservation in Japan*. Trondheim: Tapir Publisher for ICOMOS International Committee.
- Martokusumo, Widjaja. 2004. *Desain Urban dan Konservasi Kawasan Kota Tua Jakarta*. Kompas, Minggu 3 Oktober 2004.

- Mayer-Oakes, William. 1989. *Science, Service and Stewardship – A Basis for The Ideal Archaeology Of The Future*. Dalam Cleere, H.F. 1989. *Archaeological Heritage Management in The Modern World*. London: Unwin Hyman.
- Nuryanti, Wiendu. 2002. *Pengembangan Benda Cagar Budaya dalam Konteks Global-Lokal*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pearson, Michael dan Sullivan Sharon. 1995. *Looking After Heritage Places; the Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Renfrew, Colin dan Bahn Paul. 1991. *Archaeology, Theories, Method and Practice*. London: Thames and Hudson Ltd.
- Subroto, Ph. 1995. *Peringkat-Peringkat Benda Cagar Budaya*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Sumalyo, Yulianto. 1999. *Ujung Pandang Perkembangan Kota dan Arsitektur Pada Akhir Abad 17 Hingga Awal Abad 20*. Dalam Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard, Ecole Francaise d'extreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tanudirjo, Daud Aris. 1993. *Kualitas Penyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat: Studi Kasus*

Manajemen Sumberdaya Budaya Candi Borobudur. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

UWikantiyoso, Respati. 2001. *Panduan Rancang Kota Sebagai Pengendali Pembangunan Kota*. Jurnal Jurusan Arsitektur niversitas Merdeka Malang.

Peranan Air Terhadap Laju Kerusakan Benda Cagar Budaya

Oleh : Rustan*

Pengantar

Seorang peneliti Jepang, Masaru Emoto, menyatakan bahwa air adalah penyusun utama tubuh manusia, lebih dari 70 % tubuh orang dewasa tersusun atas unsur ini, bahkan bumi--tempat manusia dan semua makhluk hidup--permukaannya didominasi oleh air. Air adalah sumber kehidupan segala jenis makhluk di planet ini, mulai dari jasad renik yang tak kasat mata hingga makhluk manusia yang berada pada puncak kerucut evolusi semua makhluk dengan peradabannya yang mengagumkan. Kualitas hidup sekelompok makhluk sangat ditentukan oleh terpenuhinya pasokan kebutuhan akan air.

Sejarah relief muka bumi; terbentuknya tebing, jurang, gunung, lembah, danau, sungai, sampai terbentuknya delta pada muara sungai misalnya, adalah merupakan hasil kerja air yang telah memulai prosesnya jutaan tahun yang lalu. Studi arkeologi yang mempelajari kebudayaan sejak munculnya manusia, menemukan bahwa pola bermukim pertama manusia sangat bergantung pada sumber-sumber air, selain pada ketersediaan bahan makanan. Pada jaman modern ini manusia melibatkan diri dalam proses pembentukan landscape dengan proyek-

Peranan Air Terhadap Laju Kerusakan Benda Cagar Budaya

Oleh : *Rustan**

Pengantar

Seorang peneliti Jepang, Masaru Emoto, menyatakan bahwa air adalah penyusun utama tubuh manusia, lebih dari 70 % tubuh orang dewasa tersusun atas unsur ini, bahkan bumi--tempat manusia dan semua makhluk hidup--permukaannya didominasi oleh air. Air adalah sumber kehidupan segala jenis makhluk di planet ini, mulai dari jasad renik yang tak kasat mata hingga makhluk manusia yang berada pada puncak kerucut evolusi semua makhluk dengan peradabannya yang mengagumkan. Kualitas hidup sekelompok makhluk sangat ditentukan oleh terpenuhinya pasokan kebutuhan akan air.

Sejarah relief muka bumi; terbentuknya tebing, jurang, gunung, lembah, danau, sungai, sampai terbentuknya delta pada muara sungai misalnya, adalah merupakan hasil kerja air yang telah memulai prosesnya jutaan tahun yang lalu. Studi arkeologi yang mempelajari kebudayaan sejak munculnya manusia, menemukan bahwa pola bermukim pertama manusia sangat bergantung pada sumber-sumber air, selain pada ketersediaan bahan makanan. Pada jaman modern ini manusia melibatkan diri dalam proses pembentukan landscape dengan proyek-

proyek raksasa berupa pembuatan waduk, kanal, irigasi untuk pertanian, instalasi air bersih untuk memenuhi kebutuhan akan air manusia serta berbagai bentuk kegiatan lainnya.

Pada sisi yang lain, air juga dapat menjadi perusak yang luar biasa misalnya; bencana banjir, tanah longsor, bencana sosial yang diakibatkan oleh tercemarnya air dengan bahan kimia beracun, dan masih banyak bentuk-bentuk bencana lain yang ditimbulkan. Secara mikro, air yang memiliki rumus kimia H_2O ini mampu membuat perubahan secara signifikan pada struktur dan sifat mineral penyusun suatu benda. Pengaruh yang paling besar adalah pada benda yang berada pada ruang terbuka atau benda yang berada pada posisi kontak langsung dengan air.

Peristiwa ini dapat dianggap sebagai reaksi mineral terhadap kondisi lingkungan dalam bentuk interaksi yang dapat menurunkan kualitas benda. Proses ini dapat berlangsung dengan cepat dan frontal maupun gradual. Pecahnya batuan terjadi karena lepasnya ikatan mineral penyusunnya akibat adanya tekanan mekanis pada batuan sungai yang berarus deras, merupakan salah satu contoh menurunnya kualitas struktur benda yang terjadi secara cepat dan frontal. Demikian juga dengan terjadinya longsor tanah akibat terjadinya banjir, dan masih banyak peristiwa lain yang menunjukkan besarnya pengaruh

aktivitas air yang menyebabkan kerusakan secara cepat.

Kondisi yang berbeda pada proses yang terjadi secara perlahan, namun akibat yang ditimbulkan pada akhirnya akan sama. Kerusakan atau perubahan struktur (disintegrasi) dan sifat serta struktur kimia (dekomposisi) benda dapat berubah secara perlahan akibat adanya interaksi dengan air, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hempasan ombak laut mengukir permukaan karang yang kokoh di pantai, tetesan air di atas batu lantai gua karst dapat mentranfer mineral kalsium karbonat menjadi stalaktit/stalakmit, semuanya terjadi dalam kurun waktu ribuan tahun. Proses serupa juga terjadi pada pembentukan delta di muara sungai, berbagai jenis material diangkut oleh air dari hulu dan sepanjang daerah aliran sungai hingga terakumulasi di muara. Semuanya disebabkan oleh aktivitas air secara langsung dan dapat diamati akibatnya.

Secara lebih khusus pengaruh air ini dapat pula disaksikan pada berkaratnya logam, bocornya atap seng akibat limpasan air hujan sepanjang tahun, atau kayu yang menjadi lapuk karena lembab, bahkan batu yang hancur secara pelan-pelan oleh pertumbuhan lumut, bakteri ataupun ganggang pada permukaannya. Dalam jangka waktu yang lama, bahan-bahan yang tingkat ketahannya tinggi sekalipun akan lapuk oleh aktivitas air yang mempengaruhi segala kondisi lingkungan yang

melingkupinya. Namun demikian akibat kemajuan teknologi dimasa kini, laju kerusakan pada bahan-bahan tertentu dapat dihambat, sehingga dapat menambah tingkat ketahanan benda. Berbagai metode dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaruh pengrusakan oleh air.

Khusus untuk penanganan benda cagar budaya yang dalam artian yang lebih luas, bahwa benda dengan bahan-bahan khusus dan telah berusia tua yang mungkin pada saat ditemukan dalam keadaan telah rusak, atau bahkan hancur, memerlukan keahlian yang lebih khusus lagi. Tetapi setelah benda tersebut telah berada dalam penanganan para ahli sekalipun, bukan berarti bahwa telah terbebas dari ancaman kerusakan yang lebih lanjut, namun masih terikat oleh interaksi dengan berbagai agen perusak di lingkungan penyimpanannya, termasuk salah satunya adalah air.

Pengaruh Air dan Proses Kerusakan

Air adalah pembawa kerusakan yang paling berpengaruh terhadap Benda Cagar Budaya, karena pada umumnya faktor-faktor perusak lainnya juga dipengaruhi oleh aktivitas air. Sedangkan benda cagar budaya adalah benda buatan manusia dari bahan tertentu dari masa lalu yang pada saat ditemukannya telah terkondisi oleh lingkungan situs. Sebagian besar pada saat ditemukannya

dalam kondisi yang sangat rapuh, rusak atau bahkan hancur, dengan demikian sangat mudah untuk mengalami kerusakan yang lebih lanjut atau bahkan hilang sama sekali. Aksesibilitas air dengan benda cagar budaya (bergerak maupun tidak bergerak) mungkin tak dapat dihindari, terutama pada jenis bangunan/struktur yang posisinya berada pada lingkungan terbuka dan kondisi disekitarnya sulit diatur.

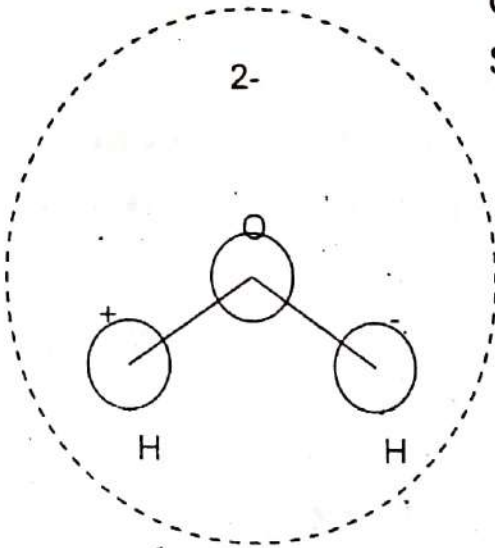
Kerusakan pada benda cagar budaya sendiri secara garis besarnya terjadi akibat 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang merupakan kelemahan bawaan yang menyatu pada benda itu sendiri, misalnya bahan, desain, teknologi, tanah dasar, dan lokasi geotofografis. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar atau lingkungan yang meliputi benda cagar budaya, berupa lingkungan biotik (mahluk hidup) dan abiotik (benda mati). Manusia, tumbuhan, dan binatang merupakan faktor biotik, sedangkan iklim dan bencana alam adalah merupakan faktor abiotik. Meskipun secara praktis air termasuk dalam agen abiotik, namun pada dasarnya turut mempengaruhi, bahkan menentukan peranan agen-agen perusak yang biotik, karena semua mahluk hidup menggantungkan eksistensinya pada ketersediaan air.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan air sebagai perusak menjadi sangat dominan, sehingga jika

dalam penanganan benda cagar budaya, konservator berhasil mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh air, maka sesungguhnya sebagian besar penyebab kerusakan telah teratasi. Tetapi untuk mengantisipasi dan menghambat pengaruh air ini maka sangat perlu untuk memahami bentuk dan proses kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

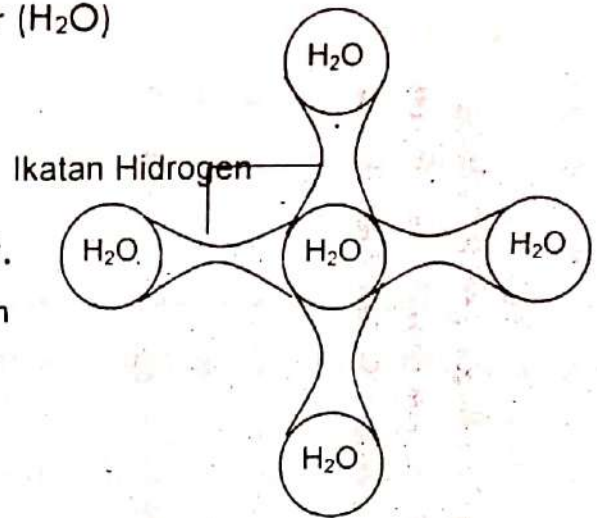
Kemampuan merusak yang begitu tinggi pada air dipengaruhi oleh struktur molekul yang dimilikinya, yaitu dua atom hidrogen (H^+ dan H^-) yang menyertai oksigen (O), menempati posisi yang saling berlawanan tetapi tidak tepat pada masing-masing kutub yang berlawanan dari atom O . Molekul air memiliki empat lengan elektris, dua dari atom hidrogen dan dua dari atom oksigen yang saling tarik menarik antar molekul H_2O , sehingga membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Masing-masing atom hidrogen positif saling tarik menarik dengan atom negatif dari atom oksigen yang berdekatan. Model ikatan seperti ini membuat air memiliki sifat ikatan yang kuat namun sangat dinamis dan aktif. Hal inilah yang membuat air menjadi salah satu molekul substansi yang mampu menyerap dan melepaskan panas dengan sangat baik, namun disisi lain untuk menguapkannya diperlukan energi yang lebih besar untuk melepaskan ikatan-ikatan atomnya.

Gambar 1.

Struktur molekul air (H_2O)

Gambar 2.

Ikatan Hidrogen



Sifat dinamis yang dimiliki membuatnya mampu beradaptasi dengan semua unsur molekul lain, dan mengikat atom-atomnya. Kemampuan merembes yang tinggi diakibatkan oleh sifatnya yang aktif dan gaya adhesi yang dimiliki, tetapi ikatan hidrogen tetap kuat dan elastic. Gaya adhesi pada molekul air memungkinkan mengadakan ikatan dengan atom-atom molekul benda jenis lain. Struktur molekul yang seperti ini menyebabkan molekul air dapat memecahkan material alam lainnya dengan jalan menyusup di antara permukaan ion-ionnya. Dari sinilah bermula proses disintegrasi dan dekomposisi mineral benda-benda lain ketika berinteraksi dengan air.

A. Pengaruh Langsung

Pengaruh langsung yang dimaksud adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivitas air secara langsung yang menimbulkan kerusakan pada BCB. Kecenderungan air untuk terus bergerak menempati tempat yang lebih

rendah serta gaya kohesi yang dimiliki lebih kecil dibanding dengan gaya adhesinya menyebabkan air untuk terus melekatkan molekulnya pada molekul benda lain. Akibat dari gaya adhesi molekul air yang kuat tersebut, sehingga air dapat membuat basah benda-benda di sekitarnya, yang akhirnya menyebabkan timbulnya pergerakan air secara makro.

Aliran air selalu mengikis material benda lain yang dilalui karena ikatan molekulnya yang kuat terhadap atom-atom lain dibanding dengan ikatan terhadap atom-atomnya sendiri. Selain air mengikis permukaan benda yang dilaluinya, juga meresap ke dalam pori-pori benda sehingga dalam waktu yang lama menyebabkan benda menjadi porus. Pada kasus air hujan, masih ditambah lagi dengan beban jatuhnya tetesan yang memindahkan sejumlah energi tertentu, berakibat pada pengikisan permukaan.

Dalam ilmu konservasi benda cagar budaya dikenal empat jenis kerusakan, yaitu kerusakan secara mekanis dan tiga jenis pelapukan (fisis, kimia, dan biologis), dan semua jenis kerusakan ini dapat disebabkan oleh air. Air bekerja secara langsung terhadap material benda cagar budaya dengan tekanannya secara mekanis melalui aliran dan hempasan, kembang susut yang diakibatkan oleh tinggi rendahnya kandungan air, perubahan sifat dan struktur kimia penyusun material

dan merangsang pertumbuhan mikrobial atau makhluk hidup perusak lainnya.

Aktivitas air yang langsung merusak nampaknya lebih pada proses fisis, kimiawi dan juga mekanis. Beberapa aktivitas tersebut antara lain:

1. Aliran pada permukaan

Aliran air secara intensif pada permukaan benda cagar budaya dapat menyebabkan terjadinya erosi dan pengausan pada permukaannya. Arus air terus menggerus permukaan benda cagar budaya yang dialiri atau terkena limpasan/tetesan air hujan. Demikian juga jika benda cagar budaya yang berada di tempat yang terus menerus digenangi atau diterpa arus air misalnya pinggir sungai atau ombak di tepi pantai.

Genangan air yang intensif dan terus menerus juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas struktur bahan karena akumulasi air akan mengisi setiap pori-pori sehingga bahan menjadi jenuh. Benda cagar budaya yang paling rentan dengan kondisi yang seperti ini adalah yang berbahan kayu, bata, bahkan jenis batu tertentu. Kadar air yang jenuh pada bahan kayu menyebabkan proses pelapukan menjadi lebih cepat, karena struktur penyusun serat kayu mengalami kerusakan secara kimiawi.

2. Resapan

Air hujan yang jatuh menerpa suatu struktur/ bangunan atau benda cagar budaya lainnya, sebagian mengalir meninggalkan obyek atau dikenal dengan aliran air permukaan, sebagian menguap, dan selebihnya meresap ke dalam material penyusunnya. Proses peresapan tersebut pada prinsipnya sama dengan aliran permukaan, tetapi yang menjadi bidang alir adalah rongga-rongga atau pori-pori benda. Secara alamiah air akan terus mengisi semua ruang yang kosong pada pori dan terus bergerak ke bawah sampai akhirnya meninggalkan bidang benda kembali. Dan peristiwa ini akan terus berlangsung sampai obyek—dalam hal ini benda cagar budaya—akan terus mengalami porus sampai akhirnya pecah berserakan.

Peristiwa tersebut memiliki efek berantai, misalnya kayu akan jenuh air dan meningkatkan kelembaban. Pada material batu atau bata dan juga benda dengan material utama penyusunnya dari tanah, akan mengalami kembang-susut yang dapat menyebabkan retak, pengelupasan dan pecah. Beberapa peristiwa itu pada dasarnya diakibatkan oleh proses pelarutan, karbonasi, oksidasi dan hidrolisis, yang terutama diakibatkan oleh air hujan.

Pada proses *pelarutan*, misalnya pada bahan batu

terjadi karena sebagian besar silikat melarut pada air hujan dengan pH yang cukup rendah (asam tinggi) dan meninggalkan residu yang tidak dapat larut (contoh; lempung), akibatnya kekerasan batu menurun, daya ikat kohesi menurun bahkan hilang sama sekali, maka terjadilah disintegrasi mineral. Batuan pecah dan hancur akibat kehilangan atau menurunnya kadar silika yang dikandungnya.

Karbonasi adalah pembentukan karbonat karena adanya HCO_3 yang membentuk sejumlah besar bikarbonat, antara lain $\text{Fe}(\text{HCO}_3)_2$ dan juga akibat adanya Mg dan Ca yang larut dalam air. Bahkan batu kapur akan larut seluruhnya sebagai $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ dalam larutan dan pada tempat yang lain akan menjadi tetesan CaCO_3 membentuk stalaktit dan stalakmit.

Oksidasi terjadi pada batu karena senyawa besi yang dikandungnya larut beroksidasi menjadi hidroksid besi yang tidak dapat larut, misalnya limonit $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$. Oksidasi ini menyebabkan lapukan menjadi berwarna coklat karat, merah tanah dan sebagainya, namun pada umumnya akan menimbulkan pelapukan seperti pada karat besi.

Hidrolisis atau hidrasi adalah suatu proses dimana mineral-mineral asal menjadi lepas karena menyerap air (seringkali terjadi pada CO_2 kadar rendah).

Hidrolisis terjadi karena adanya pergantian kation-kation dalam struktur kristal oleh hidrogen sehingga struktur kristal rusak dan hancur, contohnya feldspar berubah menjadi lempung.

Semua peristiwa pelapukan tersebut dapat membongkar benda cagar budaya, terutama yang berbahan batu, dimana berbagai mineral lepas, zat-zat terlarut dihanyutkan, batuan menjadi berpori dan pecah terpecah. Seringkali lapukan-lapukan membengkak karena menyerap air sehingga lapisan yang melapuk akan melepaskan diri dari batuan induk yang masih segar. Tetapi beberapa batuan yang dapat bertahan dengan baik dari pelapukan adalah kuarsa dan muskovit.

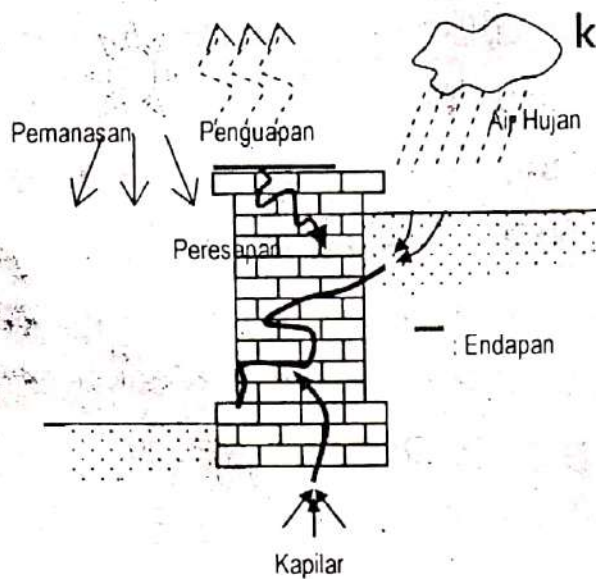
3. Kapilarisasi

Kapilarisasi adalah pergerakan air secara vertikal dari bawah ke atas akibat dari gaya adhesi dan kohesi yang dimilikinya. Air memiliki ikatan molekul adhesi yang lebih kuat dibandingkan dengan gaya kohesinya sehingga air akan membasahi permukaan bahan yang tersentuh. Semakin porus suatu bahan, maka semakin besar peluang terjadinya kapilarisasi, sebab air merambat menyusuri permukaan pori dan memenuhinya. Kapilar terjadi akibat tersedianya akumulasi air di bagian bawah bangunan atau bahan, termasuk adanya kapilar pada tanah.

Peristiwa ini dapat dianalogikan seperti sumbu kompor minyak yang terus mengganti minyak tanah yang habis terbakar pada ujung atas sumbu.

Pada bangunan bata aliran air arah vertikal terjadi saat air naik dari dasar dinding melalui pori-pori bata. Peristiwa ini terus berlanjut setelah air mencapai permukaan dan menguap sehingga secara berantai digantikan oleh air yang baru, dan ini terjadi selama air di bagian bawah masih tersedia. Proses kapilar ini lebih banyak terjadi pada bangunan bata karena pada umumnya bata lebih porus dibandingkan dengan batu atau kayu. Tetapi bahan yang sering digunakan sebagai spesi pada struktur pada sebuah bangunan cagar budaya—misalnya semen campur pasir dan mortar—juga memiliki porositas yang tinggi sehingga dalam penggunaannya perlu pertimbangan tersendiri.

Kapilar pada tanah cukup berpengaruh pada laju kerusakan bangunan, selain karena membawa air secara langsung, juga air terkadang terkontaminasi dengan mineral berbahaya lainnya, seperti garam-garaman. Selain itu memicu timbulnya kelembaban yang tinggi yang memungkinkan aktifnya agen perusak biotik. Pada bahan kayu, kapilarisasi ini dapat menyebabkan kadar air kayu berada di atas titik jenuh serat kayu sehingga menurunkan kualitas



kayu, selain faktor biotik lainnya.

Gambar 3.

Proses peresapan, kapilarisasi, penguapan dan pengendapan

4. Penguapan dan pengendapan

Penguapan adalah berubahnya air dari bentuk cair menjadi bentuk gas yang diakibatkan oleh pemanasan. Besarnya penguapan air dipengaruhi oleh suhu udara, kekeringan udara, kecepatan angin dan tersedianya air. Dalam proses penguapan ini, air meninggalkan unsur-unsur lain yang menyertainya ketika masih dalam bentuk cair. Berbagai jenis mineral yang sebelumnya bercampur dengan air, dalam bentuk aliran, genangan, resapan, kapiler dan lainnya, ditinggalkan dalam bentuk endapan.

Endapan yang ditinggalkan oleh penguapan air yang terjadi secara berulang dalam waktu yang lama akan membentuk sedimentasi pada permukaan bahan. Jika sebelumnya material endapan ini dialirkan dari bekas gerusan dari bahan yang sama, maka telah terjadi disintegrasi material melalui

pelarutan pada suatu bagian dan sedimentasi pada bagian lainnya. Namun jika endapan yang ditinggalkan merupakan residu atau material yang dilarutkan air dari jenis dan tempat yang berbeda, maka telah terjadi penambahan volume bahan asli.

Pada bahan batu dan bata, pengendapan mineral garam yang mengkristal dibawa oleh air hujan, angin, polusi dan air tanah yang terkapilarisasi, dengan cepat akan menurunkan kualitasnya. Khususnya pada bahan bata, garam dapat berasal dari bahan bakunya yang mengkristal setelah kandungan airnya menurun karena penguapan. Penggaraman ini, baik pada bata maupun batu, dapat menyebabkan pengelupasan akibat adanya perbedaan nilai muai antara mineral batu/bata dengan sedimen garam yang menempel pada permukaannya. Jika penggaraman terjadi pada bagian dalam batu/bata—dapat diakibatkan oleh peresapan dan kapilarisasi—dapat menimbulkan keretakan akibat endapan garam akan memuai setelah suhu dan kelembaban berubah.

Sebagian besar benda cagar budaya yang berupa struktur atau bangunan, berada pada tempat terbuka sehingga menyebabkan interaksi langsung dengan air hujan hampir tidak dapat dihindarkan. Sebagian lagi yang lain merupakan benda cagar budaya yang

bergerak, berada pada situs-situs terbuka (*open site*) mengalami kondisi yang sama. Siklus musim hujan dan kemarau di daerah tropis mempercepat pelapukan pada fragmen gerabah, artefak batu ataupun sisa-sisa makanan. Kenyataan lain yang tak dapat dihindari adalah sebaran artefak tersebut akan tertransformasi oleh air, sehingga posisi tidak insitu lagi.

B. Pengaruh Tidak Langsung

Selain kerusakan pada benda cagar budaya yang timbul akibat berinteraksi langsung dengan aktivitas air, kerusakan dapat pula terjadi karena hadirnya agen perusak yang dipicu oleh ketersediaan air. Dalam hal ini aktivitas air di sekitar atau pada benda cagar budaya, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan yang berefek buruk bagi kelestarian benda cagar budaya. Perubahan tersebut adalah termasuk berubahnya stabilitas tanah, munculnya mikroorganisme, atau bahkan makroorganisme.

Kerusakan obyek tidak hanya sampai disitu, sebab hampir setiap kerusakan yang disebabkan interaksi tidak langsung dengan air ini selalu pula disertai dengan interaksi langsung. Misalkan suatu bangunan yang berada pada tempat yang tergenang, selain diserang kapilarisasi, penggerusan, juga pertumbuhan berbagai macam organisme yang berkembang biak

dengan baik pada kondisi lingkungan yang lembab.

Pengaruh air secara tidak langsung ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengaruh biotik dan abiotik. Faktor biotik ini dipengaruhi oleh makhluk hidup yang hidup dan tumbuh pada atau di sekitar obyek benda berada, sedangkan abiotik adalah faktor kondisi alam di sekitarnya atau tempat obyek berada. Faktor kondisi alami ini terutama menurunnya stabilitas daya dukung tanah terhadap obyek, terutama struktur/bangunan.

1. Stabilitas tanah

Aktivitas air, baik aliran permukaan maupun air tanah sangat mempengaruhi kestabilan permukaan tempat bangunan berada. Terjadinya kelongsoran tanah pada bagian yang lain—meskipun bukan pada tempat bangunan berdiri--dapat menyebabkan terjadinya kerusakan struktural sebab terjadinya pergeseran tanah, baik horizontal maupun vertikal. Hal ini dapat terjadi sebab berkurangnya daya dukung tanah terhadap gaya berat atau beban bangunan akibat pergeseran berantai yang diawali oleh erosi aliran air permukaan. Bangunan yang berada pada landscape bergelombang kuat, dengan kondisi tanah yang stabil sekalipun tetapi dengan drainase yang kurang memadai, pada musim hujan masih rawan dengan terjadinya deformasi.

Selain aliran air permukaan, air tanah juga turut berpengaruh sebab pada musim hujan, dimana peresapan air permukaan terjadi secara terus menerus, berakibat pada meningkatnya volume air tanah. Dengan demikian tanah menjadi jenuh, apalagi jika terjadi pergerakan air bawah tanah yang serius. Kondisi tanah yang kenyang air ditambah dengan pergerakan dapat menyebabkan tanah menjadi sangat labil. Daya dukung menurun disertai dengan bertambahnya beban bangunan oleh meningkatnya kandungan air akibat peresapan maupun kapilarisasi.

2. Pertumbuhan Organisme

Tingginya kandungan air pada suatu bahan, terutama pada batu, bata, kayu, serta bahan sejenis lainnya, dapat memicu tumbuhnya berbagai macam organisme. Karena kadar air yang tinggi pada obyek sehingga berpengaruh pada tingginya persentase kelembaban, dan kondisi ini memungkinkan tumbuhnya berbagai macam mikroorganisme, misalnya jamur (*fungi*), ganggang (*algae*), lumut (*moss*), bakteri, bahkan tumbuhan jenis paku-pakuan dan hewan seperti cacing. Dalam siklus hidup masing-masing organisme ini, pada umumnya merugikan inang tempatnya hidup, sebab sebagian besar merupakan parasit, atau dalam proses

hidupnya mengeluarkan zat-zat yang dapat merusak bahan penyusun inangnya.

Batuan ditumbuhi jamur jika kondisi lembab dengan suhu maksimal 30°C , merusak dengan memperbesar pori-pori batuan dengan akar-akarnya. Ketika lumut mati dan tercabut maka sebagian material batuan ikut keluar, demikian seterusnya hingga terbentuk lubang-lubang pada permukaan batu. Proses ini secara perlahan akan terus membuat pelapukan batuan akibat struktur mineral menjadi rusak oleh aktivitas hidup lumut ini. Demikian pula pada jenis jamur dan ganggang.

Ganggang tumbuh pada bagian batu yang relatif basah, namun mampu bertahan pada suhu yang lebih tinggi, oleh karena itu beberapa jenis ganggang cenderung memilih tempat-tempat yang terkena sinar matahari. Terdapat pula jenis ganggang yang bersimbiosis dengan suatu jenis jamur membentuk organisme yang dikenal dengan jamur kerak (liken atau *lichennes*), dan jenis ini yang paling sulit untuk diatasi, selain dengan penggunaan bahan kimia. Jenis ini banyak menyerang benda cagar budaya jenis batu dan kayu dengan tingkat kelembaban yang tinggi.

Pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme lebih cepat terjadi pada bahan kayu, disebabkan oleh

karena kayu merupakan bahan organis yang lebih disukai oleh mikroorganisme dibanding bahan non-organik seperti batu. Beberapa jenis perusak yang paling banyak ditemukan pada bahan kayu yang lembab atau basah antara lain; jamur pembusuk/pelapuk kayu, rayap serta cacing laut. Jenis jamur pembusuk misalnya; *Chaetomium globosum*, *Mycelia sterilia*, dan *Paecilomyces virioti*, menyerang kayu yang lembab atau basah dalam waktu yang lama. Jamur ini lebih menyukai kondisi kayu yang banyak mengandung selulosa, jenuh dengan air, oksigen yang cukup dan suhu yang cocok. Sedangkan cacing laut akan menyerang kayu yang terendam dalam air, baik dalam air laut maupun air payau dengan cara melubangi. Lubang dengan intensitas yang tinggi dapat menyebabkan kayu menjadi rapuh.

Rayap tanah atau rayap subteran membuat sarang pada tanah yang lembab dan dekat dengan kayu sasaran yang juga kondisinya lembab. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan binatang ini bertahan pada kondisi kering dan suhu tinggi. Rayap ini berkembang dengan baik pada kondisi tingkat kelembaban antara 97,5%-100%, bahkan mampu bertahan sampai 86 jam tanpa persediaan makanan. Namun pada kondisi yang kering (kelembaban udara $\pm 10\%$) hanya mampu bertahan hidup tanpa makanan selama 11 jam. Serangan

yang lebih agresif terhadap kayu yang sebelumnya telah terserang oleh jamur pembusuk, bahkan terdapat ikatan simbiosis antara rayap dengan jamur jenis mycelium yang memancarkan bau yang merangsang rayap untuk aktif lebih agresif.

3. Efek lain

Efek lain yang ditimbulkan oleh aktivitas air adalah lebih pada kasus-kasus yang berhubungan dengan kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya. Kesalahan dalam penataan fasilitas pendukung, misalnya pemasangan instalasi air bersih terkadang mengganggu keaslian obyek. Demikian pula dengan penanganan sampah yang tidak tepat mengotori saluran air pada drainase permukaan maupun bawah tanah dan ini akan menimbulkan masalah yang berantai. Pengolahan air limbah--yang terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia beracun--yang tidak tepat dapat menyebabkan pelapukan pada obyek.

C. Penanganan

Berbagai masalah yang ditimbulkan oleh air terhadap benda cagar budaya tidak dapat dihilangkan sama sekali, namun berbagai upaya dapat dilakukan untuk menghambat laju kerusakan yang ditimbulkan tersebut.

Hingga sekarang para professional yang bekerja di bidang konservasi, masih menggunakan beberapa cara tradisional untuk menghambat kerusakan selain cara-cara modern yang dikembangkan belakangan ini. Pemilihan metode tersebut sangat relatif tergantung gejala kerusakan yang timbul, sebab masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pada bagian penanganan ini, penulis hanya mencoba mengidentifikasi cara-cara umum yang lazim dilakukan oleh para konservator. Untuk penanganan secara teknis masih dibutuhkan analisa tersendiri, sebab untuk tulisan ini hanya berusaha untuk melihat dan mengklasifikasi kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas air. Dengan harapan bahwa pemahaman tentang pengaruh air terhadap benda cagar budaya, maka selanjutnya dapat disusun rencana teknis yang tepat untuk penanganan masing-masing jenis kerusakan.

Khusus masalah kerusakan yang disebabkan oleh air, beberapa cara (baik tradisional maupun modern) dapat menjadi pilihan pada kegiatan konservasi antara lain:

- Untuk penanganan masalah aliran air permukaan, dapat dilakukan cara-cara konstruktif dengan penataan lahan dan drainase.
- Peresapan yang tinggi pada bahan penyusun benda cagar budaya dapat disiasati dengan pengolesan

bahan kedap air (water proofing) atau penolak air (water repellent).

- Penanganan masalah kapilarisasi sebaiknya difokuskan pada usaha untuk mengurangi kontak dengan tanah dengan kandungan air tinggi. Termasuk diantaranya dengan pembuatan drainase, konsolidasi tanah dan juga penggunaan bahan penghambat kapiler air, misalnya lapisan berbahan timah.
- Penguapan dan pengendapan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, apalagi jika masalah keberadaan air pada benda cagar budaya belum teratasi. Jadi untuk mengatasi masalah penguapan maka resapan, kelembaban, kapilarisasi, atau aliran air pada permukaannya terlebih dahulu harus diantisipasi. Demikian pula dengan pengendapan sebab endapan berasal dari larutan air yang mengandung material-material lain yang merugikan.
- Tingkat kestabilan tanah juga tergantung pada usaha konstruktif dalam tata lahan dan drainase induk serta usaha stabilisasi.
- Masalah pertumbuhan organisme dapat dikurangi dengan menurunkan tingkat kelembaban dengan penanganan yang sifatnya pencegahan.

Penutup

Air sebagai salah satu agensia perusak keawetan benda cagar budaya sangat dominan peranannya, karena selain merusak secara langsung, masih memberikan dukungan pada timbul/aktifnya agen perusak lainnya. Proses ini diperparah oleh karena setiap peristiwa ini hampir seluruhnya berjalan bersamaan, dalam artian bahwa jika air merusak secara langsung, maka hampir pasti diikuti oleh aktifnya agen perusak yang lainnya secara bersamaan. Terlebih lagi di Indonesia sebagai bangsa yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan dan kelembaban tinggi, membuat penanganan masalahnya menjadi lebih berat.

Kondisi tersebut bukanlah semata-mata kelemahan, namun di sisi yang lain hal tersebut merupakan sebuah kelebihan. Besarnya dominasi air pada proses kerusakan dan pelapukan semestinya menjadi masalah yang prioritas utama untuk diatasi. Dengan pengembangan metode-metode penanganan konprehensif kelak, maka masalah besar dalam pelestarian benda cagar budaya di Indonesia telah terjawab, sebab wilayah Indonesia sebagian besar adalah wilayah perairan.

**Penulis adalah Staf Kelompok Kerja Perlindungan pada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar*

Daftar Pustaka

- Haryono, Timbul dkk., 2004. Pelapukan Batu Candi Siwa Prambanan dan Upaya Penanganannya, Yogyakarta, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.
- Luknanto, Djoko., 2006. Waterworld of Borobudur Temple, Makalah untuk materi Hidrology pada Diklat Konservasi dan Pemugaran Tingkat Menengah Angkatan III tahun 2006, Magelang-Jawa Tengah, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
- Munandar, Aris., 2006. Kerusakan dan Pelapukan Material, Makalah untuk materi Kerusakan dan Pelapukan Material pada Diklat Konservasi dan Pemugaran Tingkat Menengah Angkatan III tahun 2006, Magelang-Jawa Tengah, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
- _____, 2006. Observasi Klimatologi dan Kegunaannya dalam Konservasi Benda Cagar Budaya, Makalah untuk materi Observasi Klimatologi pada Diklat Konservasi dan Pemugaran Tingkat Menengah Angkatan III tahun 2006, Magelang-Jawa Tengah, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
- Rapp. Jr., George (Rip), and Christopher L. Hill, 1998. Geoarchaeology: the Earth- Science Aproach to Archaeological Interpretation, London, Yale University Press.

Renfrew, Colin and Paul Bahn, 1991. *Archaeology: Theories, Method and Practice*, London, Thames and Hudson Ltd.

Sukronedi, 2006. *Analisis Laboratorium Kimia, Makalah untuk materi Analisis Laboratorium Kimia pada Diklat Konservasi dan Pemugaran Tingkat Menengah Angkatan III tahun 2006, Magelang-Jawa Tengah, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.*

Suranto, Yustinus, 2002. *Pengawetan Kayu: Bahan dan Metode*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

Konservasi Warisan Budaya Kota Towaya Makassar Sebagai Kawasan Wisata Budaya Yang Potensial

Oleh : Anwar Thosibo*

Konsep Konservasi Warisan Budaya

Secara umum kata konservasi sering lebih dikaitkan dengan konservasi alam dalam arti kelestarian lahan pertanian, melindungi kawasan hutan atau menjaga badan-air (danau atau sungai). Namun sesungguhnya, kata konservasi juga sangat berkaitan dengan warisan budaya dalam bentuk bangunan kuno dan lingkungan atau kota tua yang berwawasan identitas. Mengenai konservasi alam, sudah sering dibicarakan dalam sarasehan, akan tetapi konservasi bangunan kuno mungkin belum begitu terdengar gaungnya.

Semenjak diberlakukannya Undang Undang No.5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya, perhatian berbagai pihak terhadap upaya-upaya pelestarian atau konservasi bangunan kuno dan kota tua yang berwawasan identitas semakin meningkat. Kepedulian yang tinggi itu perlu terus dikembangkan agar tidak hanya terpancang pada peninggalan arkeologi yang lebih prestise seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai *world cultural heritage*, tetapi juga menyangkut bangunan-bangunan sesudahnya. Termasuk yang sangat memononjol di Indonesia adalah arsitektur

tradisional dan peninggalan kolonial yaitu arsitektur Indisch yang berada dalam kota tua yang berwawasan identitas.

Konsep konservasi atau pelestarian pada mulanya berawal dari konsep preservasi yang bersifat statis. Maksudnya bangunan yang menjadi obyek preservasi dipertahankan persis seperti keadaan aslinya. Yang berbentuk puing-puing (tembok, kolom, reruntuhan) tetap ditampilkan dalam wujud puing-puing. Konsep yang demikian itu seolah-olah sama saja dengan diawetkan. Sasarannya pun lebih terbatas pada artefak peninggalan arkelogis. Konsep yang bersifat statis tersebut kemudian berkembang menjadi konsep konservasi yang bersifat dinamis dengan cakupan lebih luas pula. Sasarannya tidak terbatas pada artefak saja melainkan meliputi situs lingkungan atau kota tua yang berwawasan identitas. Selanjutnya, konsep konservasi lantas merupakan istilah yang menjadi payung dari segenap kegiatan pelestarian lingkungan yang meliputi preservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi dan revitalisasi.

Bila suatu bangunan kuno atau kota tua yang berwawasan identitas akan dikonservasi, bukan lagi berarti bahwa bangunan tersebut sekedar dikembalikan ke bentuk dan fungsi aslinya. Bisa saja bangunan kuno tersebut beralih fungsi. Misalnya Benteng Fort Rotterdam yang dulunya berfungsi sebagai tempat pertahanan, kemudian dijadikan museum atau pusat kegiatan budaya. Di luar negeri banyak contoh demikian. Kawasan pertokoan The

Rocks yang terkenal di Sydney, semula adalah bekas kompleks penjara. Meskipun terjadi perubahan fungsi, skal dan penampilannya jangan sampai megerdikan dan melecehkan keunikan bangunan kunonya yang asli.

Tolak Ukur Untuk Kelayakan Konservasi

Dalam melakukan konservasi tertentu saja diperlukan suatu tolak ukur, dan paling tidak diperlukan sembilan bentuk tolak ukur ayng dapat digunakan untuk menguji kelayakan suatu bangunan kuno atau tua yang berwawasan identitas guna dikonservasi.

Pertama adalah dilihat dari kelangkaannya, dalam arti bahwa bangunan atau kawasan yang akan dikonservasi merupakan suatu warisan budaya yang sangat langka dan tidak dimiliki daerah lain.

Kedua adalah dilihat dari segi nilai kesejarahannya, dalam arti bahwa bangunan atau kawasan yang akan dikonservasi merupakan suatu lokasi atau bangunan tempat terselenggaranya suatu peristiwa bersejarah yang sangat penting.

Ketiga adalah dilihat dari segi estetika atau keindahannya, dalam arti bahwa bangunan atau kawasan yang akan dikonservasi memiliki keindahan bentuk struktur atau keindahan ornamen.

Keempat adalah dilihat dari segi superlativitasnya, dalam arti bahwa bangunan atau kawasan yang akan dikonservasi memiliki kelebihan tertentu seperti tertinggi, terpanjang atau terluas.

Kelima adalah dilihat dari segi kejamakanya, dalam arti bangunan atau kawasan yang akan dikonservasi merupakan suatu bangunan atau kawasan yang tipikal yang khas, mewakili suatu jenis atau ragam bangunan tertentu

Keenam adalah dilihat dari segi kualitas pengaruhnya, dalam arti bahwa bangunan atau kawasan yang akan dikonservasi keberadaanya akan meningkatkan citra lingkungan sekitarnya.

Ketujuh adalah dilihat dari segi nilai sosialnya, dalam arti bahwa bangunan atau kawasan yang akan dikonservasi merupakan bangunan-bangunan yang bermakna bagi masyarakat banyak.

Kedelapan adalah dilihat dari segi komersialnya, dalam arti bahwa bangunan atau kawasan yang akan dikonservasi mempunyai peluang untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomis.

Kesembilan adalah dilihat dari segi nilai ilmiahnya, dalam arti bahwa bangunan atau kawasan yang akan dikonservasi mempunyai kaitan dengan perannya untuk pendidikan dan pengembangan ilmu.

Dengan sembilan tolak ujur tersebut diatas tidak akan berarti bial tidak diikuti dengan tindak lanjut yang nyata. Segenap pihak (stakeholder) perlu bersatu padu dalam kegiatan konservasi, baik pihak penentu kebijakan (pemerintah), swasta dan masyarakat. Pemerintah diharapkan melalui undang-Undang Benda Cagar Budaya dapat melindungi bangunan kuno dan kota tua yang berwawasan idenritas. Dari pihak swasta diharapkan keterlibatan aktifnya dalam memanfaatkan bangunan kuno dan kota tua yang potensial untuk kegiatan ekonomis yang menghasilkan keuntungan, sedang dari pihak masyarakat diharapkan sifat kebersamaan mencurahkan perhatian kepada pelestariannya.

Kawasan Fort Rotterdam Sebagai Kota Towaya Makassar

Jika Los Angeles bangga dengan China Town-nya dan Singapura bangga dengan citra kawasan Little India, bagaimana dengan kota Makassar?. Apakah kita perlu membanggakan kampung Melayu, Kampung Baru, kampung Wajo, Kampung Sambung Jawa, Pattunuang, Bontoalak, Stad Vlaardingen tempat etnis Cina, atau semuanya sebagai kawasan kota towaya yang juga dikenal dengan nama kotana BandaE ri Juppandang.

Nama perkampungan kota towaya Makassar sebagaimana disebutkan di atas sampai saat ini masih tetap eksis, meskipun bangunan-bangunan kuno yang ada

di dalamnya sudah berkurang dan berubah menjadi bangunan baru yang menyiratkan modernitas. Dengan lenyapnya bangunan kuno itu, ikut lenyap pula bagian dari sejarah suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri. Generasi penerus tidak akan dapat lagi menyaksikan bukti-bukti sejarah dari perjalanan hidup generasi sebelumnya.

Memang banyak kalangan yang telah menyesali dibongkarnya Gedung Proklamasi di Kota Jakarta termasuk penjara banceuy tempat Bung Karno di tahan di kota Bandung. Begitupun terhadap pembongkaran pintu masuk bagian timur benteng Fort Rotterdam yang diganti dengan bangunan Kantor POS, serta pembongkaran terhadap bangunan-bangunan bersejarah lainnya di kota Makassar. Kata-kata yang sakral dalam kitab suci "Datangilah ladangmu dan cangkullah" yang ditujukan kepada para suami, diprofankan oleh para investor sebagai patokan dalam mengeksploitasi lahan yang dimilikinya. Padahal di negara yang paling kapitalistik sekalipun, ada konsep land sharing, bahkan lebih dari itu, kota-kota bersejarah seperti Chester dan Bath di Inggris misalnya, telah ditetapkan sebagai *historic towns*, yang berarti bahwa keseluruhan kota menjadi suatu kawasan konservasi. Mungkin sudah tiba saatnya bagi seluruh stakeholder untuk menjadikan kawasan kota towaya benteng Fort Rotterdam sebagai *conservation areas*, atau *archaeology landscape* untuk kepentingan aset wisata

budaya

Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

Pengembangan destinasi wisata budaya merupakan program utama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, oleh karena disadari bahwa Indonesia terdiri dari variasi suku bangsa (ethnic group), variasi kebudayaan (culture) dan variasi pola hidup (civilization). Kebudayaan sebagai tatacara hidup yang diwariskan antara satu individu dengan individu lainnya, dalam wujud kongkritnya adalah wawasan budaya material. Adapun warisan budaya material yang dimaksud meliputi; (1) Peninggalan sejarah dalam bentuk Kota tua, kawasan bangunan kuno, bangunan kuno, candi, kereta api dan museum; (2) Art Shop dalam bentuk pasar seni, pusat kerajinan, miniatur kompleks bangunan budaya, pasar tradisional, dan industri tradisional; (3) Kompleks Keyakinan dalam bentuk makam, candi, mesjid, wihara dan klenteng.

Sasaran wisata budaya yang bersifat material tentu diarahkan kepada bentuk-bentuk keunggulan wujudnya. Terhadap akses keunggulan itu perlu disosialisasikan antar generasi sebagai produk budaya, dan tentu saja masing-masing etnis suku bangsa mempunyai model keberlanjutan sesuai dengan budaya. Mengenai prinsip pengembangannya perlu melibatkan semua stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk menguatkan

akses keberlanjutan masyarakat masing-masing stakeholder perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat sebagai sasaran wisata budaya, terutama dalam hal pengembangan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kebudayaannya sendiri sebagai suatu jatidiri.

Dalam kasus kawasan wisata budaya situs kota tua Makassar umpamanya, situs kota tua Makassar merupakan warisan budaya. Seluruh stakeholder memanfaatkan situs kota tua makassar sebagai sasaran wisata. Sebagai obyek turisme, situs kota tua makassar dapat menciptakan berbagai kepentingan. Bagi pemerintah daerah merupakan aset daerah dan tempat wisata bagi wisatawan dari luar masyarakat setempat, kemudian bagi swasta mungkin menjadi obyek mata pencaharian, sementara bagi masyarakat merupakan hak milik ulayat atau komunitas adat yang sakral. Oleh karena itu perlu kiranya strategi menyatukan persepsi dari masing-masing kepentingan ini dalam suatu wadah untuk mencapai suatu wisata yang berkelanjutan.

Salah satu strategi dalam upaya pengembangan adalah menerapkan program pembangunan masyarakat, dengan cara memberikan akses kepada masyarakat setempat untuk dapat terlibat dalam kepariwisataan yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat sehingga terjalin hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah perlu bermurah hati kepada masyarakat dengan memberikan akses administrasi guna

kelancaran pengembangan program.

** Penulis Adalah Dosen Arkeologi Fakultas
Sastra Universitas Hasanuddin*

Potensi Sumber Daya Arkeologi Bawah Air
di Sulawesi Selatan: Suatu alternatif tambahan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)¹ ?

Oleh : Iwan Sumantri Daeng Siala²

Pendahuluan

Salah satu isu paling kuat yang berhembus sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto hingga kini adalah adanya keinginan kuat akan perobahan kebijakan pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi. Kebijakan desentralisasi meng-akibatkan semakin berkurangnya kewenangan pusat dan semakin bertambah kuatnya kewenangan daerah pada sektor tertentu. Muara dari perobahan itu dapat dilihat dari munculnya gagasan otonomi daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu sektor yang dirasakan amat sangat mendesak untuk segera ditangani adalah masalah peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan berhembusnya gagasan otonomi daerah itu pula, berbagai pihak kemudian seakan berlomba untuk mengkalkulasi perolehan pendapatan daerahnya masing-masing. Pada pokoknya, kalkulasi perolehan pendapatan asli daerah selalu bersandar pada sumber daya alam—selain sumber-sumber pendapatan konvensional lainnya—, padahal berbagai sumber daya alam nampaknya merupakan sumber daya yang tak terbaharui. Terkadang, suatu kabupaten misalnya, nampaknya amat memaksakan

perolehan pendapatannya dari hasil tambang, ataupun hasil hutan.

Hasil tambang dan hutan memang diakui sebagai sesuatu yang dapat memberikan hasil keuangan yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahan kabupaten, tetapi berdasarkan sejarah, kedua sumber itu apabila dikelola dengan buruk akan memberikan dampak yang amat sangat buruk pula bagi kehidupan generasi mendatang. Sejarah telah membuktikan, beberapa negara di Eropa—akibat revolusi industri—150 tahun sesudah pembabatan hutan untuk industri, kini merasa sangat menyesalinya. Sudah bukan rahasia pula bahwa Amerika Serikat ternyata adalah salah satu negara yang mempunyai cadangan minyak dan gas bumi terbesar di dunia, tetapi eksploitasi yang dilakukan di negara itu bisa dihitung dengan dua belah tangan. Begitu hati-hatinya negara ini dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

Tulisan ini memberikan penawaran alternatif tentang penambahan perolehan pendapatan asli daerah selain dari pendapatan daerah konvensional yang sudah diketahui bersama. Tawaran ini terutama ditujukan kepada daerah atau kabupaten yang mempunyai wilayah laut yang berada di provinsi Sulawesi Selatan melalui salah satu kegiatan arkeologi: arkeologi bawah air.

Arkeologi dan Arkeologi Bawah Air

Arkeologi terkadang dianggap sebagai suatu kegiatan keilmuan yang bersifat romantik. Romantisme arkeologi dapat tercermin melalui kegiatan perjalanan, penemuan, dan penulisan atau diskripsi tentang masyarakat masa lamapau. Kaum terpelajar sekalipun masih menganggap arkeologi sebagai ilmu yang berhubungan dengan kuburan atau semacamnya, padahal ilmu ini menurut salah satu batasannya—dari sekian banyak batasan arkeologi yang ada, sebagaimana yang ditulis oleh Colin Renfrew dan Paul Bahn (1996)—adalah :

"A subdiscipline of anthropology involving the study of the human past through its material remains." (Renfrew dan Bahn, 1996:539)

Berkenaan dengan itu, tidaklah mengherankan jika seorang arkeolog selalu bergiat dalam kerangka masa lalu. Selain itu, seorang arkeolog akan sangat akrab dengan sisa kebudayaan material masa lalu. Dalam konteks itu pula barangkali, sehingga sebagian besar arkeolog sepakat bahwa terdapat tiga tujuan arkeologi yaitu mengkonstruksi sejarah budaya, merekonstruksi tingkah laku, dan mempelajari proses budaya. Tiga tujuan arkeologi seperti itu nampaknya sangat sarat dengan nilai akademis atau saintifik.

Sebetulnya, selain tiga tujuan arkeologi sebagaimana

Arkeologi dan Arkeologi Bawah Air

Arkeologi terkadang dianggap sebagai suatu kegiatan keilmuan yang bersifat romantis. Romantisme arkeologi dapat tercermin melalui kegiatan perjalanan, penemuan, dan penulisan atau diskripsi tentang masyarakat masa lampau. Kaum terpelajar sekalipun masih menganggap arkeologi sebagai ilmu yang berhubungan dengan kuburan atau semacamnya, padahal ilmu ini menurut salah satu batasannya—dari sekian banyak batasan arkeologi yang ada, sebagaimana yang ditulis oleh Colin Renfrew dan Paul Bahn (1996)—adalah :

"A subdiscipline of anthropology involving the study of the human past through its material remains." (Renfrew dan Bahn, 1996:539)

Berkenaan dengan itu, tidaklah mengherankan jika seorang arkeolog selalu bergiat dalam kerangka masa lalu. Selain itu, seorang arkeolog akan sangat akrab dengan sisa kebudayaan material masa lalu. Dalam konteks itu pula barangkali, sehingga sebagian besar arkeolog sepakat bahwa terdapat tiga tujuan arkeologi yaitu mengkonstruksi sejarah budaya, merekonstruksi tingkah laku, dan mempelajari proses budaya. Tiga tujuan arkeologi seperti itu nampaknya sangat sarat dengan nilai akademis atau saintifik.

Sebetulnya, selain tiga tujuan arkeologi sebagaimana

disebutkan di atas terdapat berbagai alasan yang dapat dikemukakan atas pertanyaan "mengapa bergiat di bidang arkeologi?" Alasan itu antara lain: arkeologi sebagai *entertainment*, arkeologi dapat digunakan sebagai alat politik, dan arkeologi dapat digunakan untuk melestarikan warisan budaya—sebagaimana yang ditulis oleh Brian M Fagan (1985:9—13)—serta untuk kepentingan ekonomi.

Bila kita mengunjungi situs-situs arkeologi yang terkenal di luar negeri, akan dapat dengan mudah dilihat betapa sejumlah kendaraan besar sejenis bus dipenuhi oleh orang yang mengunjungi situs itu. Pemandangan seperti itu—misalnya—dapat disaksikan jika kita mengunjungi piramida di Mesir dan piramida peninggalan bangsa Aztec di Amerika Selatan. Di negara yang sudah maju, kursus singkat tentang arkeologi dibuka, terutama menjelang liburan musim panas tiba. Kelas ini ditujukan bagi orang-orang yang ingin merasakan nuansa petualangan yang amat kental dalam kegiatan arkeologi. Ini adalah sedikit contoh bagaimana kegiatan arkeologi sudah menjadi semacam *entertainment*.

Sejarah Zambia sesungguhnya ditulis oleh sekelompok arkeolog dan sejarawan atas perintah presidennya, Kenneth Kaunda. Dengan bangga Presiden Kaunda berkata—sebagaimana catatan Fagan (1985:12) : *"This is our history. Now we can look people from other countries in the face and tell them that we have a history and*

national identity to be proud of." Di Jerman, Nazi "berhasil" menemukan "temuan" *for the evolution of a master race in Europe* yang melegitimasi bangsa Arya sebagai ras yang paling tinggi dan kemudian menghalalkan pembunuhan massal. Dua contoh itu menunjukkan bagaimana arkeologi dapat dijadikan sebagai alat politik sekaligus sebagai salah satu alat untuk mempertebal identitas kebangsaan.

Suatu contoh klasik dari kegiatan kearkeologian yang mencakupi kesemua tujuan arkeologi sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah kegiatan kearkeologian yang dilakukan oleh The York Archaeological Trust pada tahun 1976 hingga kini di situs The Jorvik Viking Centre, York, Inggris bagian utara. Sebagaimana yang dicatat oleh Collin Renfrew dan Paul Bahn (1996) situs ini :

"The Jorvik Viking Centre in the city of York, Northern England, is one of the most popular and financially successful museums to have been created on an archaeological site anywhere in the world. In 1976, the York Archaeological Trust began a 5-year excavation beneath the foundation of a demolished Victorian factory in Cappergate, one of the main streets of old York.....Since the dig had attracted about half a million visitors and aroused international interest, a decision was made to preserve the Viking Age timbers, to reconstruct some of the buildings, and also to recreate a part of this Viking Age neighborhood. The result, opened in 1984, is the Jorvik Viking Centre, located underneath a new shopping complex.....Financially the Centre has supported new excavation in York,

and its success—with over 8 million visitors in the first 10 years—has led to similar displays opening or being planned in other British towns as well as in other countries.” (Renfrew dan Bahn, 1996:534).

Berbagai cabang arkeologi pun bermunculan seiring dengan perkembangan arkeologi. Cabang-cabang itu antara lain arkeologi pemukiman, arkeologi industri, arkeologi gender, etnoarkeologi, arkeologi bawah air, dan sebagainya.

Salah satu kegiatan kearkeologian yang mungkin dapat dilakukan di Sulawesi Selatan untuk tujuan kepentingan ekonomi dalam kerangka untuk menambah pendapatan asli daerah—selain tujuan arkeologi lainnya—adalah arkeologi bawah air yaitu—*“study of archeological sites and shipwrecks beneath the surface of the water”* sebagaimana yang dikatakan oleh Brian M Fagan (85:592). Kegiatan kearkeologian ini, kemudian, di Indonesia lebih populer dengan “pengangkatan harta karun.” Kegiatan itu, bagaimanapun juga, hanya dapat dilakukan oleh tenaga terampil dibidangnya—tentu saja arkeolog—dan dilaksanakan dengan menempuh prosedur dan kaidah disiplin arkeologi.

Potensi Sumber Daya Arkeologi Bawah Air di Sulawesi Selatan

Bukti tertua tentang terjadinya *trade and exchange* antara Sulawesi Selatan dengan daerah 'luar' yang saat ini diketahui adalah dari temuan artefaktual yang ditemukan di Pantonoa Bangka, tepi Danau Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, hasil penelitian The Oxis Project pada tahun 1998 yang dikomandoi oleh David Bulbeck dan Bagyo Prasetyo. Temuan tersebut—sekarang menjadi koleksi Balai Arkeologi (Balar) Makassar—berupa manik-manik berfaset 64 (enam puluh empat) dan kain katun yang setelah diuji-laboratoriumkan dan dikalibrasi dengan sistem *two sigma calibration* diperoleh pertanggalan 410-660 M (Wolman, 2000:76—7). Menurut catatan Tanwir L. Wolman, tidak ada indikasi bahwa manik-manik tersebut dikerjakan di daerah tempat ditemukannya, bahkan dia menduga—berdasarkan diskusinya dengan Dr. Moh. Ali Fadillah—benda itu diduga kuat berasal dari India.

Berbagai artefak maupun fitur kemudian memberi petunjuk kepada kita bahwa antara abad V hingga kini telah terjadi suatu arus pertukaran dan ataupun perdagangan antara daerah ini dengan daerah lainnya. Petunjuk terkuat berasal dari berbagai temuan keramik yang dijumpai pada semua "kerajaan kuna"³, baik kecil maupun besar, baik "vasal" maupun "matoa".

Para pedagang barang antik (baca: keramik) di

Sulawesi Selatan tahu betul lokasi-lokasi pencarian keramik. Pada pokoknya mereka menunjuk lokasi penggalian barang antik pada bekas-bekas kerajaan tertua di Sulawesi Selatan yaitu Siang, Luwu, Bantaeng, Gowa, Suppa, dan Bone. Kesemua bekas kerajaan itu memang disebut-sebut oleh kolektor keramik sebagai daerah-daerah yang memiliki kualitas keramik yang sangat bagus dan mahal.

Tidak seperti sekarang ini, antara abad IV hingga XIX—bahkan di belahan dunia lain, dimulai pada *upper palaeolithic* sebagaimana yang dicatat oleh Keith Muckelroy (1978:3)—arus pertukaran dan perdagangan antara Sulawesi Selatan dengan daerah luar pulau terjadi dengan menggunakan perahu atau wahana lain melalui laut.

Berdasarkan *densitas* temuan—terutama keramik asing—dapat dipastikan Sulawesi Selatan memiliki aksesibilitas yang cukup memadai ketika itu sebagai daerah tujuan *trade* dan *exchange*. Berdasarkan *densitas* itu pula kita bias membayangkan—sambil berspekulasi—seramai apakah gerangan lalu lintas di perairan Sulawesi Selatan? Kita juga bisa membayangkan seberapa banyak keramik asing dan barang berharga lainnya—sebagai potensi sumber daya arkeologi bawah air—yang masih tersimpan di laut perairan Sulawesi Selatan akibat karamnya perahu pedagang? Kalkulasi ekonomipun—sekali lagi spekulatif—lantas bekerja disini. Semua ini tentu saja akan menjadi alternatif bagi perolehan pendapatan daerah dengan catatan kegiatan itu dilakukan dengan

sangat profesional.

Pengalaman pengangkatan harta karun menunjukkan perolehan keramik utuh diatas 100an ribu keping keramik per-wahana yang tenggelam. Jika sejumlah keramik tersebut disubstitusi dengan rupiah dan dengan harga jual jauh dibawah harga pasar saja, maka jumlahnya milyaran bahkan trilliunan rupiah. Bahkan menurut sdr. A'dy Mulyadi (press.com.) setiap operasi pengangkatan harta karun rata-rata menghasilkan diatas \$ 2,000,000. Suatu jumlah yang sangat menggiurkan bukan ?

Metode

Persoalannya kemudian adalah dengan cara apa kita dapat mengetahui bahwa pada sebuah perairan terdapat sumber daya arkeologi bawah air ? Ada dua cara untuk mengeksplorasi potensi sumberdaya arkeologi bawah air yang bisa dilakukan yaitu secara konvensional tradisional dan dengan memanfaatkan teknologi canggih. Cara konvensional dilakukan dengan jalan mengumpulkan informasi dari penyelam ataupun nelayan. Informasi dari mereka biasanya cukup akurat. Cara lainnya adalah memeriksa arsip-arsip kuno yang menerangkan tentang terjadinya peristiwa kapal karam pada suatu masa, tetapi cara ini kadang tidak menunjuk lokasi secara akurat. Melalui cara konvensional ini, biaya sangat murah.

Pemanfaatan teknologi canggih-satelit umpamanya—

membutuhkan biaya yang mahal. Kelebihannya adalah dapat menunjukkan kordinat secara akurat yang berimplikasi pada kemudahan untuk eksploitasi.

Potensi Sumber Daya Manusia

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar (BP3) merupakan institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan khusus dalam mengelola berbagai sumber daya arkeologi di Indonesia. Institusi ini memiliki paling kurang 5 (lima) orang *diver* yang ahli dalam bidang penyelaman untuk tujuan kegiatan arkeologi bawah air. Termasuk bidang keahlian mereka adalah operasi pengangkatan harta karun. Selain itu, Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin sejak beberapa tahun terakhir ini telah mengelola satu mata kuliah—Arkeologi Bawah Air—untuk tujuan itu. Disini dapat ditambahkan, telah hadir pula di Universitas Hasanuddin Fakultas Kelautan dan Perikanan. Satu lagi instansi yang bekerja pada wilayah arkeologi adalah Balai Arkeologi (Balar) Makassar. Institusi ini memiliki seorang ahli keramik yang telah terkenal di manca negara yaitu guru saya yang terhormat, Karaeng Demmanari.

Keempat institusi itu sebetulnya dapat diajak kerja sama oleh Pemerintah Daerah dalam usaha menambah perolehan pendapatan asli daerahnya melalui kegiatan arkeologi bawah air. Masalahnya kemudian adalah kordinasi antara keempat institusi itu belum berjalan dengan amat baik. Selain itu, tindakan proaktif Pemerintah

Daerah belumlah dikatakan optimal.

Kendala

Memang betul, kegiatan pengangkatan harta karun dapat meraup keuntungan yang menggiurkan, tetapi jangan lupa pula bahwa biaya operasional kegiatan ini juga menelan biaya yang tidak kecil pula. Salah satu contoh adalah bayaran *diving master* yang selalu harus ada pada setiap kegiatan arkeologi bawah air. Belum lagi biaya sewa kapal dan alat selam lainnya. Meskipun demikian, pilihan untuk *diving master* adalah bangsa sendiri karena bayarannya jauh lebih murah dibanding *diving master* bangsa asing.

Membayar tenaga arkeolog yang terampil untuk keperluan seperti itu juga cukup mahal. Hal ini dapat dimaklumi mengingat resiko yang ditanggung adalah melayangnya jiwa jika tidak terampil dan handal.

Tapi semua kekhawatiran dan resiko itu dapat diminimalisasi jika kegiatan arkeologi bawah air dilakukan secara profesional. Jadi, arkeologi bawah air sebagai salah satu alternatif tambahan pendapatan daerah: mengapa tidak ?

Catatan

1. Judul ini pernah dipresentasikan pada Diskusi Ilmiah

Arkeologi yang dilaksanakan pada tahun 1996 dengan sedikit perbaikan.

2. Penulis adalah Ketua Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, staf/pendiri Celebes Heritage, Direktur/pendiri Institut Etnografi Indonesia, Makassar, serta penggemar berat ayam bangkok aduan.
3. Sebetulnya, menurut Elman Service (1971)—sebagaimana yang ditulis oleh Brian. M Fagan (1985)—strata organisasi sosial dapat dibedakan dalam 4 (empat) skala yaitu:

"Bands. For most of its long prehistory, flourished in small bands, associations of families that may have been no larger than twenty-five to six people. These bands were knit by close kinship ties. This highly viable form of social organization is amat effective for hunter-gatherers and survives into modern times among the !Kung San, the Australian aborigines, and other groups. The tight organization of the band encourages cooperative hunting and gathering and sharing of resources.

Tribes. The social level of the band proved effective as long as human beings were hunter-gatherers. But once they began to cultivate the soil and domesticate animals, the more sedentary life and demanding

requirements of food production caused people to associate in aggregates of bands that were linked by class into tribes. A clan unites families within an organization in which all its members claim descent from a common ancestor. Tribal societies are essentially democratic, for the leadership of this much larger social unit is normally conducted through a tribal council of some type whose membership consists of band and clan representatives. A tribe may also possess nonkinship social units that foster a particular activity, such as canoe navigation or potmaking. These sodalities are but one of several new forms of social organization that tribes employ to manipulate their growing populations. At the core of tribal life is the notion that all resources are owned by the tribe as a whole and are to be controlled in a basically egalitarian manner.

Chiefdoms. Tribal societies develop chiefdoms in situations where the egalitarian principles of the society are replaced by a new order, where different kin groups assume a form of ranking within society as a whole. One kin group may achieve prominence because its members, all descended from a common ancestor, are associated with extraordinary deeds, or are believed to have unusual religious or other abilities. This lineage may soon enjoy a special status in society, which gives its leaders organizational powers to cater to the

needs of society as a whole. The lineage chieftains do not actually control or own the products or services of the society that they manipulate or redistribute. Rather, they act as the social instrument for the redistribution of goods and services for their society as a whole. These chiefdoms are headed by lineage leaders who coordinate the management of food surpluses and the products of the diverse part-time specialist craftspeople that even a tribal society possesses. Once food supplies are regularly produced and division of labor within a society has diversified far beyond that of simple male-female roles, then the leaders of the principal lineage or lineage assume an important role in redistributing specialist products throughout the tribe fairly, keeping a proportion of the supplies for their own use and for storage in commonly backed by their spiritual powers, their intermediary role with the society's deities, and their abilities at regulating the cycles of planting, harvesting, and even rainmaking. The leader of chiefdoms may even be specialists themselves, priests with extraordinary spiritual powers, who were the only people permitted access to certain types of exotic cult objects,

certain clothing, and even certain types of food. Chiefdoms, such as those of the Hopewell people of the Midwest, are really a transitional stage between tribal society and the much more organized societies of the early civilizations" (Fagan; 1985:469—470)

Kerajaan kuna diterminasi oleh Elman Service yang disadur oleh William Sanders dan Joseph Marino—sebagaimana yang dirangkum oleh Colin Renrrew dan Paul Bahn (1996)—adalah :

“Early States. These preseve many of the features of chiefdoms, but the ruler (perhaps a king or sometimes a queen) has explicit authority to estabilish laws and to enforce them by the use of a standing army. The society no longer depends totally on kin relationships: it is now statified into different clasess, with a craft specialists above, and the priests and kinsfolk of the ruler higher still. The functions of the ruler are often separated from those of the priest: palace is distinguished from temple. The society is viewed as a territory owned by the ruling lineage and populated by tenants who have the obligations of paying taxes. The central capital houses a bureaucratic administration of officials; one of their principal puposes is to collect revenue (often in the form of taxes and tools) and distribute it to government, army, and craft specialists. Many early states

developed complex redistributive system to support these essential services. Early state societies generally show a characteristic urban settlement pattern in which cities play a prominent part. The city is typically a large population center (often more than 5000 inhabitants) with major public buildings, including temples and work places for the administrative bureaucracy. Often, there is pronounced settlement hierarchy, with the capital city as the major center, and with subsidiary or regional centers as well as local villages." (Renfrew and Bahn;1996:168).

Dengan demikian, istilah "kerajaan" mungkin dapat dipakai secara selektif.

Daftar Pustaka

- Fagan, Brian M., 1985 *In the Beginning: An introduction to archaeology*. Fifth Edition. Boston: Little, Brown and Company.
- Muckelroy, Keith., 1978 *Maritime Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Renfrew, Colin and Paul Bahn., 1996 *Archaeology: Theories, Methods and Practice*. Second Edition. London: Thames and Hudson Ltd.
- Wolman, Tanwir L., 2000 "Komunitas Pra-Bugis di Tepi Danau Matano: Beberapa Indikasi Dari Situs Kubur" dalam Moh. Ali Fadillah dan Iwan Sumantri (ed.) *Kedatuan Luwu, Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi*, halaman 73—86. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.

SITUS KAWASAN BELAE, PEMANFAATAN DAN UPAYA PELESTARIANNYA

Oleh : Syahrawi Mannan*

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

*B*elaE merupakan sebuah kawasan perbukitan yang telah dihuni sejak zaman prasejarah, sebarannya mengarah ke Barat-Timur dengan luas 90,25 Ha, yang mencakup dua kampung, yaitu Kampung Lesang di sebelah Barat dan Kampung BelaE di Timur. Kawasan BelaE berada pada posisi astronomi $043^{\circ}43'37''$ LS – $0436'35''$ LS dan $11949'49''$ BT dan $11951'30''$ BT.

Secara administratif kawasan BelaE masuk ke dalam Wilayah Kampung BelaE, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Manasate'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak 55 Km sebelah Utara Kota Makassar. Lokasi ini dapat dicapai dalam waktu $\pm$ 2 jam dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun empat.

Bentang alam kawasan BelaE terdiri atas satuan morfologi karst yang terbentuk dari perbukitan kapur (limestone) dengan ketinggian antara 245 m sampai 342 m dan satuan morfologi daratan yang terbentuk dari sediment alluvial. Satuan morfologi karst berada di

bagian Utara dan Selatan kawasan, sedang satuan morfologi daratan merupakan celah perbukitan yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan pemukiman yang sudah dilengkapi dengan akses jalan yang telah diaspal. Kawasan BelaE merupakan hasil pengangkatan pada kala tersier membentuk gugusan perbukitan gamping, yang ditandai dengan ditemukannya sisa-sisa hewan laut, adanya pengikisan gelombang laut dan rekahan. Tipe perbukitan topografi karst dicirikan dengan bentuk puncak bukit yang bulat dan melengkung tumpul, menara karst, stalatit dan stalakmit, serta lembah yang sempit dan terjal. Topografi karst terjadi sebagai akibat dari proses pelarutan dan erosi dalam kurun waktu yang panjang di daerah gamping, dan dalam pelarutan ini sering dihasilkan bentuk gua dan ceruk gua-gua inilah yang pada masa lampau menjadi tempat pemukiman awal manusia di Sulawesi Selatan yang dicirikan dengan temuan tinggalan budaya berupa lukisan dinding gua (rock painting), alat-alat microlith dan beberapa sisa-sisa makanan.

Berdasarkan struktur geologinya, gua-gua dikawasan BelaE dapat dikelompokkan ke dalam tipe gua kekar tiang dan tipe gua kekar lembaran. Pada bentuk gua kekar tiang bentuk ruang memperlihatkan ruang yang sempit dengan atap yang tinggi, proses travelin sangat aktif sehingga membentuk pilar, sinter, stalaktit dan

stalakmit. Keaktifan proses travelin ini menyebabkan ruang gua menjadi rumit dan sempit, lantai miring dan curam, dan seringkali pada dasar gua ditemukan sungai bawah tanah yang berair sepanjang musim. Pemanfaatan sungai bawah tanah terlihat disekitar Gua Leang Kassi yang dijadikan sumber mata air oleh PDAM Kabupaten Pangkep dan Gua Leang Lompoa yang sudah dibendung untuk mensuplai sawah-sawah penduduk disekitarnya. Sisi negatif proses travelin yang aktif ini mengakibatkan sebagian lukisan gua tidak dapat dirunut lagi eksistensinya karena tertutup oleh stalaktit, cepatnya proses travelin disebabkan oleh tingginya kelembaban dan rendahnya suhu udara didalam gua, serta kurangnya penguapan oleh sinar matahari. Walaupun ruang gua seringkali mendapat sinar yang cukup baik namun tingkat kelembaban tetap tinggi karena banyaknya kandungan air didalam bebatuan yang disebabkan oleh rekahan-rekahan vertical dari puncak bukit hingga ke sungai bawah tanah serta lebatnya vegetasi dilingkungan gua. Tipe gua kekar lembaran memperlihatkan bentuk ruang yang luas dengan bentuk atap yang pendek, serta bentuk rongga yang bias sangat panjang. Proses travelin yang terjadi pada gua tipe ini kurang aktif sehingga tidak banyak dijumpai stalaktit, stalakmit dan sinter. Hal ini disebabkan karena air sebagai mediator utama bergerak mengikuti arah rekahan horizontal bukan vertikal sebagaimana arah rekahan pada tipe gua kekar

tiang. Travelin pada dinding gua kekar lembaran terbentuk pada dinding gua dengan tingkat ketebalan yang tipis, berjalan lambat dalam waktu yang lama, pada bagian inilah manusia prasejarah meletakkan lukisannya. Dimusim kemarau pada suhu yang tinggi, kadar air rendah dan kelembaban juga rendah seringkali terjadi pengupasan yang mengakibatkan lukisan yang ada ikut pula terkelupas.

Pengamatan terhadap lintasan yang dilalui tebing bukit menampilkan bentuk cekungan yang pada musim hujan cekungan tersebut merupakan suatu dataran rawa (wamp), dimana air dapat mendekati mulut gua. Sepanjang dataran rawa dan pelataran yang ada diatasnya tumbuh vegetasi tumbuhan berupa pohon enau, rumbia, nipah dan lain-lain, sedang disekitar pemukiman penduduk tumbuh pohon nangka, mangga, asam, lontar, kelapa dan lain-lain. Pada bagian puncak bukit tanaman yang tumbuh sebagai vegetasi penutup didominasi oleh jenis tumbuhan perdu dari suku eupotarium, cantana, cemara dan pohon lica-lica (lokal).

Sebagaimana halnya dengan wilayah yang dilintasi gugusan perbukitan kapur di Sulawesi Selatan yang dicirikan oleh iklim tropika basah, demikian pula halnya keadaan lingkungan makro kawasan BelaE. Musim yang terjadi dikawasan ini terdiri atas dua yaitu; musim hujan berlangsung pada bulan Oktober sampai Maret dan

musim kemarau berlangsung antara bulan April dan September. Curah hujan tertinggi 3.828 mm/tahun dan yang terendah 25 mm/tahun, dengan rata-rata 726 mm. Suhu udara berkisar antara 25—27° dengan kelembaban antara 90—74 persen.

B. Riwayat Penelitian

Penelitian gua-gua di Sulawesi Selatan pertama kali dilakukan pada tahun 1902—1903 oleh dua orang bersaudara berkebangsaan Swiss yaitu Paul dan Frist Sarasin, mereka mencoba menyimak sisa-sisa aktivitas manusia di Gua Cokondo, Ululeba dan Bulisuo dekat Lamoncong, Kabupaten Bone. Disini mereka berjumpa dengan beberapa orang yang berdiam didalam gua yang oleh masyarakat lokal disebut Toala. Publikasi terhadap kegiatan mereka menarik minat peneliti prasejarah asing lainnya untuk dating ke Sulawesi Selatan, mereka adalah W.A.Mijsberg, P.V.Van Stein Callefels, HD.Noone, AA.Cense, Van Heekeren, SHM.Heeren Palm, C.J.H.Franssen, WJA.Willems, F.D.Mc.Carthy, IC.Glover dan D.J.Mulvaney. Keterlibatan orang Indonesia dalam penelitian gua-gua prasejarah di Sulawesi Selatan dimulai ketika R.P.Soejono bersama DJ.Mulvaney (Australia) melakukan ekskavasi di Gua Batu Ejaya dan Pangnganreang Tudea di Bantaeng. Penelitian yang dilakukan oleh orang asing berakhir

pada tahun 1975, dan berhasil mengidentifikasi tinggalan budaya pada gua-gua berupa alat-alat mikrolit berupa serpih bilah, beberapa alat tulang dan kulit kerang, lukisan dinding gua dan sisa-sisa makanan.

Perhatian terhadap gua-gua prasejarah dikawasan BelaE dilakukan oleh para mahasiswa Arkeologi Universitas Hasanuddin pada tahun 1980-an, mereka melakukan penelitian gua-gua dikawasan ini dalam rangka pembuatan skripsi, dan mulai saat itu penelitian secara intensif dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwewenang, seperti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jakarta, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara

Tinjauan Arkeologis Kawasan Belae

Dari 21 buah gua yang mengandung sumberdaya arkeologi di kawasan BelaE, yang akan diuraikan pada hanya 10 buah gua antara lain :

1. Gua Leang Limbubuka

Leang Limbubuka telah diteliti oleh Said (1988), Mustika (1990), Fakhriani (1991), Puslit Arkenas (1991, 1992, 1993, 1995), Harun (1992) dan Iwan (1996). Potensi

arkeologi yang dikandung gua ini berupa sisa-sisa makanan dan artefak batu. Sisa-sisa makanan berupa buangan kulit kerang dari jenis brachyuran, gastropoda dan pelecypoda, tulang burung dan gigi binatang babi, serta alat batu serpih (flakes), alat bilah (blade) dan batu inti (core).

2. Gua Leang Caddia

Penelitian Gua Leang Caddia dilakukan oleh Gafar (1991), Fakhriani (1991), Puslit Arkenas (1991, 1992, 1993, 1995), Harun (1992) dan Iwan (1996).

Potensi arkeologi yang ditemukan di gua ini berupa lukisan dinding gua (rock painting) berjumlah 15 buah yang terdiri atas; telapak tangan, bentuk manusia, bentuk menyerupai pallus, gambar ikan, garis-garis. Artefak batu berupa alat serpih, bilah dan tatal. Sisa-sisa makanan berupa buangan kulit kerang dari jenis gastropoda dan pelecypoda.

3. Gua Leang Buto

Penelitian Leang Buto telah dilakukan oleh Harun (1992) dan Iwan (1996). Tinggalan arkeologis yang terdapat pada gua ini terdiri atas: lukisan dinding gua berjumlah 6 buah berupa telapak tangan, artefak batu berupa alat serpih, alat bilah dan tatal, dan sisa-sisa makanan.

4. Gua Leang Lompoa

Sumberdaya arkeologis di situs ini telah diteliti oleh Malessi (1987), Mustika (1990), Mulyadi (1993), Harun (1992), Kosasih (1995), Puslit Arkenas (1991, 1992, 1993, 1995) dan Iwan (1996).

Potensi arkeologi yang ditemukan di gua ini berupa lukisan dinding gua (rock painting) berjumlah 11 buah yang terdiri atas; 5 buah lukisan telapak tangan, bentuk manusia, hewan, garis-garis lengkung dan sebuah gambar menyerupai alat batu serpih. Artefak batu berupa alat serpih, alat bilah, tatal dan batu inti. Sisa-sisa makanan berupa buangan kulit kerang dari gastropoda dan pelecypoda.

5. Gua Leang Kassi

Situs ini telah diteliti oleh Said (1988), Mustika (1990), Mulyadi (1993), Harun (1992), Kosasih (1995) dan Iwan (1996).

Sumberdaya arkeologi yang dikandung situs Kassi berupa lukisan dinding gua, artefak batu dan sisa-sisa makanan. Kenampakan lukisan dinding gua terdiri atas 5 buah gambar telapak tangan berwarna merah, 3 gambar manusia berwarna hitam dan beberapa gambar yang tidak teridentifikasi. Alat-alat batu berupa alat serpih, alat bilah dan tatal. Sedang sisa-sisa makanan berupa molusca, gastropoda dan tulang-

tulang binatang.

6. Gua Leang Kajuara

Leang ini sudah diteliti oleh Dwiantoro ((1986), Harun (1992), Kosasih (1995) dan Iwan (1996).

Sumberdaya arkeologi yang dikandung Gua Leang Kajuara berupa lukisan dinding gua, artefak batu dan sisa-sisa makanan. Kenampakan lukisan dinding gua terdiri atas 17 buah gambar telapak tangan berwarna merah, 2 gambar ikan berwarna hitam, 1 gambar menyerupai perahu terpotong berwarna hitam dan sebuah goresan hitam yang tidak teridentifikasi. Alat-alat batu berupa alat serpih, alat bilah dan tatal. Sedang sisa-sisa makanan berupa gastropoda, pelecypoda dan tulang-tulang binatang.

7. Gua Leang Pattenung

Gua Leang Pattenung sudah diteliti oleh Harun (1992), Kosasih (1995) dan Iwan (1996).

Sumberdaya arkeologi yang dikandung gua Leang Pattenung berupa lukisan dinding gua, dan sisa-sisa makanan. Kenampakan lukisan dinding gua terdiri atas 18 buah gambar telapak tangan berwarna merah, 1 buah telapak kaki berwarna merah, 1 buah gambar berwarna merah sedang sisa-sisa makanan berupa gastropoda, pelecypoda dan tulang-tulang binatang.

8. Gua Leang Sakapao

Penelitian di Gua Leang Sakapao dilakukan oleh Ramli (1987), Fakhriani (1991), Mulyadi (1993), Nasution (1994), Kosasih (1995) dan Iwan (1996).

Sumberdaya arkeologi yang dikandung gua Leang Sakapao berupa lukisan dinding gua, artefak batu dan sisa-sisa makanan. Kenampakan lukisan dinding gua terdiri atas 25 buah gambar telapak tangan berwarna merah, 5 buah gambar babi rusa.

9. Gua Leang Buloribba

Leang ini sudah diteliti Harun (1992), Kosasih (1995) dan Iwan (1996).

Sumberdaya arkeologi yang dikandung di gua ini berupa lukisan dinding gua, artefak batu dan sisa-sisa makanan. Lukisan dinding gua yang terdapat pada gua ini berupa 1 buah gambar ikan. Alat-alat batu yang ditemukan berupa alat serpih, alat bilah dan tatal. Sedang sisa-sisa makanan berupa gastropoda, pelecypoda dan tulang-tulang binatang.

10. Gua Leang Cammingkana

Leang Cammingkana telah diteliti oleh Said (1988), Mustika (1990), Fakhriani (1991), Harun (1992), Mulyadi (1993), Kosasih (1995) dan Iwan (1996).

Akumulasi data arkeologi yang dikandung gua Leang Cammingkana berupa lukisan dinding gua, artefak batu dan sisa-sisa makanan. Lukisan dinding gua terdiri atas 21 buah gambar telapak tangan yang terdiri atas 17 buah berwarna merah dan 4 buah berwarna hitam. Sedang sisa-sisa makanan berupa gastropoda, pelecypoda dan tulang-tulang binatang.

Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan Kawasan Belae

Dampak kegiatan pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik baik keseluruhan maupun bagian-bagian dari sumberdaya arkeologi dan lingkungannya secara langsung sebagai akibat dari pembangunan tersebut. Pembangunan prasarana dan perluasan pemukiman dan industri dapat pula mengakibatkan kerusakan secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai contoh kasus : BelaE merupakan kawasan yang memiliki sumberdaya budaya berupa gua-gua prasejarah. Jumlah situs cagar budaya dikawasan ini tercatat 21 buah gua, yang mengandung nilai arkeologis, dari jumlah gua tersebut diatas terdapat 2 (dua) buah gua terkena dampak pembangunan yaitu Gua Leang Kassi dan Gua Leang Lompoa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih sebagian masyarakat kabupaten Pangkep pihak PDAM membuat kolam penampungan dengan cara membendung mata air yang terdapat didepan gua Leang Kassi, dan pembuatan kolam penampungan untuk distribusi sawah-sawah petani oleh Dinas Pertanian di depan Gua Leang Lompoa telah mengakibatkan penurunan kualitas cagar budaya dalam bentuk memudarnya gambar pada dinding gua sebagai akibat dari tersingkapnya tanaman penutup yang selama ini melindungi mulut gua dari cahaya matahari secara langsung. Sedang yang terjadi pada benda cagar budaya jenis artefak alat batu dan sisa makanan adalah berubah, berkurang dan hilang sebagai akibat terjadinya erosi pelataran gua oleh air hujan.

Contoh lain terjadinya perambahan hutan mangrove disekitar gua-gua yang dilakukan oleh penduduk pendatang sebagai akibat semakin berkurangnya lahan untuk dijadikan tempat pemukiman telah merubah bentang alam yang berakibat pada semakin menurunkan mutu baku dan kualitas lingkungan benda cagar budaya.

Ancaman pembangunan industri marmer oleh pengusaha-pengusaha asing yang bekerjasama dengan pengusaha lokal yang telah terjadi di pegunungan disekitar Gua Leang Galunggung, sewaktu-waktu dapat pula terjadi dikawasan BelaE, yang tentunya akan mengakibatkan kerusakan secara langsung terhadap lingkungan yang

dapat mengakibatkan terjadinya banjir, erosi dan penurunan baku mutu udara, serta hilangnya sumberdaya budaya bangsa dimasa yang akan datang.

Upaya Pemanfaatan dan Pelestarian

1. Perencanaan Pembangunan dan Upaya Menghindari Kerusakan Sumberdaya Arkeologi

Pengenalan kawasan BelaE sebagai kawasan sumberdaya arkeologi akan menghindarkan objek tersebut dari dampak kegiatan pengembangan ataupun pembangunan di wilayah tersebut.

Pengenalan terhadap kawasan BelaE dapat dilakukan dengan cara identifikasi sumberdaya budaya oleh para ahli dengan mengumpulkan informasi dari instansi yang terkait dan mempelajari secara seksama studi-studi yang pernah dilaksanakan sebelum mengembangkan atau melaksanakan pembangunan dikawasan tersebut, selain itu kawasan tersebut harus dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten. Dan yang tak kalah pentingnya adalah penduduk setempat harus pula dilibatkan secara aktif dalam pelestarian kawasan sumberdaya arkeologi dan lingkungannya, karena seringkali berkepentingan dengan upaya perlindungan yang berkaitan langsung dengan kepercayaan atau penghormatan kepada leluhur.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan

dalam mengidentifikasi keberadaan sumberdaya arkeologi dikawasan tersebut dan menghindarkan dari kemungkinan kerusakan apabila wilayah tersebut akan dikembangkan adalah dengan teknik overlay peta. Dengan teknik seperti ini maka peta-peta kegiatan pengembangannya dapat di overlay dengan peta-peta dasar yang memuat informasi tentang keberadaan, penyebaran dan kepentingan untuk melakukan pengawetan dan perlindungan bagi sumberdaya arkeologi tersebut, dan dari hasil overlay itu dapat dibuat peta-peta untuk dipakai dilapangan dalam mengidentifikasi dan menentukan sifat dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan apabila kegiatan pembangunan/pengembangan dilaksanakan.

2. Kegiatan Pariwisata

Untuk menjaga kelestarian sumberdaya arkeologi dikawasan BelaE, perlu dilakukan upaya pengembangan ke arah kegiatan pariwisata dengan memperkenalkan objek prasejarah yang ada, pada wisatawan asing dan lokal melalui travel agen dan biro perjalanan wisata. Memang disadari bahwa kegiatan pariwisata seringkali mengakibatkan kerusakan pada sumberdaya arkeologi pada suatu situs yang diakibatkan oleh kunjungan wisata dengan frekwensi dan jumlah pengunjung yang tinggi. Namun harus disadari pula bahwa dampak positif yang ditimbulkan oleh kunjungan wisatawan ke objek-objek tersebut

karena banyak dan seringnya dikunjungi maka dengan sendirinya objek-objek tersebut akan lebih diperhatikan pemeliharannya, sehingga konservasi dan pemeliharannya akan lebih ditingkatkan. Seiring dengan itu maka penambahan fasilitas seperti tempat peristirahatan, restoran, kantor, museum dan took souvenir, akan memberi dampak positif kepada pengunjung karena adanya objek tambahan yang akan dilihat.

3. Sumberdaya Arkeologi dan Masyarakat Lokal

Seringkali sumberdaya arkeologi tidak atau kurang mendapat perhatian dan apresiasi dari masyarakat setempat sampai saat dimana sumberdaya arkeologi tersebut mengalami kerusakan, dan bahkan kepunahan. Pemahaman masyarakat, termasuk kalangan birokrat akan arti penting dari pelestarian kawasan purbakala masih rendah, bahkan selama ini masih terdapat anggapan bahwa yang perlu dilestarikan hanyalah benda cagar budaya dan situs-situs saja. Akibatnya adalah pemanfaatan lahan oleh masyarakat setempat dengan mendirikan pemukiman dan membuka lahan perkebunan dikawasan tersebut. Keadaan ini diperparah dengan semakin banyaknya investor yang diberi izin pertambangan dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tanpa memperhatikan kandungan sumberdaya arkeologi yang didalamnya.

Oleh karenanya dalam upaya pelestarian dan pengembangan serta pemanfaatan kawasan BelaE kedepan, sebagai salah satu daerah tujuan wisata, sangat diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah setempat, dengan cara mengajak masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama berperan serta dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai upaya pelestarian dan pengembangannya, agar masyarakat yang bermukim dikawasan tersebut turut bertanggungjawab dan merasa memiliki.

Penutup

Kawasan BelaE sebagai salah satu kawasan yang banyak memiliki sumberdaya arkeologi harus diselamatkan demi pembangunan itu sendiri. Adanya berbagai kepentingan disekitar sumberdaya arkeologi termasuk kepentingan ekonomi hendaknya berpedoman pada undang-Undang RI No. 24 Tahun 1992 Pasal 2 dan 3 yang berbunyi antara lain; bahwa penataan ruang berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan.

Keharusan adanya koordinasi dan keterpaduan antara pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi dengan pelestarian situs, dipertegas didalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 yang intinya menyebutkan bahwa setiap rencana kegiatan pembangunan disekitar situs, terlebih dahulu melakukan studi arkeologi dengan memadukan beberapa program kegiatan yang ada titik singgungnya dan selalu mengadakan monitoring demi tercapainya sasaran, maksud dan tujuan.

Dengan demikian apabila pengelolaan sumberdaya arkeologi dapat dilaksanakan secara konsekwen dengan mengacu kepada semua peraturan pemerintah dan undang-undang benda cagar budaya, niscaya kelestarian situs dan sumberdaya arkeologi akan terjamin.

**Penulis adalah Staf Kelompok Kerja Pemugaran
pada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala
Makassar*

Daftar Pustaka

- Anonim, 1992. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya
- Anonim, 1993. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992.
- Anonim, 1990. Laporan Pendataan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten, Suaka PSP Sulselra, Ujung Pandang.
- Anonim, 1993. Penelitian Terpadu Pemintakatan Cagar Budaya Situs Gua Prasejarah di Kabupaten—Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, Bakosurtanal, Ditlinbinjarah, LIPI.
- Anonim, 1999. Laporan Studi Kelayakan Gua-Gua Prasejarah Kawasan BelaE Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Proyek Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan, Makassar.
- Hadimulyono, 1992. Riwayat Penyelidikan Prasejarah di Indonesia, 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, PUSLIT ARKENAS, DEPDIBUD, Jakarta.
- Puslit Arkenas, 1993. Laporan Penelitian Situs-Situs Gua Prasejarah di Kabupaten Pangkep Sulawesi

Rahman, Darmawan Mas'ud , 1991. Laporan Pelacakan Gua-Gua Prasejarah di Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Suaka PSP Sulselra, Ujung Pandang.

Soejono, R.P, 1977. Zaman Prasejarah Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia Jilid I, Depdikbud, Jakarta.

PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA (Sebuah Harapan)

Oleh : Azhar Nur^{*}

I

Pengelolaan Pelestarian Peninggalan Purbakala dalam era pembangunan dewasa ini laksana setali tiga uang, pengkajian disatu sisi dan pengembangan kepariwisataan disisi yang lain. Pelestarian peninggalan purbakala yang mencerminkan nilai luhur bangsa senantiasa memerlukan pembinaan, pengkajian dengan tetap memperhatikan unsur penyelamatan dan perlindungannya, namun kepariwisataan sebagai salah satu pemasok devisa Negara tetap perlu dikembangkan. Kepurbakalaan selama ini lebih banyak bergerak dalam ruang lingkup profesionalisme ke dalam kalangan yang sangat terbatas, karena itu langkah-langkah nyata dalam pengelolaannya.

Langkah-langkah yang dimaksudkan antara lain sosialisasi peraturan perlindungan benda cagar budaya kepada masyarakat, melakukan pengkajian/penelitian dan pembinaan sumber daya manusia dalam pengelolaannya.

Pelestarian Peninggalan Purbakala senantiasa mengarah pada bentuk-bentuk pelestarian seperti pemugaran, pemeliharaan, perlindungan, dan penyelamatan, dokumentasi serta bimbingan penyuluhan.

Hal ini mengingat bahwa tujuan akhir dari segenap kegiatan tersebut adalah untuk melestariakan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu warisan budaya bangsa dari masa lalu.

Pelestarian peninggalan purbakala tidak lain adalah untuk melindungi dan menyelamatkan peninggalan sejarah dan purbakala dari kehancuran dan kepunahan baik karena akibat *wethering* (pelapukan), atau karena *structural decay* maupun karena sifat vandalisme oleh manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap pengembangan kebudayaan bangsa sehingga merusak situs atau bangunan yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai potensi kepariwisataan utamanya sebagai sarana wisata budaya.

Dewasa ini sudah terasa betapa perlunya ada usaha pengembangan yang lebih luas tentang visi pelestarian purbakala. Pengembangan visi yang dimaksud ialah adanya usaha untuk memperluas prospektif tentang fungsi dan peranan pelestarian peninggalan purbakala dalam pembangunan nasional yang didalamnya juga termasuk pengembangan kepariwisataan.

Hal ini dimaksudkan agar supaya pelestarian peninggalan purbakala dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat sebagaimana arah dan tujuan pembangunan bahwa tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan dan kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya dan

memberi corak khas kepada kebudayaan nasional.

Peninggalan purbakala bahan-bahannya terdiri bahan organik, bahan logam dan bahan yang mengandung silica. Bahan yang termasuk bahan organik seperti tulang, kayu, tanduk, tekstil, lontar, kertas dan barang kulit. Sedang yang dikategorikan logam ialah baik dari logam murni maupun dari logam campuran. Adapun arang yang mengandung silica termasuk jenis batu, keramik, gelas atau kaca.

Dari ketiga kriteria bahan-bahan peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebut diatas semuanya tidak akan kebal terhadap kerusakan mekanis, pelapukan apalagi dari tindakan vandalisme manusia.

Pelestarian peninggalan purbakala baik yang sifatnya masih living monument maupun yang sudah termasuk dead monument ataupun yang dalam bentuk movable maupun yang non movable, sebaiknya menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat tidak hanya oleh pemerintah saja. Kalaupun ada usaha pelestarian yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah itu pun hanya bersifat menyimpan yang diuntukkan bagi benda peninggalan sejarah dan purbakala yang berbentuk Movable karena sebagai pemilik atau ahli waris.

II

Pengelolaan Pelestarian Peninggalan Purbakala sebagai salah satu warisan budaya bangsa dan

pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu sumber pemasuk devisa Negara, tentunya menghadapi berbagai tantangan yang bias menyebabkan terhambatnya kegiatan pelestarian dan pengembangan kepariwisataan.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam beberapa bentuk sebagian besar karena belum adanya kesadaran hukum, kurangnya apresiasi serta tiadanya rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk merawat dan menyelamatkan mutiara yang terpendam sebagai warisan yang tak ternilai.

Permasalahan-permasalahan yang merundung usaha pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala di Sulawesi Selatan sesuai dengan sifatnya dapat diklasifikasikan diantaranya: Tehnis Konservasi, Hukum, dan yang lebih penting adalah dana.

Pembangunan Nasional Indonesia adalah pembangunan yang berencana dan berkesinambungan dengan memperhatikan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil, perikehidupan dalam keseimbangan, kesadaran hokum dan asas kepercayaan kepada diri sendiri. Karena itu pembangunan nasional menyinggung dan mencakup seluruh segi hidup dan kehidupan bangsa dan Negara baik material maupun non material.

Pelestarian Peninggalan Purbakala seharusnya dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, meskipun keterlibatannya hanya sekedar melindungi dan tidak merusak peninggalan purbakala,

karena itu sosialisasi akan peraturan maupun undang-undang terkait dengan peninggalan purbakala perlu senantiasa digalakkan.

Karena itu usaha-usaha pelestarian peninggalan purbakala tidak dapat dipisahkan bahkan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha pelestarian terhadap peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia sudah ada pada jaman penjajahan Belanda yang diciptakannya suatu sarana hukum dalam monumenen *ordonnantis staatlad* Nomor 238 Tahun 1931.

Pengelolaan pelestarian peninggalan purbakala dan usaha pelestarian dalam bentuk kegiatan pemugaran, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan dokumentasi dan bimbingan penyuluhan adalah untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu warisan budaya agar terhindar dari kerusakan dan kehancuran baik karena kerusakan yang disebut *structural decay*, kerusakan karena *weathering* atau pelapukan kimia dan biologis. Dan kepunahan karena ulah manusia yang tidak bertanggungjawab lazim disebut *vandalisme* yang bermotif komersil maupun karena sebab yang lain.

Upaya yang dilakukan dalam pelestarian peninggalan purbakala dewasa ini minimal: 1. Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dalam upaya

pengkajian dan penelitian peninggalan purbakala, 2. Mensosialisasikan peraturan pemerintah dan Undang-Undang terkait dengan pelestarian peninggalan purbakala kepada seluruh lapisan masyarakat agar sadar akan pentingnya pelestarian peninggalan purbakala tersebut, 3. Membina dan mengembangkan sumber daya yang tersedia.

III

Secara umum, peninggalan purbakala di Sulawesi Selatan dapat dibagi kedalam periode pra Islam, peninggalan purbakala pra Islam lebih sedikit bila dibandingkan masa Islam, hal ini dapat dilihat pada temuan-temuan benda cagar budaya yang ada sampai saat ini.

Bukti lain ditemukan kompleks-kompleks makam berciri Islam, yang mempunyai dekorasi, bentuk nisan, posisi makam (Utara-Selatan) yang cukup tinggi nilai estetikanya, karena pola perpaduan seni lukis prasejarah dalam bentuk garis geometris. Simbol aqidah dalam bentuk ayat-ayat suci yang dipahatkan pada batu makam.nisan. Kesemuanya menjadi gambaran betapa tingginya peradaban leluhur di masa silam, sehingga konsistensinya tetap mengalir pula mewarnai pusara terakhirnya.

Agama Islam yang masuk ke Sulawesi Selatan pada awal abad XVII membawa pengaruh yang cukup signifikan terutama peradaban manusia, meninggalkan jejak sejarah yang cukup dalam guratannya bagi peradaban

masyarakat Sulawesi Selatan.

Betapa pun kayanya daerah ini dengan peninggalan leluhur berciri Islam namun amat sedikit diantara kita yang memiliki kepedulian. Maka wisata ziarah yang justru banyak berkembang di Jawa dan sekitarnya, dengan objek peninggalan sejarah dan purbakala yang ada. Aktivitas tersebut, mencerminkan semangat keingin tahuan akan arti nilai-nilai luhur dari kehidupan masa silam.

Di Jawa misalnya, dengan obyek wisata peninggalan dari zaman jauh sebelum Islam, sampai peninggalan Islam dan Kolonial mendapatkan tempat yang sama dimata masyarakat. Candi-candi berdiri megah, masjid-masjid tua dengan kokohnya masih dapat kita saksikan, makam-makam pengajur Islam pada awal-awal Islam di Jawa masih terawatt dengan baik, bahkan sangat banyak mendatangkan devisa karena ramainya pengunjung yang dating baik wisata lokal maupun mancanegara.

Peninggalan purbakala yang bernafaskan islam di negeri ini oleh Uka Tjandrasasmita disebut: "perhatian terhadap penyelidikan obyek-obyek peninggalan Islam di negeri ini mulai timbul pada tahun 1884 ketika museum di Jakarta pada waktu itu menerima laporan tentang temuan beberapa nisan kuno di kampung Blangmerah (Pasai) dan Samudra di daerah Lhoksumawe (Aceh) (Notulen B.G. di XXII, 1884:51).

Masih langkanya penelitian intensif terhadap peninggalan purbakala Islam di Indonesia, dipahami sepenuhnya sebagai sebuah konsekuensi dari

keterkaitannya dengan agama Islam di Nusantara. Bahkan, berbagai pendapat menyebutkan, dilihat dari segi seni sebagai produk seniman dalam bentuk seni rupa missal, cirri khas seniman Islam bertumpu pada istana centris.

Mengkaji nilai Islam yang akrab dengan benda cagar budaya secara nasional, mengisyaratkan penguasaan daripada latar belakang keagamaan. Sebab, gejala-gejala kehidupan dalam suatu masyarakat yang terapresiasi dalam bentuk seni, erat kaitannya dengan latar belakang histories keagamaannya.

Secara histories, agama Islam di negeri ini paling banyak menyerap nilai seni dari berbagai unsur dan gejala kehidupan masyarakat yang menganutnya. Dari awal kehadirannya hingga saat ini dan mungkin secara prospektif akan terus berlangsung. Meskipun demikian, oleh banyak ahli purbakala menyebutkan, peninggalan Islam di Sulawesi Selatan. Sangat banyak dijiwai oleh Jawa Timuran, meski tak menutup kemungkinan dari unsur daerah lain, misalnya Aceh, Jawa Tengah dan mungkin Arab atau India maupun Cina sebagai daerah transito.

Dan kenyataan ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan bentuk makam pada berbagai daerah, "makam-makam yang menjadi pokok uraian ini adalah makam Islam betul-betul pada hakekatnya tidak berbeda dari makam-makam yang terdapat di Indonesia seluruhnya dan sebagian terbesar di dunia Islam" (V.R. Van Romondt dalam berkala arkeologi AMERTA No. 1:19:85:49).

Secara garis besar bentuk pemakaman Islam di

Sulawesi Selatan dikenal dengan bentuk terbuka tanpa kubah dan yang menggunakan kubah. Untuk bentuk yang terakhir ini, ditemukan di Makam Petta I Pao di Masamba Palopo, Bontobiraeng dan bukit Tamalate serta Katangka di Gowa dan Tallo di Ujungpandang. Di Sulawesi Selatan sudah lazim bagian kepala dan kaki diberi hiasan. Di atas makam seluruhnya itu berdirilah dua batu nisan yang menurut perbandingan agar besar dan yang bentuknya mengingatkan kita kepada puncak-puncak candi Jawa-Hindu.

Ragam hias yang terdapat pada kuburan-kuburan tua di Sulawesi Selatan, ternyata bukan hanya kepala dan kaki yang diberi hiasan, tetapi justru nisan-nisan yang bervariasi bahan bakunya, turut dihiasi dengan pola hias zaman prasejarah, kaligrafi Arab yang sedikit diantaranya mengandung doa-doa keselamatan bagi orang yang ada dalam pusara ditempat itu. Hal ini merupakan indikasi bahwa nilai Islam pada benda cagar budaya, terutama makam penuh symbol yang mengundang inspirasi untuk menelaahnya. Selain berbentuk yang khas, seperti yang disebutkan di atas, terhadap makam di Sulawesi Selatan, meskipun berciri Islam, banyak menggunakan hiasan relief yang sebenarnya merupakan bahagian dari arsitektur dan pada umumnya dipahatkan pada bidang atas dinding bangunan. Relief ini justru diwarnai dengan kalimat *La Ilaha Illallah*. Hiasan seperti ini bisa ditemukan pada dinding makam yang berbahan baku batu sedimen, kayu di

beberapa tempat dalam wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, pengisi bidang untuk nisan pun ditemukan hiasan serupa di makam Raja-Raja Tallo, persepsi bahwa Islam banyak menyerap nilai seni zaman sebelum kehadirannya di nusantara menjadi bahagian kebesarannya di zaman klasik hingga kini dan mungkin mendatang.

Diketahui bahwa pada masa kedatangan dan tersebarnya agama Islam di tanah air kita, terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Di Sumatera ketika itu terdapat kerajaan Sriwijaya dan melayu. Di Jawa kita kenal kerajaan Majapahit dan Sunda Pajajaran. Di Kalimantan ada kerajaan Negara Daha dan Kutai. Di Bali kerajaan yang bercorak Hindu bahkan sampai abad 20. Sebaliknya di beberapa daerah lainnya bahkan sama sekali tidak mendapat pengaruh agama Hindu. Kerajaan-kerajaan itu terdapat di Sulawesi Selatan seperti; Gowa, Bone, Wajo, Tome Pire yang mengunjungi Sulawesi dalam tahun 1512 melaporkan bahwa di Sulawesi ada 50 kerajaan yang masih menyembah berhala. Salah satu bukti bahwa beberapa kerajaan di Sulawesi tidak mendapat pengaruh agama Hindu tetapi masih memiliki adat istiadat leluhur ialah tentang cara penguburan. Cara-cara penguburan kerajaan Gowa ketika itu masih mengikuti tradisi masa pra sejarah, yaitu jenazah di kubur mengarah Timur-Barat serta sejumlah bekal kubur, seperti mangkuk, cepuk, tempayang dan sebagainya. (Uka: 1975:102).

Dari latar belakang tersebut, makam, masjid, istana dan rumah-rumah bangsawan banyak mengandung nilai

seni yang amat tinggi nilainya. Persoalannya ialah mata rantai pemahaman akan kekayaan nilai itu dari zaman ke zaman kurang terantisipasi. Khususnya bagi generasi muda Islam.

Sekalipun demikian, adalah realitas kehidupan ula betapa kodrat manusia senantiasa menambahkan keindahan. Rasa keindahan inilah sehingga sejak zaman prasejarah, dinding-dinding gua turut diperindah dengan lukisan sesuai dengan zamannya. Tersebutlah misalnya lukisan di gua-gua prasejarah Maros dan Pangkep.

Pemerintah telah membuat aturan formal dalam konteks pelestarian benda cagar budaya (BCB), dan memberikan pengertian dan batasan waktu yang tegas tentang BCB yakni: Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau memiliki masa jaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Atas penegasan itu, sehingga dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dipertegas bahwa benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, social, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan dan kebudayaan (U.U R.I. No. 5 Tahun 1992 tentang BCB).

Sebahagian benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil ciptaan bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Pelestarian benda cagar budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasar Pancasila. Kesadaran jati diri suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masa kini dan dalam proyeksi ke masa depan bertahan pada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri.

Upaya pelestarian benda cagar budaya dilaksanakan selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional (Penjelasan U.U R.I : 1992).

Mengacu pada konteks produk hukum tersebut dalam melindungi, memelihara, melestarikan benda cagar budaya, yang bernafaskan Islam, maka seharusnya mempunyai kebanggaan sebagai bangsa dan umat beragama, jika dapat berikhtiar dan berpartisipasi aktif dalam menggali banyak informasi kejayaan seni hias Islam pada benda

cagar budaya yang ada. Kesemuanya dalam rangka turut mengaktualkan konsepsi keislaman dan menunjang pengembanan historiografi Islam sebagai bahagian tak terpisahkan dari kepentingan pembangunan nasional.

Harus diakui bahwa dominant Benda Cagar Budaya, tak bergerak di jazirah Sulawesi diwarnai oleh nilai Islam, baik pada pembangunan sakral maupun propan, yang dalam pemanfaatannya bagi pembangunan bidang kebudayaan bangsa, nilai islam tidak harus dikesampingkan dengan argumentasi kepentingan nasional di bidang kebudayaan, social, ilmu pengetahuan dan pariwisata, melainkan harus diaktualkan dalam rangka turut menjiwai pengembangan bidang kebudayaan nasional dan pariwisata untuk masa kini dan mendatang.

***Penulis adalah Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada Fakultas Adab Universitas Negeri Islam Makassar**

PERAWATAN NEKARA PERUNGGU KABUPATEN SELAYAR

Oleh : *Mustafa**

Pendahuluan

A. Riwayat Singkat

Menurut keterangan sejarah nekara perunggu (gong besar) ditemukan di desa bonto Bangun. Nekara perunggu yang ada di kabupaten Selayar merupakan gong yang terbesar yang ada di Asia Tenggara dan gong ini merupakan gong benda peninggalan kebudayaan jaman perunggu berusia sekitar 2000 tahun.

Fungsi nekara perunggu, berfungsi keagamaan, sosial budaya, serta budaya, politik, fungsi keagamaan yaitu sebagai simbol status sosial perangkat upacara dan karya seni yang magis religius.

Lokasi penemuan yait di daerah Pap-an Lohea lingkungan Bonto Saile oleh seorang bernama Pao, pada tahun 1968.

B. Pengertian Perawatan dan Pencegahan

Untuk menanggulangi kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada benda cagar budaya atau untuk

mencegah terjadinya kerusakan dan pelapukan perlu dilakukan tindakan perawatan dan pencegahan. Agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya, dibawah ini diberikan pengertian dasar tentang perawatan dan pencegahannya. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perawatan adalah adanya upaya untuk menanggulangi atau memperbaiki terhadap benda yang telah mengalami kerusakan ataupun pelapukan (korosi)/karat yang telah terjadi pada benda cagar budaya dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan ditunjang dengan peralatan moderen. Jenis kegiatan perawatan antara lain bila perawatan terhadap batu membersihkan lumut, ganggang pada permukaan batu dengan pestisida, pembersihan rayap pada BCB dengan insektisida penyambung batu, keramik dengan epoxy resin, dan pada jenis logam perawatan berupa pembersihan akumulasi debu yang menempel, mengeluarkan karat/korosi, dan jenis patina aktif yang menempel pada permukaan obyek dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan sebagainya.

Sedangkan pencegahan adalah: adanya upaya untuk melindungi ancaman –ancaman yang akan merusak benda cagar budaya atau mencegah agar tidak terjadi proses kerusakan ataupun pelapukan, korosi/karat yang berkelanjutan.

Namun demikian bila tindakan perawatan tersebut berdaya dan berhasil guna serta dapat

dipertanggungjawabkan baik dari segi teknis maupun arkeologis, maka perlu suatu yang bersifat sistimatis dan ilmiah.

C. Tujuan Pelaksanaan Perawatan

Ada tiga tujuan utama pelaksanaan perawatan BCB, yaitu:

1. Memberantas segala jenis penyakit pada benda-benda dan bangunan purbakala
2. Melindungi benda dari ancaman kondisi lingkungan, iklim dan kelembaban udara.
3. menghambat berlangsungnya proses kerusakan benda tanpa merubah patina yang terbentuk secara alami dan berfungsi sebagai pelindung

Dengan demikian benda-benda yang telah dirawat dapat bertahan lebih lama dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang dititik beratkan pada latar belakang sejarah, seni budaya dan ketuaannya serta menjadi objek bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga dapat menambah devisa negara.

D. Indikasi Kerusakan dan Pelapukan

Kerusakan pada nekara perunggu (gong besar) yaitu berupa korosi ditumbuhi oleh jasad (patina aktif) dan adanya beberapa tempat berlubang.

E. Metode Pelaksanaan

Dalam rangka melaksanakan perawatan nekara perunggu di kabupaten Selayar, metode yang diterapkan antara lain.

1. Inventarisasi; yaitu pengumpulan data kerusakan nekara perunggu, menurut penamatan oleh tenaga perawat laboratorium nekara perunggu tersebut terbuat dari coran besi campur baja kemudian dilapisi dengan perunggu.
2. Dokumentasi; yaitu pengambilan gambar secara utuh maupun detail, sebelum, sedang, dan sesudah melakukan perawatan.
3. Sterilisasi; yaitu pembersihan benda secara mekanis maupun secara khemis dari pertumbuhan jasad (patina aktif) adapun bahan kimia yang digunakan yaitu alkohol, sodium, sesqui carbonat, alkali glyserol dan alkali roshella salt (SPT).

4. Konsolidasi; yaitu pengawetan struktur lapisan perunggu yang mengalami korosi oleh patina aktif, unsur garam dan pengaruh kelembaban bahan kimia yang digunakan adalah acetone.

F. Tahapan Pelaksanaan Perawatan

Pada dasarnya perawatan adalah kegiatan yang bersifat teknis arkeologis oleh karena itu dalam pelaksanaannya perawatan harus dilakukan secara hati-hati dan sistimatis dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku baik arkeologis maupun teknis.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan perawatan pada nekara perunggu adalah sebagai berikut:

1. Pembersihan

Pembersihan secara mekanis dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran berupa debu yang menempel dengan menggunakan alat kuas.

Pembersihan dilakukan terhadap semua komponen secara merata kemudian dilanjutkan dengan pembersihan secara khemis hal ini bertujuan untuk menghilangkan jasad yang terdapat pada permukaan dinding nekara perunggu.

2. Konsolidasi

Konsolidasi dilakukan untuk memperkuat ikatan struktur pada permukaan nekara perunggu dengan menggunakan bahan konsolidan, konsolidasi terutama dilakukan pada obyek yang telah mengalami korosi/karatan yang disebabkan oleh endapan garam. Pada perawatan nekara perunggu, bahan konsolidasi yang dipakai adalah larutan paraloid B72 kadar 2%, adapun cara pembuatannya paraloid B72 dilarutkan kedalam larutan acetone.

Untuk penyakit jenis patina aktif bahan kimia yang digunakan adalah:

- a. Sodium sesqui carbonate, dengan komposisi sodium carbonate dan sodium bicarbonate kadar 5-10% dengan perbandingan campuran 1:1
- b. Alkali gliserol dsengan komposisi 120 gram hidroksida : 40 ml glycerin dilarutkan dalam 1000 ml aquadest

Alkali Roshella Solt (SPT) dengan komposisi: 50 gr sodium hidroksida: 150 gr sodium potassium tartrate dilarutkan ke dalam 1000 ml aquades

3. Perekaman

Perekaman sangat penting untuk menunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan perawatan dan sebagai upaya untuk melestarikan data bagi kepentingan pengembangan sejarah dan ilmu pengetahuan.

Kegiatan perekaman tersebut meliputi perekaman verbal dan pictorial . Perekaman verbal adalah berupa deskripsi dalam bentuk tulisan dan laporan yang menjelaskan tentang data-data arkeologis, historis kondisi keterawatan dan keadaan lingkungan. Sedangkan perekaman pictorial adalah perekaman berupa gambar/foto yang menjelaskan kondisi fisik benda cagar budaya dan lingkungan. Pemotretan yang merupakan bagian dari kegiatan perekaman dimaksudkan untuk mengetahui segala permasalahan yang terkait dengan penanganan bangunan dalam bentuk foto. Pemotretan yang lengkap dan detail akan dapat membantu kelancaran pelaksanaan perawatan.

****Penulis adalah Staff Pemeliharaan pada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar***

Daftar Pustaka

- Sadirin, 1987. Hubertus Pengantar analisa Mikrobiologi
- Sadirin, 1990. Teknis Konservasi Koleksi Benda Cagar Budaya dan Museum
- Sadirin, 1992. Analisis Kimiawi untuk Konservasi Peninggalan Sejarah dan Purabakala.